

Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial

Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial	1
Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial	2
7.9.1 Pendahuluan	2
Kerja Komisi mengenai hak sosial dan ekonomi	5
Hubungan hak sosial dan ekonomi dengan hak-hak lainnya	6
7.9.2 Hak atas standar hidup yang memadai	7
Pembangunan dan pengeluaran pemerintah	8
Sektor kopi	11
Hak rakyat untuk menggunakan sumber daya alam	17
Hak untuk mendapatkan makanan	20
Rumah dan tanah	24
7.9.3 Hak atas Kesehatan	28
Pengertian 'Hak atas Kesehatan'	28
Kesehatan masyarakat di masa kekuasaan Portugis	30
Pendudukan Indonesia	30
Pengendalian kelahiran secara paksa	34
Kesehatan Jiwa dan Trauma	40
7.9.4 Hak atas Pendidikan	42
7.9.5 Temuan	49
Temuan umum	49
Temuan spesifik	50

Bab 7.9: Hak Ekonomi dan Sosial

7.9.1 Pendahuluan

1. Di bawah pendudukan Indonesia rakyat Timor-Leste mengalami berbagai bentuk pelanggaran yang brutal baik terhadap integritas fisik maupun hak-hak sipil dan politik mereka. Akan tetapi dampak dari kondisi hidup mereka, meskipun jarang dibahas, juga sama buruknya dan mungkin berlangsung lebih lama.

2. Hak-hak sosial dan ekonomi penduduk Timor-Leste dilanggar secara luas selama pendudukan Indonesia. Hak-hak ini dijabarkan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang hak sosial, ekonomi, dan budaya (KIHSEB), Deklarasi Universal hak asasi manusia (DUHAM), dan, untuk anak-anak, Kovenan tentang hak anak (KHA). Aturan khusus dalam Konvensi Jenewa Keempat menyebutkan kewajiban penguasa pendudukan untuk melindungi keadaan sosial dan ekonomi penduduk sipil.

3. Hak-hak yang dilindungi dalam instrumen di atas meliputi:

- Hak untuk mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi mungkin (KIHSEB Pasal 12 dan KHA Pasal 24)
- Hak atas pendidikan (KIHSEB Pasal 13, DUHAM Pasal 26 dan KHA Pasal 28-29)
- Hak seorang individu untuk melakukan pekerjaan yang dipilih sendiri secara bebas (KIHSEB Pasal 6, DUHAM Pasal 23, dan KHA Pasal 32)
- Hak atas standar hidup yang memadai, termasuk makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai, dan perbaikan terus-menerus kondisi kehidupan (KIHSEB Pasal 11, DUHAM Pasal 25 dan KHA Pasal 27)

4. Selama pendudukan Indonesia hak-hak yang sering dilanggar meliputi:

- Hak atas kesehatan (KIHSEB Pasal 12, KHA Pasal 24) dilanggar dalam penjara-penjara politik dan dengan penggunaan siksaan dan dengan kondisi kamp penampungan yang mengerikan. Pada tahun 1999 TNI dan milisi merusak 77% fasilitas kesehatan dan hampir semua peralatan medis dan obat-obatan dirampok atau dimusnahkan.¹
- Hak atas pendidikan (KIHSEB Pasal 13, DUHAM Pasal 26, KHA Pasal 28-29) dilanggar, korbannya penduduk yang dipaksa tinggal dalam kamp pemukiman ulang dan penduduk yang dipaksa berdinamika militer sebagai "tenaga bantuan operasi" (TBO).
- Hak atas pekerjaan yang dipilih sendiri dengan bebas (KIHSEB Pasal 6, DUHAM Pasal 23, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) Pasal 8.3.a, KHA Pasal 32, 38.2) dilanggar dengan memaksa penduduk untuk terlibat dalam operasi militer sebagai TBO, milisi sipil atau perisai hidup dan berbagai bentuk lain kerja paksa.
- Hak atas perumahan (KIHSEB Pasal 11, DUHAM Pasal 25) dilanggar dengan tindakan pengusiran paksa dan penghancuran rumah secara besar-besaran (lihat Bagian 7: Bab 7.3: Pindahan Paksa dan Kelaparan).
- Hak atas standar hidup yang layak (KIHSEB Pasal 11, DUHAM Pasal 25, KHA Pasal 27) dilanggar dengan pemindahan penduduk ke kamp-kamp penahanan yang keadaannya sangat buruk.
- KIHSEB dan KIHSP (dalam pasal 1(2) keduanya) juga menerapkan hak suatu rakyat untuk menggunakan dengan bebas kekayaan dan sumber daya alamnya. Hak ini merupakan salah satu segi dari hak atas penentuan nasib sendiri.
- Hak rakyat Timor-Leste untuk menggunakan dengan bebas sumber daya alam (KIHSEB Pasal 1.2) dilanggar dengan adanya Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia yang membagi hasil dari ladang minyak bumi dan gas yang kaya di wilayah kedaulatan Timor-Leste tanpa berkonsultasi dengan rakyat Timor-Leste atau tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat Timor-Leste.

5. Satu tema propaganda Indonesia yang terus-menerus ada selama pendudukan adalah perbedaan antara keterbelakangan yang dikatakan merupakan warisan utama kolonialisme Portugal dan pembangunan pesat yang diberikan pemerintah Indonesia kepada Timor-Leste. Dalam hal-hal yang dikemukakan di atas, pemerintah Indonesia nyata sekali gagal membuktikan pengakuannya bahwa yang menjadi perhatian utama mereka adalah kesejahteraan rakyat Timor-Leste. Gelombang-gelombang kekerasan dan represi serta pengendalian politik dan sosial yang ekstrim oleh militer Indonesia sangat menjadi hambatan bagi kegiatan hidup sehari-hari, termasuk kebebasan bergerak, bertani, dan kemampuan untuk mengangkut dan memasarkan barang-barang.

6. Meskipun demikian, pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial bukan hanya merupakan hasil sampingan dari operasi militer. Bahkan pada saat-saat yang keadaannya relatif normal, kekhawatiran mengenai keamanan, yang kadang-kadang bercampur dengan kepentingan pribadi dan perusahaan, lebih diutamakan daripada kesejahteraan rakyat Timor-Leste. Pendidikan yang secara terang-terangan digunakan sebagai alat propaganda dan bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pembelajaran membatasi perkembangan anak-anak dan peluang masa depan. Pemindahan desa ke wilayah-wilayah yang sebelumnya dihindari karena kondisi tanah yang buruk dan malaria telah membahayakan kesehatan masyarakat. Manipulasi harga kopi untuk membiayai operasi militer dan menguntungkan pejabat sipil dan militer secara pribadi membatasi kesempatan para petani untuk mendapatkan hidup layak. Pengambilan sumber alam dengan cara yang merusak dan tidak menjaga kelangsungannya oleh para pejabat pemerintah dan rekanan usaha mereka menghancurkan strategi kelangsungan hidup dan mengurus "modal alam" yang diharapkan oleh rakyat Timor-Leste untuk bisa dipergunakan dalam jangka panjang. Terpusatnya perhatian pada keamanan cenderung mengalihkan dana investasi negara ke

bidang-bidang seperti pembangunan jalan dan perluasan aparat pemerintah dengan mengorbankan pertanian yang mempekerjakan sebagian besar penduduk Timor-Leste.^{*}

7. Hak-hak ekonomi dan sosial dikemukakan dengan jelas dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHSEB). Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Kovenan ini, ketentuan-ketentuan di dalamnya memberikan standar dengan apa tindakan Indonesia selama masa pendudukan Timor-Leste bisa dinilai. Di dalam Kovenan itu sendiri dan dalam penjelasan yang diuraikan oleh Komisi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, diakui bahwa karena tahap perkembangan ekonomi setiap negara tidak sama maka tidak semua negara bisa memenuhi semua hak yang tercantum dalam Kovenan itu. Oleh karena itu kewajiban negara-negara adalah mengambil tindakan-tindakan untuk mencapai tingkat pemenuhan hak-hak tersebut secara bertahap sesuai kemampuan masing-masing negara. Namun demikian, pada saat yang sama, setiap negara mempunyai tanggung jawab inti yang harus selalu dipenuhi. Ini termasuk tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar tertentu, seperti makanan, tempat tinggal, obat-obatan dasar, dan pendidikan dasar. Ketentuan-ketentuan tersebut juga mengharuskan negara-negara dalam pemenuhan jaminan sosial dan ekonomi tidak melakukannya secara diskriminatif dan tidak melakukan langkah mundur yang dapat memperburuk pemenuhan hak-hak yang sudah dinikmati rakyat.

8. Komisi yakin bahwa Indonesia melanggar hak-hak ekonomi dan sosial di setiap tingkatan di atas. Dalam banyak hal, negara mengambil langkah keamanan yang ekstrem yang bertolak belakang dengan tanggung jawab inti yang semestinya dipenuhi. Dalam keadaan demikian, negara gagal memenuhi kebutuhan dasar penduduk, dan justru sering mengambil langkah mundur dan diskriminatif.[†] Komisi juga menemukan bahwa negara Indonesia tidak mengupayakan setinggi mungkin pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Timor-Leste, dan di akhir masa pendudukan, pembangunan di Timor-Leste masih jauh tertinggal dibandingkan provinsi Indonesia yang paling miskin sekalipun (Lihat Tabel 5). Kesimpulan ini mungkin mengejutkan. Tingkat investasi Indonesia di Timor-Leste sangat besar dan tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan cukup tinggi. Lebih jauh, rendahnya standar yang ditinggalkan Portugis membuat kemajuan-kemajuan yang dicapai di beberapa bidang, seperti kesehatan dan pendidikan, terlihat mengesankan. Namun demikian, Komisi menemukan bahwa alokasi investasi, distribusi PDB dan pemberian layanan sosial, termasuk kesehatan dan pendidikan, semuanya dinihkan oleh kesibukan berlebihan pemerintah Indonesia dengan masalah keamanan, oleh gaya pemerintahan yang otoriter, dan oleh persekongkolannya dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

9. Temuan ini jelas menunjukkan kaitan yang erat antara pelanggaran berat hak-hak sipil dan politik dengan pengabaian hak-hak sosial dan ekonomi. Di Timor-Leste, pengingkaran kebebasan sipil dan politik dasar bentuknya bermacam-macam, akan tetapi di antaranya ada yang membantu berkembangnya faktor-faktor yang oleh Komisi diidentifikasi telah mencegah pemenuhan hak-hak sosial dan politik rakyat Timor-Leste.

^{*} Kebijakan-kebijakan ini juga harus ditempatkan dalam konteks rezim Orde Baru Soeharto (1965-1998). Untuk tinjauan mengenai rezim ini lihat Bagian 3: Sejarah Konflik.

[†] Banyak dari pelanggaran yang dibahas bab ini adalah pelanggaran terhadap tanggung jawab inti tersebut, yang sering berupa pelanggaran berganda yang bersifat langkah mundur. Pelanggaran-pelanggaran ekstrem semacam ini ditonjolkan dalam bab ini dengan ditempatkan dalam boks.

Kewajiban Penguasa Pendudukan

Yang Berkaitan dengan Kondisi Sosial dan Ekonomi

Karena Indonesia berstatus penguasa pendudukan di Timor-Leste, Komisi juga menganggapnya memiliki kewajiban-kewajiban penguasa pendudukan sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa Keempat 1949 dan Ketentuan-Ketentuan Lampiran Konvensi Den Haag 1907 yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sosial.

Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- Penguasa pendudukan harus memenuhi kebutuhan makanan dan medis penduduk pada tingkat yang setinggi mungkin, dan jika sumber daya wilayah yang diduduki tidak mencukupi, penguasa pendudukan harus mengimpor makanan, obat-obatan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Makanan dan obat-obatan di wilayah yang diduduki bisa diambil alih oleh penguasa pendudukan hanya jika mutlak diperlukan penguasa pendudukan dan hanya jika kebutuhan penduduk sipil telah terpenuhi, dan harus dibayar dengan harga yang baik. Jika diperlukan, penguasa pendudukan harus menerima bantuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut. (Konvensi Jenewa Keempat, Pasal 55, 56, dan 59-62)
- Penguasa pendudukan dilarang menyita barang milik pribadi atau terlibat dalam penjarahan, meskipun barang pribadi tertentu bias diambil alih dengan ganti rugi. (Ketentuan Den Haag, dilampirkan pada Konvensi Den Haag IV tahun 1907, Pasal 46, 47, 52, dan 53).
- Barang tertentu milik negara bisa digunakan oleh penguasa pendudukan, dan sumber daya alam wilayah yang diduduki bisa digunakan untuk menutup biaya pendudukan. Akan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk keuntungan umum negara yang menduduki.
- Barang-barang untuk pendidikan, kebudayaan atau amal, walaupun yang dimiliki oleh pemerintah, harus diperlakukan seperti barang milik pribadi dan tidak boleh diambil atau dihancurkan dalam keadaan apapun. (Ketentuan Den Haag, dilampirkan pada Konvensi Den Haag IV tahun 1907, Pasal 56)
- Penduduk sipil tidak boleh dipaksa berdinasi dalam pasukan militer atau pasukan bantuan penguasa pendudukan, dan propaganda yang bertujuan mendorong orang masuk dinas militer secara sukarela dilarang. Orang sipil berusia di atas delapan belas tahun bisa dipaksa untuk melakukan kerja bukan militer untuk keperluan langsung penguasa pendudukan, tetapi bayaran dan kondisi kerja untuk mereka harus layak. (Konvensi Jenewa Keempat, Pasal 51)

Kerja Komisi mengenai hak sosial dan ekonomi

10. Dengan semakin berkembangnya kerja di bidang pencarian kebenaran, Komisi semakin banyak menemukan bukti pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi secara langsung dan hubungan erat antara pelanggaran hak-hak tersebut dengan pelanggaran hak-hak sipil dan politik yang menjadi titik perhatian kerja Komisi. Komisi kemudian memutuskan agar kenyataan ini dimasukkan dalam Laporan Akhir. Pada saat yang sama Komisi juga mengakui keterbatasan analisis mengenai ini. Sebisa mungkin staf Komisi melakukan wawancara, akan tetapi kerja di bidang ini lebih banyak menggunakan bahan-bahan sekunder. Karena sangat tertutupnya Timor-Leste selama masa pendudukan, dan karena penelitian pada masa itu memusatkan pada kebutuhan mendesak untuk menghentikan pelanggaran besar-besaran hak-hak sipil dan politik, maka data sosial dan ekonomi jarang tersedia. Data ekonomi yang ada kualitasnya berbeda-beda dan perlu disikapi dengan hati-hati.

11. Penyelidikan Komisi tentang pelanggaran hak sosial dan ekonomi dipusatkan pada peran Indonesia. Komisi hanya memperhatikan peran Negara Indonesia, dan tidak pada aktor-aktor lain seperti partai-partai politik Timor-Leste, karena hak sosial dan ekonomi dinilai dengan melihat

kebijakan dan praktek dari suatu pemerintah efektif, dan hanya bias ditinjau dalam jangka panjang. Ini karena hak sosial dan ekonomi pertama-tama adalah hak dari rakyat akan perbaikan terus-menerus keadaan ekonomi dan sosialnya. Komisi mengakui bahwa aktor-aktor lain, termasuk aktor-aktor Timor-Leste non-negara, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan keadaan sosial dan ekonomi rakyat. Banyak dari tindakan-tindakan ini dibahas dalam Bab 7.3: Pemandangan Paksa dan Kelaparan dan Bab 7.5: Pelanggaran Hukum Perang, tetapi tidak dimasukkan di sini karena bukan merupakan tindakan dari pemerintah efektif dengan kontrol yang berlangsung lama atas wilayah Timor-Leste.

12. Karena keterbatasan sumber daya, Komisi hanya bisa membahas pelanggaran hak budaya yang disebutkan dalam KIHSEB sejauh hak ini tidak terpisahkan dari pelanggaran hak sosial dan ekonomi. Dalam bab ini, Komisi mengajukan bukti tentang praktek-praktek penguasa Indonesia di bidang pendidikan, kesehatan dan hak atas tanah yang melanggar norma dan integritas kebudayaan Timor-Leste. Namun demikian, Komisi tidak bisa menilai dampak pendudukan pada kebudayaan Timor-Leste secara rinci dan sistematis. Komisi menyesali hal ini dan sangat menyarankan agar diadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

13. Karena berbagai alasan di atas, bab ini tidak dapat dianggap sebagai pengungkapan kebenaran yang tuntas tentang pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial. Sebaliknya, bab ini harus dilihat sebagai suatu sumbangan padanya dan pemicu untuk penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi.

Hubungan hak sosial dan ekonomi dengan hak-hak lainnya

14. Adanya dua kovenan internasional, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, tampak mempertegas pemisahan antara kedua jenis hak tersebut. Tetapi sebenarnya, pembukaan kedua Kovenan tersebut mengakui bahwa kedua hak tersebut tidak terpisahkan. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya menyebutkan:

Cita-cita mengenai manusia merdeka yang menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan lapar hanya dapat dicapai bila tercipta kondisi dimana setiap orang bisa menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak-hak sipil dan politik.^{*}

15. Hubungan erat ini dipertegas oleh Deklarasi Vienna yang dicetuskan pada tahun 1993 dalam Konferensi Dunia PBB tentang Hak Asasi Manusia:

Demokrasi, pembangunan, dan penghormatan kepada hak asasi dan kebebasan hakiki manusia saling terkait dan saling menguatkan. Demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat yang diungkapkan dengan bebas untuk menentukan sistem-sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya mereka sendiri dan partisipasi penuh mereka di segala bidang kehidupan.²

16. Penting diperhatikan dampak kurangnya perhatian kepada hak-hak sosial dan ekonomi oleh pengamat luar dan pengamat Indonesia, dibandingkan perhatian kepada hak-hak sipil dan politik. Gabungan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi dalam kondisi kemiskinan yang parah, seperti yang dialami rakyat Timor-Leste, sering digunakan menjadi penjelasan mengapa pelanggaran tersebut tidak mendapat perhatian tersendiri. Memang luas dan mendalamnya pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi sering membuat kita lupa akan beratnya pelanggaran

^{*} Pembukaan KIHSP isinya hampir sama.

tersebut dan sifat hakikinya sebagai suatu hak asasi manusia. Komisi PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dalam pernyataannya pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993, menarik perhatian peserta kepada:

Suatu kenyataan yang menghebohkan bahwa Negara-Negara di dunia dan masyarakat internasional masih sering membiarkan pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang bila terjadi bersama dengan pelanggaran hak sipil dan politik, akan menimbulkan ungkapan kengerian dan amarah.

Indikator-indikator statistik mengenai pengabaian, atau pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya, sudah begitu sering dikutip sehingga tidak lagi berpengaruh. Bobotnya, keparahan serta terus berlangsungnya pengabaian hak ini membuat orang menjadi pasrah, putus asa, dan mati rasa. Tanggapan yang membisu semacam ini diperparah lagi dengan keengganan untuk melihat persoalan ini sebagai pengingkaran besar-besaran atas hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun pada saat yang sama sulit untuk dipahami bagaimana keadaan ini dapat digambarkan secara realistis dengan cara lain.³

17. Lebih jauh, rendahnya nilai uang dari aset penduduk miskin yang hilang sering menjadi sebab tidak adanya perhatian pada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika aset tersebut dirusak. Misalnya, ketua delegasi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) untuk Timor-Leste pada tahun 1975, dalam penilaiannya mengenai dampak “perang saudara”, mengecilkan nilai kerusakan harta benda:

Tidak ada kerusakan material yang parah...Di wilayah pedalaman pulau ini, banyak desa yang dibakar, terutama di kawasan Maubisse, Ainaro, tetapi pembangunan kembali rumah gubuk tidak menjadi persoalan bagi penduduk setempat.⁴

18. Nilai uang gubuk-gubuk sederhana ini mungkin tidak besar, dan bahan-bahan untuk membangunnya kembali memang tersedia. Namun demikian, masalah mendasarnya adalah bahwa semakin sedikit milik seseorang, maka akan semakin besar dampak dari kehilangan rumah, harta benda, dan ternak. Perusakan dan perampasan harta benda penduduk miskin yang terjadi berulang-ulang — pertama-tama oleh Portugis, kemudian oleh partai-partai politik yang berseteru, selanjutnya oleh militer Indonesia, dan kemudian oleh milisi — membuat pemulihan berjalan lambat, dan sangat berat dari segi ekonomi maupun emosional. Orang-orang yang berada di pinggir jurang penyakit, kelaparan, dan ketidaktahuan karena kemiskinan yang parah adalah yang sangat memerlukan perlindungan untuk hak-hak ini. Memang tidak adanya pemantauan yang ketat pada hak-hak mereka itu sendiri merupakan indikasi dari diabaikannya kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat Timor-Leste.

7.9.2 Hak atas standar hidup yang memadai

³ Sementara maksud komentarnya jelas, kita perlu memahami konteksnya. Jelas dari laporan-laporan internal, notulensi rapat-rapat, dan catatan-catatan percakapan telepon (ada dalam arsip CAVR) bahwa utusan André Pasquier merasa yakin bahwa keadaan Timor-Leste pada akhir 1975 (sebelum invasi Indonesia) sangat dibesar-besarkan oleh badan-badan lain dan pers. Selanjutnya ia merasa bahwa “80% masalah gizi yang saat ini ada di Timor bukan karena akibat perang tetapi lebih merupakan akibat dari sistem ekonomi yang dijalankan Portugis.” Karena itu, komentar-komentar dalam laporannya banyak berupaya untuk mengecilkan dampak “perang saudara” dan perlunya bantuan dari luar.

19. Hak setiap orang atas standar kehidupan yang memadai meliputi hak untuk bebas dari kelaparan, mendapatkan akses ke sarana ekonomi untuk mempertahankan hidup, dan mempunyai pakaian serta tempat tinggal. Pada dasarnya ini berarti mengeluarkan warga dari kemiskinan dan menciptakan kondisi bagi mereka agar dapat menjalani hidup sesuai potensi mereka. Hak-hak ini, dan bagaimana pelanggarannya, di bahas di bawah.

Pembangunan dan pengeluaran pemerintah

20. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Indonesia sering menyebutkan investasinya yang besar dalam pembangunan Timor-Leste sebagai bukti niat baiknya kepada rakyat Timor-Leste. Memang benar bahwa Indonesia telah melakukan investasi di Timor-Leste lebih banyak daripada provinsi-provinsinya. Sebanyak Rp 1,3 milyar telah dialokasikan untuk pembangunan di wilayah ini antara 1976/1977 dan 1993/1994 (setara dengan US\$ 960 juta). Sebagai perbandingan, jumlah ini adalah 50% lebih banyak daripada yang dialokasikan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur yang bertetangga (lihat Tabel 1 & 2).

Table 1 - Alokasi Dana Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk Provinsi Timor Timur dan Beberapa Provinsi Terpilih, 1969/1970-1993/1994 (dalam Rp milyar)

	Repelita I (1969/70- 1973/74) (Rp milyar)	Repelita II (1974/75- 1978/79) (Rp milyar)	Repelita III (1979/80- 1983/84) (Rp milyar)	Repelita IV (1984/85- 1988/89) (Rp milyar)	Repelita V (1989/90- 1993/94) (Rp milyar)	Total (Rp milyar)	Total (US\$ jt) ^a
Timor Timur	...	66.692	139.385	257.822	826.312	1.290.481	960,2
Nusa Tenggara Timur	2.223	24.788	129.296	175.199	526.309	857.815	641,2
Nusa Tenggara Barat	1.728	22.826	111.765	151.629	332.782	620.730	494,7
Papua (Irian Jaya)	1.469	15.825	87.388	155.224	652.353	912.259	609,5

^a Konversi mata uang dihitung dengan nilai tukar rata-rata tahunan Rp:US\$ selama setiap periode lima tahunan dari masing-masing periode Repelita.

Sumber: Rui Gomes, *East Timor's Socio-Economic Development Under Indonesia, (1976-1998)*, Tesis Doktoral, London South Bank University, 2002, halaman 218.

Table 2 - Anggaran dan dana Instruksi Presiden (Inpres) yang dialokasikan untuk Provinsi Timor Timur, 1976/77-1992/93

	Proyek Sektoral (Rp juta)	Anggaran Rutin (Rp juta)	Anggaran Total (Rp juta) ^a	Anggaran khusus baris 16 (Rp juta)	Dana Inpres (Rp juta)	Proyek Sektoral (US\$ '000)	Anggaran Rutin (US\$ '000)
1976/77	232,8	1.475,6	1.708,4	...	552,0	561,0	3.555,7
1977/78	3.500,0	3.261,6	6.761,6	...	3.359,7	8.433,7	7.859,4
1978/79	4.333,5	3.134,5	7.468,0	...	3.997,0	8.824,1	6.382,6
1979/80	7.517,2	3.150,0	10.667,2	7.000,0	5.152,9	11.996,8	5.027,1
1980/81	12.415,7	6.954,4	19.370,1	6.000,0	9.087,5	19.801,8	11.091,5
1981/82	11.213,2	8.435,5	19.648,7	6.500,0	14.884,6	17.617,0	13.252,9

1982/83	28.220,9	8.846,8	37.067,7	angka tidak ada	19.113,9	41.864,6	13.123,9
1983/84	22.871,4	9.432,1	32.303,5	7.000,0	20.826,0	23.257,5	9.591,3
1984/85	23.694,8	20.015,1	43.709,8	8.135,6	22.940,8	22.577,2	19.071,0
1985/86	35.181,2	13.038,6	48.219,8	14.147,8	24.192,3	31.406,2	11.639,5
1986/87	25.555,6	13.071,3	38.626,9	7.512,7	22.735,2	18.116,8	9.266,5
1987/88	15.075,7	11.218,1	26.293,8	5.372,6	angka tidak ada	9.142,3	6.803,0
1988/89	14.285,8	11.516,3	25.802,1	6.379,7	angka tidak ada	8.371,4	6.748,5
1989/90	18.324,6	14.765,2	33.089,8	angka tidak ada	angka tidak ada	10.253,2	8.261,6
1990/91	25.641,3	17.037,4	42.678,7	angka tidak ada	angka tidak ada	13.720,0	9.116,3
1991/92	31.351,7	18.859,4	50.211,1	angka tidak ada	angka tidak ada	15.891,2	9.559,2
1992/93	40.093,4	18.932,6	59.026,0	angka tidak ada	angka tidak ada	19.674,8	9.290,7
Total	319.508,8	183.144,4	502.653,2	angka tidak ada	angka tidak ada	281.509,5	159.640,7

^a Dana anggaran negara tambahan disediakan atas instruksi Presiden dengan persetujuan oleh MPR

^b Tidak termasuk Baris 16 (Dana Khusus Timor Timur), yang datanya tidak lengkap.

Sumber: *ibid*

21. Investasi ini memang mengakibatkan pertumbuhan PDB yang pesat setelah operasi-operasi militer besar selesai dan suatu keadaan yang mendekati normal tercipta pada pertengahan 1980-an. Menurut data resmi, PDB tumbuh rata-rata sebesar 8,5% per tahun antara 1984 dan 1997, melampaui pertumbuhan PDB nasional Indonesia dan pertumbuhan PDB di provinsi manapun (lihat Tabel 5). Walaupun ada alasan teknis dan politis untuk meragukan kebenaran data tersebut,⁵ secara keseluruhan gambaran yang disajikan mengenai perekonomian Timor-Leste semasa pendudukan cukup meyakinkan. Pertumbuhan digerakkan oleh konstruksi, transportasi dan komunikasi, serta pelayanan pemerintah, semuanya adalah sektor yang berhubungan dengan konsolidasi pendudukan. Juga terjadi pertumbuhan pesat di sektor perdagangan dan manufaktur, walaupun secara keseluruhan pangsa keduanya rendah, khususnya manufaktur. Sementara sektor pertanian, yang mempekerjakan 84% penduduk pada tahun 1990,⁶ mencatat pertumbuhan terendah di antara sektor-sektor utama lainnya.

Table 3 - Pangsa sektoral PDB dan tingkat pertumbuhan 1984-1997 (%)

	Pangsa Sektoral			Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan 1984-1997
	1984	1993	1997	
Pertanian	44,5	29,8	33,7	5,4
Manufaktur	1,4	2,9	3,1	13,7
Konstruksi	11,4	21,0	18,1	12,7
Perdagangan	8,4	9,3	9,1	11,5
Transportasi & Komunikasi	5,4	8,6	9,7	14,9
Pelayanan Pemerintah	21,7	21,5	19,9	8,1
PDB	92,8	93,1	93,6	11,05

Sumber: *ibid*

22. Jelas bahwa dalam masa perang yang paling keras, antara 1975-1979, kegiatan pertanian hampir sepenuhnya lumpuh. Kemudian, pengekangan banyak penduduk di dalam kamp-kamp “pemukiman kembali”, yang di dalamnya mereka terus dibatasi sebagian bahkan sampai akhir dasawarsa 1980-an dan kebebasan bergerak serta kemampuan bertani mereka dibatasi dengan ketat, membuat pemulihan berlangsung sangat pelan (antara 1983 dan 1986 sektor ini tumbuh di bawah 1% per tahun).⁷ Produksi dua bahan pangan utama, jagung dan beras, sampai akhir dasawarsa 1980-an belum pulih ke tingkat produksi masa sebelum perang.⁸

23. Bahkan setelah keadaan sudah mulai kembali normal, kondisinya masih belum mendukung untuk pertumbuhan pertanian. Gangguan terhadap pola pemukiman tradisional penduduk pada tahun-tahun awal pendudukan memiliki dampak jangka panjang. Banyak penduduk yang terus dipaksa untuk tinggal di lahan yang lebih ditentukan oleh pertimbangan keamanan dan bukan karena kesuburannya. Perpindahan penduduk dan ketentuan hukum pertanahan yang baru mengakibatkan ketidakpastian hak atas tanah. Petani dihambat untuk berpindah dari pola pertanian untuk keperluan sendiri ke pola pertanian untuk menghasilkan uang oleh karena genggaman tangan besi militer dan mitra bisnisnya atas produksi komoditi (lihat kususnya bagian yang berjudul ‘Sektor kopi’, dibawah).

24. Yang tidak kalah penting, pertanian dirugikan karena tingkat investasi yang rendah. Kurang dari 10% investasi negara diarahkan ke sektor pertanian, sementara lebih dari 50% dicurahkan ke dua sektor utama, yaitu transportasi dan komunikasi serta sektor pemerintahan sipil (lihat Tabel 4). Lebih lagi, penerima manfaat utama dari investasi di sana kemungkinan adalah transmigran Indonesia dan sektor perkebunan.⁹

Table 4 - Struktur investasi negara per sektor 1984/85-1993/94 (%)

Sektor	% dari keseluruhan
Transportasi & Komunikasi	34
Pemerintahan Sipil	20
Pendidikan & Kepemudaan	11
Pertanian & Irigasi	9
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	5
Subsidi Daerah	5
Pembangunan Daerah	4
Informasi	2
Agama	2
Sumber Daya Alam & Pembangunan	2
Pertahanan	2
Industri	1
Lain-lain	3
Total	100

Sumber: *Gomes, mengutip KORPRI Timor Timur, Buku Dua Puluh Tahun Timor Timur Membangun, Dili, 1996, halaman 139.*

25. Sebagai akibat dari semua faktor ini, pangsa sektor pertanian dalam PDB cenderung menurun selama sebagian besar masa pendudukan. Penurunan yang demikian bukanlah suatu hal yang tidak biasa dalam perekonomian yang tumbuh pesat, tetapi dalam kasus Timor-Leste hal ini tidak diimbangi oleh perpindahan tenaga kerja pertanian ke sektor-sektor baru yang lebih dinamis. Sektor manufaktur memang tumbuh dalam periode yang sama (dari 1,3% menjadi 3,1%), akan tetapi pertumbuhan ini tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, di akhir masa pendudukan, hampir tiga per empat dari angkatan kerja tetap berada di pedesaan hidup dari pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam masa yang sama, jumlah pegawai pemerintah melonjak (dari hanya 780 pada tahun 1981 menjadi 33.602 pada tahun 1997).¹⁰ Bias ini tercermin pada tingkat pertumbuhan untuk Dili yang jauh melampaui distrik-distrik yang lain.¹¹ Karena dikucilkan dari sektor-sektor yang lebih dinamis dan dibatasi hanya

pada sektor-sektor yang pemerintah tidak ingin mengembangkannya, sebagian besar penduduk tidak memetik manfaat dari pertumbuhan ini.

26. Khususnya, pertanian yang tumbuh lamban dengan produktivitas rendah sama dengan kemiskinan: dalam dasawarsa 1990-an, 85% dari kepala keluarga yang tergolong paruh termiskin penduduk bekerja di sektor pertanian, sementara lebih dari 50% dari 20% penduduk yang terkaya bekerja di sektor pemerintah atau sektor formal.¹² Kemiskinan Timor-Leste tidak dapat disalahkan sepenuhnya pada kegagalan Portugis. Setelah menduduki Timor-Leste selama hampir 24 tahun, Indonesia meninggalkan suatu wilayah yang sangat miskin menurut ukuran Indonesia maupun dunia. (Lihat Table 5) Suatu perhitungan yang menggunakan indikator Timor-Leste untuk mendapatkan Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index) menunjukkan bahwa walaupun tumbuh pesat selama sebagian besar masa pendudukan, Timor-Leste pada tahun 1999 berada di urutan termiskin negara-negara di dunia. (Lihat Tabel 6)

Table 5 - Indikator Ekonomi Pemanding: Timor-Leste dan Indonesia

	PDB per kepala sebagai % dari rata-rata Indonesia	Pertumbuhan rata-tahunan, 1983-1996	Pangsa Sektoral dari PDB			Buta Huruf (%)	Tingkat Kematian Bayi ^a	Usia Harapan Hidup
			Pertan.	Manuf.	Pemerint.			
						1996	1996	1996
Timor-Leste	38,3	5,6	24,2	3,2	23,6	59,6 ^b	135,0	53,9
NTT	35,3	4,6	38,1	2,4	19,8	21,1	51,0	64,4
NTB	41,2	4,9	36,3	4,8	16,6	32,0	75,0	58,9
Maluku	67,1	4,6	26,1	18,0	10,6	6,8	47,0	65,4
Papua	167,7	4,8	18,1	4,1	6,9	32,6	51,0	64,5
Indonesia	100,0	5,1	15,4	24,7	8,8	14,7	44,0	66,0

^a Per 1.000 kelahiran hidup. ^b 2001

Sumber: BPS 1999; BPS dan UNDP, 1997; dan UNDP 2001

Table 6 - Timor-Leste: Indikator Pendapatan dan Kemiskinan 1990-1999

	1990	1995	1996	1999
Kemungkinan pada saat lahir untuk tidak mencapai usia 40 tahun (% dari keseluruhan)	22,7	28,5	41,1	35,6
Tingkat buta huruf orang dewasa (% , usia di atas 15)	59,8	54,7	59,6	59,6
Berat badan di bawah normal (%)	49,0	45,7
Penduduk yang tidak menggunakan sumber air yang baik (%)	50,5	44,7	47,4	46,9
Berat badan anak usia di bawah 5 tahun di bawah normal (%)	50,6	44,5
Penduduk yang tidak terjangkau pelayanan kesehatan (%)	20,3	31,1
Nilai Indeks Kemiskinan Manusia (Human Poverty Index) (HPI-1)	46,4	43,0	51,0	49,0
Penduduk di bawah garis kemiskinan nasional (%)	41,5	42,4

Sumber: Gomes, halaman 208, berdasarkan data UNDP dan BPS.

Sektor kopi

27. Kopi adalah sumber pendapatan pajak, devisa luar negeri, dan pendapatan dalam negeri terbesar di Timor-Leste sejak akhir abad ke-19. Saat ini kopi masih merupakan ekspor utama Timor-Leste (tahun 2001 bernilai sekitar US\$ 13 juta, 75% dari semua ekspor),¹³ dan sekitar 44.000 keluarga petani (atau 200.000 penduduk, 25% dari total penduduk) secara langsung tergantung pada kopi sebagai sumber pendapatan mereka.¹⁴

28. Diperkirakan bahwa Portugal membawa kopi ke Timor pada awal abad ke-19. Enam puluh tahun kemudian kopi berkembang menjadi ekspor terbesar Timor-Leste. Mulai tahun 1925, saat harga kopi tinggi dan hasil kayu cendana yang bernilai hancur karena terlalu banyak dipanen, kopi merupakan lebih dari 80% total ekspor Timor Portugis.* Produksi dan ekspor hasil perkebunan di masa pemerintahan Portugis dikuasai oleh satu perusahaan, yaitu *Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho* (SAPT). SAPT didirikan pada tahun 1900 oleh Gubernur saat itu, José Celestino Da Silva,[†] yang juga melancarkan perombakan masyarakat pedesaan Timor-Leste agar tanah dan tenaga kerja bisa dibebaskan untuk kepentingan perkebunan (*repopoamento*).¹⁵ Meskipun didirikan sebagai perusahaan swasta, SAPT beroperasi seperti perusahaan negara karena hubungannya dengan gubernur. Dengan menggunakan wewenang dan sumber daya negara, SAPT merampas tanah-tanah paling produktif di distrik Ermera untuk perkebunan kopi, dan melaksanakan program tanam paksa, yang diawasi oleh militer.[‡] Pemberontakan-pemberontakan menentang pajak kepala yang terjadi kemudian dihukum dengan kerja paksa di perkebunan-perkebunan kopi, dan siapa saja yang tidak bisa membayar pajak juga diharuskan menjalani kerja paksa.¹⁶

Manajemen sektor perkebunan kopi masa pemerintahan Indonesia

29. Negara Indonesia mengikuti pola yang telah ditanamkan oleh penguasa kolonial Portugis dengan memberikan tanggung jawab pengelolaan produksi dan perdagangan kopi di tangan perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah. Perusahaan-perusahaan ini mempunyai hubungan khusus dengan militer Indonesia, yang memberi mereka kontrol atas perdagangan kopi, dan selanjutnya kontrol atas sektor-sektor yang lain, dengan memberikan imbalan “dana di luar anggaran” untuk keperluan operasi militer dan pemerintah sipil. Sebagai bagian dari pengaturan ini, para petani kecil setempat pemilik kopi tidak bisa mendapatkan penghidupan yang memadai atau menikmati manfaat dari keuntungan besar yang didapat oleh perusahaan-perusahaan perdagangan tersebut, militer, perwira tinggi militer, dan pengusaha Indonesia. Bahkan yang lebih parah, dana dari kopi digunakan untuk membiayai operasi militer di Timor Leste dan represi terhadap penduduk setempat oleh militer.

30. Mayor Jenderal Benny Moerdani, yang sangat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi Indonesia di Timor-Leste sebelum dan sesudah invasi besar-besaran, awalnya sebagai kepala intelijen gabungan dan wakil kepala Bakin dan kemudian dari 1983 sampai 1988 sebagai panglima angkatan bersenjata, menjelaskan dalam sebuah wawancara eksklusif bagaimana ia menjalan kerja sama dengan pengusaha Indonesia, Robby Sumampouw.¹⁷ Moerdani mengingat bagaimana pada tanggal 11 Desember 1975 mereka berdua bertemu di sebuah klab malam di Jakarta untuk membicarakan kesepakatan bisnis dalam mana Robby Sumampouw akan memasok makanan dan perlengkapan untuk pasukan invasi

* Bahkan pada masa jayanya, kopi hanya memberikan sumbangan sekitar 10,2 juta *escudo* (US\$ 380.000 pada nilai tukar uang sekarang). Lebih jauh, harga kopi, seperti juga kebanyakan komoditi kawasan tropis, tidak stabil. Pendapatan dari kopi selalu tidak mencukupi untuk mendanai pemerintah, tetapi merupakan sumber utama pendapatan setempat untuk membiayai wilayah Portugis yang anggaran dananya sangat sedikit. Helio A Estevas Felgas, *Timor Português*, Agência Geral do Ultramar, Lisbon, 1956, dikutip dalam João Saldanha, 1994, halaman 65.

† Da Silva juga tokoh yang berbeda karena berbagai alasan. Ia memadamkan Pemberontakan Dom Boaventura tahun 1911-1912 dan kemudian berupaya menegakkan kekuasaan Portugis dengan merombak struktur-struktur politik lokal. Salah satu inovasinya adalah menciptakan jabatan *chefe de suco*, yang dengan demikian merusak kekuasaan tradisional liurai (kecuali yang setia kepada negara Portugis). Salah satu yang diuntungkan dari perombakan ini adalah perusahaan-perusahaan perkebunan, yang mendapatkan kontrol efektif atas tanah-tanah yang luas.

‡ SAPT kemudian juga mendirikan anak perusahaan yang mengelola perkebunan coklat dan karet. SAPT, *Business Plan*, Dili, Agustus 2000, halaman 1.

dengan imbalan hak untuk menjual kopi yang ketika itu disimpan di Dili. Militer Indonesia menduga bisa cepat memenangkan perang di Timor Leste, dan tidak membuat perencanaan atau anggaran untuk perang yang berkepanjangan:

Ini adalah operasi yang sangat mahal. Seluruh operasi Timor direncanakan dalam waktu kurang dari satu tahun. Dan Anda tahu sistem anggaran kami. Kami harus merencanakan lima tahun sebelumnya. Jadi kalau kami memulai sesuatu di tengah-tengah Repelita [Rencana Pembangunan Lima Tahun], tidak akan ada uang untuk mendanainya. ABRI berusaha mencari dana dari mana saja. Saya kira orang Barat tidak akan bisa memahami. Jika Anda menceritakan hal ini kepada Sekolah Staf Amerika Serikat, mereka tidak akan mengerti; Sekolah Staf Australia, mereka tidak akan mengerti. Bagaimana bisa memulai suatu operasi tanpa uang? Tetapi kita bisa. Karena kita harus melakukannya.¹⁸

31. Menurut Moerdani, Sumampouw menawarkan untuk mendatangkan peralatan bagi pasukan senilai US\$ 1 juta — meliputi makanan, ban, sepeda motor, dan mobil Land Rover. Moerdani ingat percakapan tersebut seperti ini:

Saya bilang: "Saya tidak punya satu juta dolar untuk membayar kamu." Tidak, mereka [Sumampouw dan rekan-rekan usahanya] tidak keberatan. [Mereka jawab] "Kami tahu di Timor Timur ada banyak kopi, mungkin 5.000-6.000 ton... Baik, kami kirim satu kapal penuh perlengkapan dan barang-barang lain sebelum Natal. Dan setelah kami turunkan muatannya, kami memuat kopi sebanyak mungkin. Dan kami berlayar ke Singapura untuk menjualnya... Jika hasil penjualan lebih dari US\$ 1 juta, kami hanya akan mengambil satu juta dolar pembayaran semua barang tersebut. Jika kurang dari satu juta dolar, Anda tidak perlu membayar lagi." Saya bilang: "Sangat dermawan! Bagaimana saya bisa membalas kebaikan ini?" "Tidak, kami hanya ingin berbuat sesuatu untuk membantu pemerintah." Saya bilang baik. Jadi begitulah awalnya.¹⁹

32. Jadi, kesepakatan untuk membangun sebuah usaha terbesar di Timor-Leste telah disepakati di Jakarta, hanya empat hari setelah invasi Indonesia terhadap Dili.

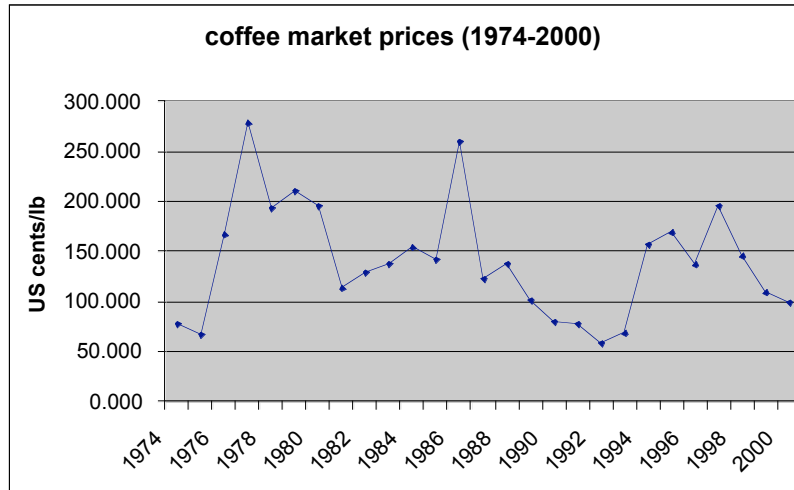
33. Setelah barang-barang tersebut tiba di Dili, Moerdani mengenalkan Sumampouw kepada Kolonel Dading Kalbuadi, yang waktu itu menjabat sebagai Asisten Intelijen Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) Timor Timur dan Arnaldo dos Reis Araújo, Gubernur Timor Timur yang diangkat oleh penguasa Indonesia. Kedua orang tersebut setuju untuk memberikan kontrak selama 20 tahun kepada Sumampouw untuk membeli kopi Timor-Leste dan menjualnya ke luar negeri. Sebagai imbalan, Sumampouw akan menyediakan perbekalan militer secara berkelanjutan.²⁰ Sumampouw dan saudaranya Hendro mendirikan PT Denok Hernandes Internasional Indonesia sebagai pembeli dan pengespor tunggal kopi Timor-Leste.

¹⁸ Wawancara CAVR, antara lain, dengan mantan Gubernur Timor Timur, Mário Carrascalão, membenarkan bahwa ini adalah pandangan ABRI. Banyak sumber menyebutkan bahwa Indonesia menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa pasukan tentaranya akan "makan pagi di Dili, makan siang di Baucau, dan makan malam di Lospalos", dan selanjutnya ketika menyusut harapan mereka untuk mendapatkan kemenangan cepat muncul kata-kata lain yang tidak seoptimis yang pertama itu.

Nilai sektor kopi

34. Di masa pendudukan Indonesia, kopi lebih menguntungkan dibanding masa Portugis. Untuk sebagian besar masa pendudukan harga kopi cukup tinggi (terutama tahun 1977 dan 1986) dan produksi kopi meningkat menjadi lebih dari 13.000 ton. Kesepakatan itu tampaknya sangat menguntungkan Sumampouw dan jenderal-jenderal ABRI. Pengapalan perbekalan militer dari Sumampouw tiba tanggal 23 Desember 1975. Pada tahun 1976, harga kopi melambung dan mencapai nilai tertinggi (lihat Bagan 1 dan Tabel 7).

Table 7 - Bagan 1: Harga pasar kopi (1974-2000)



Sumber: www.imfstatistics.org

35. Komisi hanya berhasil mendapatkan sumber-sumber yang menyebutkan penjualan dua pengapalan kopi, yang pertama 500 ton dan kedua 800 ton, dengan nilai jual di Singapura seluruhnya sebesar US\$ 3,1 juta (US\$ 1,27/lb)²¹. Tidak diketahui kapan sisa kopi yang tersimpan di gudang di Dili dijual dan berapa harga jualnya, dan apakah keuntungannya masuk ke kantong Robby Sumampouw atau ABRI di Timor-Leste atau keduanya. Namun demikian menurut ingatan Moerdani mengenai kesepakatannya dengan Sumampouw, sejak pertengahan 1976, penjualan sebagian cadangan kopi Timor-Leste itu mendatangkan dana sebesar US\$ 2,1 juta yang digunakan untuk mendanai operasi ABRI saat melakukan operasi ke pedalaman Timor-Leste (lihat Bagian 3: Sejarah Konflik, bagian berjudul Operasi Seroja, 1976-1979). Jika Sumampouw bersaudara menjual cadangan yang tersisa dengan harga yang sama dengan penjualan yang pertama, maka keuntungan totalnya mencapai US\$ 14 juta .

36. Memperkirakan dengan tepat keuntungan dari penjualan kopi adalah suatu perhitungan yang rumit karena beberapa faktor, antara lain: harga kopi yang naik turun di pasar internasional, perbedaan harga yang dibayarkan kepada petani dan harga indikator internasional, tidak adanya catatan yang sistematis tentang harga petani di Timor-Leste dan Timor Barat, dan fluktuasi mata uang. Karena itu, data yang dikutip di sini tentang harga yang dibayarkan kepada petani di Timor-Leste dan perbandingannya dengan harga di Timor Barat (lihat Tabel 7, berikut) hanya merupakan petunjuk.

37. Pada tahun 1977 harga kopi di pasar internasional mencapai tingkat tertinggi (lihat Bagan 1 dan Tabel 7). PT Denok berada dalam posisi tepat untuk memanfaatkan naiknya harga kopi di pasar internasional. Ketika harga kopi turun lagi pada tahun 1978-1979, posisi

²¹ Statistik IMF mengutip harga pasar kopi tahun 1976 sebesar US\$ 1,67/lb.

Sumampouw sudah kuat sehingga bisa memperluas jaringan usahanya di Timor-Leste ke sektor-sektor lain yang menguntungkan. Ketika monopoli kopi PT Denok akhirnya dipatahkan, pada tahun 1992 setelah Pembantaian Santa Cruz, atas tekanan dari para Senator Amerika Serikat, Moerdani sudah bukan lagi panglima angkatan bersenjata dan harga kopi jatuh ke tingkat yang paling rendah dalam waktu 30 tahun. Karena itu akhir dari monopoli ini merupakan suatu konsesi yang relatif murah kepada masyarakat internasional, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah mengambil keuntungan dari perdagangan kopi untuk sejak itu berkonsentrasi pada memonopoli yang lebih menguntungkan di bidang konstruksi dan impor-ekspor.²²

38. Petani kopi Timor tidak pernah menikmati keuntungan yang didapat Sumampouw dan para jenderal ABRI. Setiap tahun pemerintah setempat mengeluarkan peraturan yang menentukan harga yang harus dibayarkan kepada petani.* Pada tahun 1983 harga ini hanya seperenam dari harga yang dibayarkan di Timor Barat, sehingga petani Timor-Leste merugi \$2,50 untuk setiap kilogram.† Ini berarti bahwa tahun 1983, bahkan pada saat harga pasar internasional tidak terlalu tinggi, PT Denok mendapatkan keuntungan sebesar US\$ 18 juta dari pembelian kopi dari petani dengan harga rendah.

Table 8 - Harga kopi dan produksi 1975-93

Tahun	Produksi (ton)	Harga yang dibayar ke petani (Rp/kg)	Indikator Harga Pasar Internasional (Rp/kg)	Sumber Harga Timor-Leste
1975	4.585	angka tidak tersedia	621	Tidak ada catatan harga, meski sebagian sumber melaporkan bahwa kopi ditukar dengan beras pada awal invasi.
1976	2.510	angka tidak tersedia	1.525	...harga tidak tersedia
1977	5.597	angka tidak tersedia	2.538	...harga tidak tersedia
1978	3.547	angka tidak tersedia	1.887	...harga tidak tersedia
1979	2.968	angka tidak tersedia	2.892	...harga tidak tersedia
1980	4.600	100 – 300	2.704	Wawancara CAVR, Idelfonso (petani kopi Fatubessi dan mantan pegawai PT Salazar); Chung Ki Seng (alias Asengko, pedagang kopi).
1981	8.999	150 – 350	1.571	Berkas ACFOA, 9 Maret 1982, wawancara konfidensial dengan mantan sopir PT Denok di Ermera dan Dili sampai Desember 1981. Juga melaporkan bahwa tentara menjual dengan harga Rp 1.500/kg.
1982	8.009	375	1.892	Delegasi Senat Australia, 1983 halaman 175.
1983	7.240	500	2.761	Delegasi Senat Australia, 1983 halaman 175, 184.
1984	6.091	angka tidak tersedia	3.476	...harga tidak tersedia
1985	8.275	500	3.469	Wawancara CAVR, Idelfonso
1986	9.572	n/a	7.336	...harga tidak tersedia
1987	9.448	800 – 1.500	4.448	Wawancara CAVR, Arcanjo da Silva (Proyek Rehabilitasi Kopi 1987-1992).

* Gubernur mengeluarkan surat keputusan mengenai tata niaga kopi. Surat keputusan terakhir dikeluarkan pada tahun 1993 ketika monopoli dihapuskan. Wawancara CAVR dengan Sam Filliaci, Yogyakarta, Indonesia, 9 Juli 2004.

† Satu delegasi Senat Australia ke Timor-Leste diberi tahu bahwa PT Denok membayar petani produsen kopi Rp 500/kg, (atau US\$ 50 sen) ketika harga pasar dunia mencapai Rp 3000/kg. "Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia July-August 1983, Australia," halaman 175 dan 184.

				Juga melaporkan bahwa harga dasar petani di Denpasar dan Sulawesi adalah Rp 7.000/kg.
1988	9.428	1.200-1.500	5.119	Tempo, 9/3/1988, halaman 33. Juga melaporkan bahwa harga grosir di Atambua ialah Rp 4.000/kg.
1989	7.497	2.000	3.972	Wawancara CAVR dengan Manuel Babo (petani kopi di Aifu, Ermera). Juga melaporkan bahwa harga di Atambua Rp 6.000/kg belum dikurangi pajak dan uang suap.
1990	7.348	4.000	3.243	Wawancara CAVR, Idelfonso
1991	10.508	1.100-1.200	3.346	Mubyarto, et al., East Timor: The Impact of Integration
1992	13.288	angka tidak tersedia	2.635	...harga tidak tersedia
1993	7.734	800-1.100	3.122	Wawancara CAVR, Sam Filliaci (mantan direktur NCBA, Dili)

Sumber data produksi: 1975-1980 Saldanha; 1983 Soesastro; 1981-1982, 1984-1993 Timor Timur dalam Angka. Sumber harga pasar internasional: www.imfstatistics.org

39. Komisi menerima berbagai laporan mengenai adanya campur tangan militer Indonesia dalam produksi dan perdagangan kopi untuk melindungi posisi istimewa PT Denok. Petani melaporkan bahwa prajurit bersenjata menjaga kopi, dan bahwa kendaraan militer sering digunakan untuk mengangkut kopi. Pengangkutan kopi (di atas beberapa kilogram untuk keperluan pribadi) selain oleh PT Denok dilarang keras, dan bisa dihukum dengan penyitaan atau bahkan hukuman penjara. Beberapa pedagang lepas orang Cina masih bisa tetap beroperasi. Sebagian beroperasi sebagai pembeli lokal untuk PT Denok; yang lainnya tidak mempunyai izin tetapi menyuap agar bisa pergi ke Atambua untuk menjual kopi dengan harga lebih tinggi.²³

40. Walaupun pada awalnya tentara membutuhkan bantuan Sumampouw untuk menyediakan perbekalan untuk operasi-operasinya, pada tahun-tahun belakangan pangsa keuntungan militer dari penjualan kopi PT Denok dipergunakan terutama untuk memperkaya sejumlah kecil pejabat tertinggi. Mantan gubernur Mário Carrascalão, menceritakan bagaimana keuntungan PT Denok dialihkan:

Ada yang namanya itu "Dana Fee Kopi". Kopi itu dibeli dari rakyat dengan harga Rp 150, Rp 200, Rp 300 [tiap kilogram]. Ada satu "fee" yang diberikan kepada Muspida Tingkat I, II, kepada Tripika...ada dana sekitar Rp 3 milyar [dari "fee" ini] untuk Muspida Tingkat I agar saya bisa mengijinkan pembagiannya kepada Gubernur, Danrem, Jaksa Tinggi.²⁴

41. PT Denok adalah anak perusahaan Batara Indra Group yang mencakup sepuluh anak perusahaan monopoli lainnya, termasuk PT Salazar (yang oleh gubernur, Mário Viegas Carrascalão diberi hak kepemilikan 11.000 ha perkebunan kopi yang diambil alih dari SAPT), PT Scent Indonesia (pembeli dan eksportir tunggal kayu cendana), PT Watu Besi Raya (kontraktor tunggal untuk konstruksi bangunan), dan PT Marmer (pemegang tunggal hak tambang marmer).²⁵ Karena besarnya dana yang dialokasikan ke Timor-Leste untuk pembangunan infrastruktur, monopoli atas kontrak-kontrak ini pasti sangat menarik. Oleh sebab itu PT Denok

²³ Pengambil alihan tanah luas untuk perkebunan kopi membuat PT Denok mendapatkan kontrol atas pembelian dan penjualan produk ini, meskipun 60% kopi tetap berasal dari petani kecil. Koperasi yang dibentuk oleh negara, KUD (Koperasi Unit Desa), resminya menjadi pembeli, yang selanjutnya memasok PT Denok, eksportir tunggal kacang hijau. Namun demikian, wawancara-wawancara menunjukkan bahwa koperasi ini nyatanya hanya berfungsi memberi cap pengesahan penjualan dari petani, dan PT Denok sesungguhnya membeli kopi secara langsung atau melalui pedagang lepas.

juga mendirikan PT Gunung Kijang dan Bakti Timur Karya (BTK) untuk bergerak dibidang konstruksi bangunan. Pada jaman Indonesia, kedua perusahaan tersebut memonopoli banyak proyek konstruksi dan saat ini kembali melakukan bisnis di Timor-Leste. Perusahaan-perusahaan monopoli memunculkan kepentingan ekonomi yang kuat untuk mempertahankan kontrol militer di Timor-Leste.

Keterlibatan militer dalam perekonomian Timor-Leste

42. Bisnis militer Indonesia bukanlah sesuatu yang hanya terjadi di Timor-Leste — pengumpulan “dana” dan pemberian izin oleh militer untuk hak eksklusif atas pengambilan sumber daya merupakan bagian dari korupsi luas yang menjadi ciri pemerintah Soeharto. “Dwifungsi” militer dalam pemerintahan dan pertahanan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrol otoriter pemerintah Orde Baru dan karena itu memberi peluang luas bagi militer untuk mengembangkan bisnis.²⁶

43. Namun demikian, tingkat penguasaan militer di Timor-Leste selama pendudukan sangat tidak lazim bahkan untuk ukuran pemerintah Orde Baru (lihat Bagian 4: Rezim Pendudukan). Militer menduduki jabatan penting dalam pemerintah sipil, terutama pada tahun-tahun awal pendudukan, dan ini memberi militer kontrol atas kegiatan ekonomi dan komersial di Timor-Leste dan kekuasaan untuk melindungi bisnis-bisnis yang berkaitan dengan militer dan jaringan perlingkungannya (lihat 4.2: Pemerintah Sipil):

Kepala dan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menduduki posisi strategis dari mana mereka bisa mengendalikan pemanfaatan sumber daya dan menjamin agar hasil dari proyek-proyek dibagikan “secara merata” kepada para pejabat militer, pejabat sipil, dan perusahaan-perusahaan di Timor-Leste dan Jakarta. Menurut peraturan, semua proyek bernilai di atas Rp 500 juta harus diberikan kepada perusahaan di Jawa karena perusahaan Timor-Leste tidak bisa menyediakan modal awal yang diperlukan. Bappeda mempunyai wewenang mengalokasikan proyek-proyek ini.²⁷

44. Sementara hukum perang internasional mengizinkan penguasa pendudukan untuk menguasai atau memanfaatkan sumber daya setempat untuk mendanai pendudukan, perampokan yang dikontrol oleh militer terhadap komoditi Timor-Leste yang paling menguntungkan itu hanya memperkaya para pejabat militer dan sipil yang menduduki jabatan yang mempunyai wewenang untuk melindungi investasi semacam ini. Karena luasnya jaringan perlindungan ini di wilayah pendudukan, maka tidak mungkin kalau kontrol militer atas pengelolaan perekonomian dan sumber daya Timor-Leste hanya diperlukan untuk membiayai pendudukan.

Hak rakyat untuk menggunakan sumber daya alam

45. Selain mengontrol kopi, militer juga terlibat dalam perampasan sumber daya alam lain yang berharga di Timor-Leste termasuk kayu cendana, hutan, dan minyak.

Kayu Cendana

46. Kayu cendana wangi Timor-Leste yang sangat berharga adalah komoditi yang awalnya menarik perhatian para pedagang dan pemerintah-pemerintah Eropa yang membiayai mereka pada awal abad ke-16, dan berperan sentral dalam penyusunan kekuasaan di negara jajahan ini dan antara kekuatan Portugis, Belanda, dan Inggris yang bersaing untuk menguasai kasawan ini.

Portugal menebang pohon cendana tanpa henti, akar dan semuanya, dan produksi jatuh dari hampir 900 ton pada tahun 1910 menjadi 20 ton pada tahun 1926, ketika ekspor kayu cendana secara resmi dilarang untuk memberi kesempatan cendana agar tumbuh kembali.²⁸

47. Setelah invasi Indonesia kayu cendana kembali dipanen pada tingkat yang membuatnya terancam punah, baik langsung oleh militer atau atas perintah mereka. Penelitian Komisi menemukan kasus-kasus personil militer memerintahkan penduduk setempat untuk menebang pohon cendana semua ukuran, termasuk mengambil akar-akarnya.²⁹ Baik ditebang oleh atau untuk militer, kayu cendana dijual terutama melalui pedagang-pedagang lepas pada tahun-tahun awal invasi. Pada bulan Oktober 1979 penebangan kayu cendana diresmikan dengan memberikan hak ekspor eksklusif kepada anak perusahaan Batara Indra Group milik Robby Sumampouw, PT Scent Indonesia. Pada tahun 1982, 240 ton kayu dan minyak cendana diekspor, meningkat menjadi 328 ton pada tahun 1986. Namun demikian, karena pohon kayu cendana semakin jarang maka panen semakin menurun, sampai mencapai titik terendah yaitu kurang dari 150 ton pada tahun 1988, kurang dari 60 ton pada tahun 1990 dan 11 ton pada tahun 1991.³⁰

Hutan

48. Ciri khas pengalaman Timor-Leste, mencakup iklim yang keras dan tidak menentu serta gelombang kekerasan dan kekacauan yang kerap terjadi, membuat hutan mempunyai nilai khusus, baik sebagai sumber bahan makanan pada masa paceklik atau sebagai tempat berlindung pada saat terjadi kekacauan. Kayu juga merupakan sumber bahan bakar utama dan tanaman hutan digunakan untuk bahan obat tradisional.³¹ Pada tahun 1999 Panel Antar-Pemerintah PBB bidang Perhutanan menyusun sebuah konsep rasio hutan per kapita untuk menarik perhatian dunia pada pentingnya peran hutan bagi masyarakat agraris. Suatu masyarakat dengan rasio 0,01 ha per orang dianggap sebagai penduduk berisiko karena warganya tidak bisa memanfaatkan hutan untuk menopang kehidupan mereka. Para peneliti menemukan bahwa pada tahun 1999 sebagian besar wilayah Timor-Leste berada pada ambang risiko tinggi.³²

49. Besarnya penebangan hutan selama pendudukan Indonesia dapat dibuktikan dengan analisis dua foto satelit independen, yang menunjukkan kemerosotan tajam hutan selama masa pendudukan, terutama di distrik-distrik bagian barat. Penggundulan hutan terbesar, yang di beberapa tempat mencapai 96%, terjadi di Oecusse, Dili, Bobonaro, Liquiça, Ermera, Lautém, Manatuto dan Covalima. Data ini tidak memberikan penjelasan mengenai sebab hilangnya hutan, tetapi faktor utamanya kemungkinan adalah:

²⁸George Bouma dan Helena Koryn, "Changes in Vegetation Cover in East Timor (1989-1999)" *Natural Resources Forum*, vol. 28, 2004, halaman 1-12; Lars Erikstad, Vegar Bakkestuen, dan Odd Terje Sandlund, "Deforestation in East Timor since 1972 as indicated by LANDSAT imagery," Lampiran 6 pada Sandlund et al, 2001. Penyempitan areal hutan antara tahun 1972 dan 1999, yang diukur dengan penginderaan jarak jauh, juga dipertegas oleh Erikstad et al. Tetapi, liputan tumbuh-tumbuhan tidak dibagi menjadi hutan lebat, hutan, dan padang, seperti dalam penelitian Bouma dan Koryn.

- Meningkatnya tekanan terhadap lahan hutan karena berbagai sebab, termasuk penebangan untuk keperluan pertanian dan kayu bakar serta untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk karena pertumbuhan alami dan karena masuknya pendatang, baik sebagai transmigran atau pemindahan paksa penduduk ke desa-desa “binaan” sepanjang perbatasan karena alasan “keamanan”.³³
- Penebangan kayu komersial (termasuk kayu Jati, kayu Hitam, kayu Cendana), baik yang mendapat izin maupun tidak, untuk diangkut melintasi perbatasan. Seperti juga di Indonesia, karena penggunaan alat-alat berat untuk menebang kayu dan pengangkutan kayu mudah diawasi, maka penebangan liar tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang tidak mungkin terjadi.
- Dalam skala yang lebih kecil, penebangan hutan untuk pembukaan perkebunan-perkebunan baru;
- Penggunaan napalm oleh militer pada dasawarsa 1970-an.

50. Hilangnya hutan membatasi kemampuan masyarakat di desa-desa untuk dapat hidup sejahtera, antara lain dengan:

- Hilangnya akses pada hasil hutan seperti kayu bakar, sayuran, makanan ternak, dan tanaman obat-obatan
- Penurunan kualitas tanah, yang mengakibatkan penurunan kesuburan
- Penurunan stabilitas tanah, dengan peningkatan erosi dan kemungkinan tanah longsor pada lereng-lereng yang curam
- Pemadatan tanah dan hilangnya kapasitas tanah untuk menahan air, yang mengakibatkan berkurangnya air tanah dan ketersediaan air, dan meningkatnya kemungkinan banjir
- Hilangnya kesempatan untuk mendapatkan nafkah dari penebangan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan untuk keperluan komersial.

51. Komisi tidak menemukan adanya tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi hutan di Timor-Leste dari penebangan ilegal atau eksploitasi yang tidak berkelanjutan.

Laut Timor

52. Kekayaan ekonomi paling utama di Timor-Leste adalah celah lautan antara Timor dan Australia yang mempunyai kandungan minyak yang kaya. Belum dieksplorasi sampai awal dasawarsa 1970-an, sumber alam ini akan memberikan sumbangan besar pada perekonomian Timor-Leste.[†] Tetapi kandungan minyak dan gas alam yang kaya di Laut Timor memainkan peranan utama dalam perjuangan untuk kedaulatan Timor-Leste. Posisi Australia dan Portugal tentang hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri dan tentang pendudukan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi mereka di Laut Timor (lihat Bab 7.1: Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri). Ladang minyak dan gas alam di Laut Timor disebutkan disini karena menggambarkan bagaimana kepentingan ekonomi dalam pemanfaatan sumber alam yang berharga ini mempengaruhi sikap pelaku-pelaku internasional mengenai hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri dan kondisi ekonomi rakyat Timor-Leste serta kemampuan mereka untuk menghidupi diri.

[†] Luas perkebunan bertambah dari 3% menjadi 5% antara tahun 1989 dan 1999, dan luas hutan/kopi meningkat dari 6% menjadi 7%.

[†] Meskipun tidak ada eksplorasi sampai awal dasawarsa 1970-an, potensi minyak ini merupakan pendorong dilakukannya perundingan perbatasan antara Australia dan Portugal pada tahun 1953. J.R.V. Prescott, “The Australian-Indonesian Continental Shelf Agreements,” *Australia’s Neighbors*, vol. 82 (September-Oktober 1972), halaman 1-2, dikutip dalam Jolliffe, halaman 58.

53. Perjanjian 1989 antara Australia dan Indonesia membagi Laut Timor ke dalam zona-zona ekonomi eksklusif milik Indonesia dan Australia serta satu Wilayah Pengembangan Minyak Bersama. Perjanjian ini juga menetapkan bahwa produksi ladang-ladang tersebut dibagi dua antara Australia dan Indonesia dengan pembagian yang secara tidak lazim menguntungkan Australia. Pertimbangan politik hampir pasti telah mempengaruhi isi kesepakatan ini: Australia memetik keuntungan karena menjadi salah satu dari sedikit negara yang memberikan pengakuan *de jure* pada pencaplokan Timor-Leste oleh Indonesia.

Hak untuk mendapatkan makanan

54. Semua orang memiliki hak mendasar untuk hidup bebas dari lapar. Dalam mewujudkan hak ini, negara memiliki kewajiban minimum untuk menjamin bahwa semua orang punya akses ke bahan makanan pokok. Kewajiban ini mencakup langkah-langkah untuk:

Memperbaiki metode-metode produksi, pengawetan, dan distribusi makanan...[antara lain] dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem-sistem pertanian sedemikian rupa sehingga bisa mencapai perkembangan dan penggunaan sumber daya alam yang paling efisien. (KIHSEB, Pasal 11(2)(a))

55. Kemiskinan yang luas dan faktor iklim membuat bercocok-tanam bahan makanan selalu sulit di wilayah ini. Kemarau El Niño yang berkala adalah sebuah kenyataan hidup dan kekurangan makanan musiman (yang biasanya berlangsung selama 2-3 bulan dalam setahun) merupakan hal rutin yang menyebabkan orang-orang hidup di ambang batas kekurangan gizi. Di awal dasawarsa 1970-an, populasi manusia dan hewan ternak telah memberi tekanan berat terhadap lahan di beberapa daerah. Namun, betapapun rentan keberadaan mereka, penduduk setempat telah mengembangkan cara-cara untuk meringankan risiko dan melalui periode-periode paceklik ini.³⁴ Bahkan setelah terganggunya pasokan bahan makanan menyusul terjadinya “perang saudara”, ketua delegasi ICRC untuk Timor-Leste dengan tegas menyangkal adanya kelaparan di kawasan ini. Ia menggolongkan keadaan setelah terjadinya “perang saudara” ini sebagai “ketegangan pangan”, bukan kelaparan, dikarenakan adanya embargo terhadap pengiriman pasokan (khususnya bahan makanan dan bahan bakar minyak) dan kondisi kemiskinan serta kesehatan yang buruk yang sudah ada sebelumnya.

56. Seperti tampak dalam Tabel 4 di atas, hanya 9% dari investasi negara yang masuk ke sektor pertanian pada periode 1984/85-1993/94, suatu angka yang rendah mengingat sangat besar penduduk sumber penghidupannya ada pada pertanian. Pada periode yang sama pangsa pertanian dalam PDB merosot dari 44,2% menjadi 29,8% (lihat Tabel 5). Seperti sudah dibahas sebelumnya (lihat di atas), menurunnya pangsa pertanian dalam PDB bisa jadi merupakan suatu tanda perubahan ekonomi yang sehat. Namun dalam konteks Timor-Leste, dimana pertanian tetap merupakan sumber lapangan kerja yang utama, produktivitas luar biasa rendah, dan dampak dari pertumbuhan PDB terhadap lapangan kerja di sektor-sektor lain itu minimal, maka ini bukan merupakan tanda perubahan ekonomi yang sehat.

57. Dari seluruh tanah yang bisa diolah hanya 10% yang dimanfaatkan untuk pertanian, terutama karena adanya kebijakan keamanan yang membatasi pergerakan penduduk maupun konflik seputar kepemilikan tanah (dibahas di bawah). Penerima manfaat utama dari investasi di bidang pertanian adalah para transmigran Indonesia, bukan penduduk pribumi.³⁵ Investasi yang ditujukan bagi para petani Timor-Leste tidak efisien. Sarana irigasi yang dibangun oleh Indonesia,

³⁴ Perwakilan Oxfam Adrian Harris menyatakan dalam korespondensi bulan Oktober 1975 dari Community Aid Abroad Australia kepada Oxfam, England, bahwa Indonesia telah memblokir perbatasan sebagai taktik yang disengaja untuk menimbulkan kekacauan yang dijadikan sebagai pembenaran untuk intervensi. Submisi kepada CAVR dari Community Aid Abroad, Kantor Nasional, Melbourne, Australia.

misalnya, bersifat “sangat sementara dan tidak efektif”.³⁶ Karena kurangnya petugas penyuluhan, keterampilan-keterampilan teknis tidak bisa ditularkan. Pengenalan masukan-masukan, seperti pupuk, yang seharusnya bisa menaikkan produktivitas, berjalan tak teratur.³⁷ Akibatnya tingkat kemiskinan dan kekurangan gizi yang sangat parah dijumpai di kawasan pedesaan.³⁸

58. Selain kegagalan Indonesia dalam hal ini, dampak pendudukan Indonesia pada pertanian subsisten yang paling parah ditimbulkan oleh langkah-langkah keamanan yang langsung menyebabkan kelaparan yang parah dan kematian ribuan orang. Penting ditegaskan kembali hal yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya Laporan ini (lihat Bab 7.3: Pemandangan Paksa dan Kelaparan) bahwa sebelum invasi Indonesia, betapapun buruknya situasi kesehatan dan kemiskinan setelah berabad-abad ditelantarkan oleh Portugis, tidak pernah ada laporan tentang kelaparan pada tingkat yang pernah terjadi di masa pendudukan, walaupun penduduk telah beberapa kali mengalami kekurangan pangan yang parah pada tahun-tahun 1964 dan 1970. Setelah invasi Indonesia, pemindahan orang dalam skala luas, berulang-ulang, dan dalam waktu lama serta pembatasan pertanian, yang merupakan taktik yang disengaja dan sekaligus akibat sampingan dari pendudukan Indonesia, secara berat mengacaukan pertanian dan manajemen lahan yang telah mapan.

59. Satu orang menceritakan kepada Komisi tentang kondisi di Iliomar setelah ia dan teman-temannya sedesa dikurung di ibu kota subdistrik (*posto*) setelah menyerahkan diri:

Karena perintah-perintah dari TNI ini, orang-orang tidak bisa bergerak sama sekali. Karena dilarang keras pergi keluar kamp untuk mencari makanan, orang-orang mulai mengalami kelaparan luar biasa di posto Iliomar. Kami baru saja turun dari Matebian, jadi kami tidak punya makanan dan tidak mendapat kesempatan untuk mengolah sawah. Sehingga tidak ada makanan sama sekali di posto. Untuk bertahan hidup, setiap orang mulai memakan buah kelapa yang ada di sekitar kamp — kelapa yang muda, tapi juga yang sudah tua dan kering, bahkan juga memakan kelapa yang masih sangat muda dan belum matang.

Setelah beberapa waktu, karena ribuan orang memakan buah kelapa, maka pohon-pohon kelapa itu serentak berhenti berbuah. Kemudian kami mulai memakan akar-akaran dan daun-daunan dari pohon-pohon liar, dan banyak orang jatuh sakit. Setiap hari 2-3 orang mati karena lapar, kadang-kadang 40-50 orang mati dalam satu minggu saja. Untuk bertahan hidup, orang-orang memakan jenis makanan yang biasa dimakan babi. Mereka menebang pohon pisang, mengupas lapisan luarnya dan memasak bagian dalamnya. Ini menyebabkan banyak orang menjadi sakit kolera dan beri-beri. Setelah memakan bagian dalam batang pisang, sekitar 5-10 orang mati setiap hari. Jadi, saya kira lebih dari 200 orang mati karena kelaparan pada periode itu, karena setiap hari kami bisa mendengar orang-orang saling berbicara mengatakan ada satu orang mati di sini, ada satu orang lagi mati di sana.³⁹

60. Satu sumber mengutip Monsignor Martinho Da Costa Lopes, Administrator Apostolik Dili (sebelum pemecatannya pada tahun 1983):

Kalau saja Indonesia memperbolehkan orang Timor-Leste untuk bergerak bebas dan tinggal di manapun yang

mereka sukai, maka tidak akan terjadi kekurangan pangan. Tentu saja produksi bahan makanan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklim. Namun masalahnya ialah bahwa rakyat dipaksa untuk tinggal di tempat-tempat pemukiman dan tidak diizinkan keluar...inilah penyebab utama mengapa orang-orang tidak bisa menanam cukup tanaman bahan makanan.⁴⁰

61. Ada bukti bahwa Indonesia menolak memberikan bantuan pangan dan obat-obatan kepada daerah-daerah yang “bergolak”, karena menganggap bahwa bantuan itu pada akhirnya akan jatuh ke tangan gerakan perlawanan.⁴¹ Juga ada laporan-laporan tentang militer yang mengalihkan bahan makanan, obat-obatan, dan pakaian, yang dimaksudkan sebagai bantuan untuk mereka gunakan sendiri atau dijual di toko-toko.⁴² Pejabat-pejabat militer dan pemerintah setempat juga dilaporkan telah menggunakan bantuan dengan cara yang diskriminatif untuk membujuk para pengungsi agar masuk agama Islam atau Protestan, atau untuk menarik para perempuan yang putus asa ke dalam perbudakan seksual.⁴³

Dampak ekonomi dan sosial dari “kamp pemukiman kembali”

Kehidupan sehari-hari di bawah pendudukan Portugis dan Indonesia mungkin saja rentan dan tidak sehat, tetapi jauh lebih buruk lagi di kamp-kamp, desa-desa, dan tempat-tempat lainnya dimana ratusan ribu orang dipaksa bermukim oleh militer Indonesia di masa-masa yang berbeda selama pendudukan. Kondisi di kamp-kamp ini sangat buruk: rumah-rumahnya primitif dan para penghuni tidak punya akses ke fasilitas-fasilitas sanitasi ataupun kesehatan. Tujuan pembangunan kamp-kamp ini adalah untuk mengisolasi gerakan perlawanan dari penduduk sipil. Ini hendak dicapai dengan cara menempatkan penduduk di bawah kontrol militer yang ketat, atau dengan memindahkan mereka menjauh dari tempat-tempat gerakan perlawanan masih bertahan. Penduduk dipindahkan secara paksa ke pemukiman-pemukiman yang terletak di dataran yang lebih rendah dimana mereka lebih mudah diawasi. Mayoritas penduduk sejak dulu tinggal di dataran tinggi untuk menghindari dari malaria yang mewabah di dataran rendah.⁴⁴ Karena itu, kamp-kamp ini menghadapkan sejumlah besar penduduk sipil yang sudah lemah kepada risiko kesehatan yang parah. Parahnya kondisi kesehatan di kamp-kamp itu, dan kebijakan melangkah mundur penguasa pendudukan untuk mempertahankan kamp-kamp ini tanpa menyediakan layanan kesehatan bagi para tahanan adalah pelanggaran yang jelas terhadap hak atas kesehatan.

Suatu jenis kamp pemukiman yang lain digunakan untuk menahan ribuan orang sipil dan pejuang Falintil yang melarikan diri setelah invasi dan kemudian menyerah atau tertangkap. Orang-orang ini ditahan yang jangka waktunya berbeda-beda, mulai dari beberapa bulan sampai bertahun-tahun dengan tujuan yang jelas untuk memutus jalur dukungan kepada anggota-anggota perlawanan yang belum menyerah.⁴⁵ Saat mereka keluar dari persembunyian sudah dalam keadaan kekurangan gizi yang parah, setelah menjadi tawanan di kamp-kamp mereka mendapat ransum yang sangat sedikit, itu pun kalau ada. Mereka juga dilarang berjalan keluar kamp melebihi jarak tertentu yang tidak jauh, sehingga sangat membatasi kebebasan mereka untuk bercocok-tanam ataupun mencari makanan. Kamp-kamp ini dijaga ketat di semua sisinya untuk mencegah kontak dengan para gerilyawan. Tawanan yang meninggalkan kamp mereka untuk keperluan apapun, termasuk untuk mencari makanan, menghadapi risiko ditembak oleh para penjaga karena dianggap berusaha menghubungi perlawanan, atau ditembak oleh orang-orang perlawanan karena dicurigai bekerjasama dengan tentara Indonesia.⁴⁶ Para pengungsi terpaksa memakan daun-daunan dan umbi-umbian beracun yang ditemukan di daerah sempit dimana mereka masih bisa bergerak, dan akibatnya mereka menderita muntah-muntah dan diare.

⁴⁰ Banyak laporan mengenai ratusan orang yang meninggal setelah makan ikan asin yang diberikan oleh militer (lihat Bagian 7: Bab 7.3: Pindahan Paksa dan Kelaparan). Walaupun beberapa pengungsi mencurigai mereka diracun, kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh “kelebihan protein” akibat memakan makanan berkadar protein tinggi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun dalam kondisi kekurangan gizi yang parah.

Seorang mantan penghuni kamp Uma Metan (Alas, Manufahi) mengatakan bahwa orang banyak menderita kolera, beri-beri, dan tuberkolosis akibat kekurangan gizi dan buruknya mutu air minum, dan 10 sampai 20 orang meninggal setiap hari.⁴⁷

Orang-orang yang dipindahkan dari desa-desa yang terjadi pemberontakan atau bentuk-bentuk perlawanan lainnya terhadap Indonesia, bisa menghadapi kondisi yang bahkan lebih keras daripada kondisi di kamp-kamp untuk orang-orang yang menyerahkan diri. Bila para tahanan ini tidak terlibat dalam kegiatan perlawanan, seperti yang kebanyakan terjadi, perlakuan terhadap mereka memiliki suatu unsur pembalasan dan hukuman kolektif. Demikianlah, setelah pemberontakan bulan Agustus-September 1983, seluruh penghuni desa, termasuk bukan hanya kerabat para tentara Falintil dan milisi Hansip yang membelot ke gunung, tetapi juga tetangga-tetangga mereka, dikepung dan dipindahkan ke desa-desa baru dimana mereka ditempatkan tanpa makanan ataupun tempat tinggal yang memadai, kondisi sanitasi dan perawatan kesehatan. Para tahanan dilarang bertani ataupun meninggalkan kamp dengan alasan apapun. Mengunjungi kebun, khususnya, dilarang karena kebun dipandang sebagai tempat pertemuan penduduk sipil dan gerilyawan.⁴⁸ Misalnya, setelah peristiwa Kraras pada tanggal 8 Agustus 1983, orang-orang yang selamat dari gelombang eksekusi setelah peristiwa itu dipindahkan ke Lalerek Mutin, di daerah Luca, Viqueque, yang sebelumnya telah tidak dihuni dikarenakan iklimnya yang sangat panas dan kering serta tanahnya yang tidak subur. Kepala desa menguraikan tentang keadaan di sana:

Ketika kami tiba di tempat kami dipindahkan oleh Nanggala [Kopassus], semua peralatan kami seperti parang, pisau, sekop, cangkul, linggis, dan peralatan pertanian lainnya disita. Rumah-rumah dibangun berderet di sepanjang jalan utama agar mudah diawasi. Rumah-rumah dan fasilitas-fasilitas yang disiapkan untuk kami oleh Nanggala sungguh kumuh dan tak bisa dihuni...Rumah-rumah dibangun secara darurat bukan untuk digunakan secara permanen. Tidak ada makanan sama sekali...Keamanan luar biasa ketat dan kami dilarang bertani di luar kamp. Kami diharuskan berkumpul setiap pagi dan sore untuk memastikan bahwa semua orang ada. Kalau ingin pergi sejauh 200 meter dari kamp ke sebuah kebun, kami harus lebih dulu meminta surat jalan, jadi pada dasarnya meninggalkan kamp itu mustahil. Kami dilarang berhubungan dengan cara apapun dengan dunia luar; tidak ada komunikasi yang diperbolehkan dengan desa-desa di sekitar kamp. Tidak ada bantuan medis sama sekali. Selama tinggal di sana, kami hidup dalam tekanan psikologis dan trauma yang mendalam, dan merasa sangat tertekan.⁴⁹

Setelah empat atau lima bulan, ketika jumlah orang yang meninggal meningkat, tentara yang menjaga memperbolehkan orang-orang di Lalerek Mutin untuk pergi keluar mencari makanan dua kali dalam seminggu dengan syarat mereka juga harus membakar, mencabut atau, kalau tidak, menghancurkan sumber-sumber makanan itu supaya perlawanan tidak mendapatkan makanan.⁵⁰

Suatu tempat lain yang dipilih karena letaknya terpencil, bukan karena kapasitasnya untuk mendukung orang-orang yang dikirim ke sana, adalah Atauro, sebuah pulau di lepas pantai Dili yang juga pernah digunakan oleh Portugis untuk pusat penahanan. Pada puncaknya, akhir 1982, penghuni kamp Atauro banyaknya 4000 orang lebih,⁵¹ dua kali lebih banyak dari penduduk setempat ketika itu, yang sebelumnya sudah kesulitan mengais penghidupan di pulau yang kering dan tidak subur itu.⁵² Seorang tahanan mengingat saat kedatangannya di kamp Atauro:

Ketika kami tiba di sana, saya dipisahkan dari adik laki-laki saya [Mateus]. Dia tinggal di rumah nomor 22 bersama 60 orang lainnya; Saya berada di nomor 24 bersama 70 orang. [Sumber-sumber lain melaporkan bahwa rumah-rumah itu berukuran 14 x 10 m]. Rumah-rumah tempat kami tinggal di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya selembat atap seng dan terpal sebagai dindingnya. Tidak ada tempat tidur...Awalnya militer tidak memberi kami makanan sama sekali. Mateus dan saya makan apa yang kami bawa dari Quelicai. Sebulan kemudian, kami mendapat ransum makanan dari militer, tiga kaleng jagung. Ini adalah jatah untuk seluruh keluarga, yang harus bertahan selama dua minggu karena kami hanya mendapat jatah dua kali

*sebulan...Orang-orang yang tak tahan lapar mencuri pepaya dan singkong milik penduduk setempat...Setiap hari 2-5 orang mati karena lapar, kebanyakan anak-anak dan orang tua.*⁵³

Sesuai dengan keadaannya pelanggaran hak atas kesehatan, pelanggaran hak atas pendidikan merupakan masalah berat di kamp-kamp. Kondisi ekstrem di “kamp-kamp pemukiman kembali” yang menjadi tempat pemindahan keluarga-keluarga, bahkan seluruh desa, berdampak pada pendidikan yang jauh lebih melampaui segala kekurangan sistem pendidikan “normal” (lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan). Penelitian Komisi dan sumber-sumber sekunder menunjukkan bahwa selama bertahun-tahun, anak-anak di kamp-kamp tersebut tidak mendapatkan pendidikan sama sekali atau hanya mendapatkan pendidikan yang tidak memadai. Di kamp-kamp penahanan di distrik Lautem dan Liquiça, sekolah sama sekali tidak ada sejak invasi sampai tahun 1982-1983.⁵⁴ Di sebuah kamp lainnya, di Uma Metan (Alas, Manufahi), militer membangun sebuah “sekolah”, yang sepertinya untuk mengajarkan bahasa Indonesia, tetapi pada kenyataannya menjadi sebuah pusat pemerkosaan yang terkenal keji:

*Sebuah sekolah darurat dibangun di Uma Metan atas perintah Linud 700, Nanggala [Kopassus], dan Koramil. Bangunan ini dibuat dari bahan-bahan tradisional dan panjangnya 12 meter. Sekolah ini dibangun agar penduduk yang ingin belajar bahasa Indonesia bisa belajar. Prosesnya adalah setiap malam semua perempuan di Uma Metan mandi dan kemudian masuk ke kelas mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, yang tentu saja diajarkan oleh [ABRI] dari wilayah itu. Hal yang tak lazim ialah bahwa sekolah itu juga digunakan oleh Nanggala, Linud 700, dan Koramil untuk melampiaskan nafsu seksual mereka terhadap setiap perempuan yang mereka inginkan...ini diketahui oleh komandan mereka, bahkan komandan itu juga ambil bagian.*⁵⁵

Jika ada sekolah, kondisi di kamp-kamp yang sangat parah membuat bertahan hidup menjadi keharusan tertinggi, sehingga pendidikan berada di urutan terbawah dalam daftar prioritas anak-anak dan bagi anak-anak yang menderita kekurangan gizi serta tekanan emosional yang berat sekolah menjadi suatu pengalaman yang amat membebani.

Pendidikan anak juga menjadi korban di Ataúro. Penguasa Indonesia mengatakan kepada suatu delegasi yang berkunjung ke sana bahwa ada 17 orang guru: namun delegasi tersebut mengamati bahwa pada saat kunjungan mereka hanya ada sedikit anak di dalam kelas.⁵⁶

Rumah dan tanah

62. Menikmati rumah dan tanah secara damai merupakan suatu unsur yang esensial bagi martabat manusia dan keamanan seseorang, baik dari segi fisik maupun emosional. Dalam masyarakat agraris seperti Timor-Leste, tanah adalah komoditi mendasar yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Dengan demikian, hak untuk mendapatkan rumah dan tanah itu tidak dapat dipisahkan dari hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, termasuk makanan, kesehatan, dan kemampuan untuk mendapatkan nafkah yang memadai. Tanah juga memiliki nilai sosial, budaya, dan spiritual yang dalam,⁵⁷ dan merupakan simbol “keberakaran” dan asal-usul.

63. Kepemilikan tanah dan konflik-konflik seputar rumah dan tanah adalah persoalan yang rumit. Komisi dibatasi oleh mandatnya untuk tidak mengurus pertikaian-pertikaian yang spesifik.⁵⁸ Karena itu, pembahasan berikut ini dirancang untuk melihat secara umum sifat dari masalah ini dan asal-usulnya dalam konflik-konflik yang terjadi antara tahun 1974 dan 1999.

⁵³ Ini khususnya berlaku pada situasi konflik dan pasca-konflik, dimana tanah dan hubungan (atau tidak adanya hubungan) antara kelompok-kelompok tertentu dengan tanah menjadi retorika utama di balik kekerasan. Lihat, misalnya, Liisa Malkki, *Purity in Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania*, University of Chicago, Chicago, 1997.

64. Konflik disebutkan menjadi pendorong dari 50,7% pemindahan paksa, tetapi berbeda-bedanya keadaan dalam mana penduduk dipaksa meninggalkan tanah mereka dalam kurun waktu yang menjadi mandat CAVR menunjukkan kerumitan dari masalah ini:

- Di waktu aksi bersenjata UDT dan reaksi bersenjata Fretilin, anggota-anggota dan para pendukung kedua partai politik itu ambil bagian dalam pembakaran rumah, penghancuran harta benda, dan kekerasan yang membuat penduduk sipil melarikan diri dari desa mereka. Dalam hal tertentu, penduduk sipil di distrik-distrik bagian barat melarikan diri atau dipaksa menyeberangi perbatasan internasional memasuki Timor Barat, Indonesia.
- Ada bukti bahwa Fretilin dan pasukan Falintil memindahkan sebagian penduduk sipil ke gunung-gunung. Dari kasus-kasus pemindahan yang dilaporkan kepada Komisi, 12,8% deponen mengatakan bahwa Falintil meminta mereka pindah. Bukti kualitatif menunjukkan bahwa kadang-kadang permintaan tersebut muncul dari prihatin tentang keamanan rakyat sipil, tetapi kadang-kadang motivasinya politik. Ratusan ribu penduduk sipil diungsikan bersama pasukan Falintil, walaupun hanya ada sedikit rencana untuk menjamin bahwa mereka diberi makan atau tempat tinggal. Fretilin juga membakar sejumlah rumah penduduk sipil dan tanaman.
- Militer Indonesia berkali-kali melakukan pemindahan penduduk sipil. Dalam 30,7% kasus pemindahan paksa ini, para korban mengatakan bahwa tentara Indonesia meminta mereka untuk pindah. Pada 1999, kelompok-kelompok milisi juga melakukan pemindahan paksa penduduk, dan disebut dalam 6% kasus.
- Pemindahan keluar Timor-Leste mencakup pemindahan paksa ke kamp-kamp di Timor Barat. Ini terjadi sebelum invasi Indonesia dan setelah Konsultasi Rakyat 1999.
- Serangan membabi buta terhadap kota-kota oleh pasukan keamanan Indonesia dan kaki-tangan mereka mendorong penduduk sipil lari dari rumah-rumah mereka menuju gunung-gunung, dimana mereka tidak punya makanan atau tempat tinggal. Pasukan keamanan Indonesia dan kaki-tangan mereka juga secara sengaja memaksa penduduk sipil untuk keluar dari desa-desa mereka dengan cara membakar rumah dan kebun mereka serta menjarah barang milik mereka.
- Setelah menyerah kepada militer Indonesia, militer Indonesia menahan penduduk sipil di kamp-kamp penahanan, dimana tempat tinggal dan fasilitas sanitasinya begitu tidak memadai sehingga membahayakan.
- Pada awal dasawarsa 1980-an orang-orang yang dicurigai mendukung gerakan kemerdekaan dikirim ke Pulau Ataúro, kebanyakan untuk waktu beberapa tahun.
- Pemindahan paksa dilakukan di dalam negeri maupun ke luar negeri: 54,7% di dalam satu subdistrik; 16,5% di dalam satu distrik, 15,2% di dalam satu kawasan; 9,0% di dalam Timor-Leste, 4,1% ke luar Timor-Leste. Walaupun kebanyakan pemindahan bersifat lokal, pemindahan biasanya berlangsung untuk waktu yang lama – 50% pemindahan berlangsung lebih dari dua tahun.

65. Dampak dari pemindahan-pemindahan ini sangat luas dan beragam. Tidak hanya pelanggaran terhadap hak untuk memiliki rumah dan tanah, tetapi juga pelanggaran atas hak untuk mendapatkan makanan dan penghidupan. Pemindahan yang berulang kali terhadap penduduk dalam jumlah yang besar telah mengakibatkan rusaknya jalinan sosial masyarakat Timor-Leste dengan konsekuensi yang kemungkinan besar bersifat jangka panjang. Setiap kejadian pemindahan berdampak negatif pada hak seseorang atas rumah dan tempat tinggal yang memadai.

66. Data militer menunjukkan bahwa pada tanggal 6 Desember 1978 (yaitu segera setelah jatuhnya *Zonas Libertades* di Gunung Matebian) 318.921 orang, hampir separuh dari seluruh

penduduk Timor-Leste sebelum invasi, ditempatkan di kamp-kamp.^{*} Setelah referendum, sekitar 250.000 orang dipindahkan paksa ke Timor Barat, dan kebanyakan ke tanah yang sudah ditempati oleh penduduk setempat Timor Barat. Pemandahan tidak hanya mencabut akar orang-orang yang dipindahkan, tapi juga orang-orang yang tanahnya ditempati oleh pengungsi yang jumlahnya banyak. Menurut seorang pengamat:

Di masa pendudukan, orang-orang yang masih tinggal di tanah adat mereka yang ditempati para pengungsi semuanya mengungkapkan kesediaan untuk menerima para pemukim baru itu di antara mereka, karena dalam kondisi krisis tidak ada alternatif lain bagi orang-orang yang mengungsi ini. Selain itu, mempermasalahkan klaim atas tanah dapat menarik perhatian militer yang tidak diinginkan, dan suasana ketakutan meredam segala perasaan tidak puas yang mungkin ada terhadap pemukiman penduduk baru ini. Walaupun ada pemilik tanah adat yang diajak bicara mengenai tempat untuk orang-orang yang dipindahkan, lebih banyak yang melaporkan bahwa para pendatang tersebut ditempatkan di tanah mereka tanpa konsultasi atau ganti rugi terlebih dahulu.⁵⁹

67. Pemandahan-pemandahan ini, yang kadang-kadang berlangsung selama beberapa dasawarsa, berarti bahwa banyak penduduk desa yang merasa bahwa mereka telah berbuat lebih banyak untuk lokasi baru mereka dibandingkan tempat asal mereka, dimana ladang dan kebun mereka menjadi terlantar atau ditempati oleh orang lain. Akibatnya, banyak pengungsi lebih memilih untuk tinggal daripada kembali kampung halaman mereka dan berusaha membangun kembali rumah dan kebun mereka.⁶⁰ Fitzpatrick mengutip tiga contoh dari distrik Manatuto. Satu desa memutuskan untuk kembali secara bersama-sama ke daerah asal mereka. Sebuah desa lain memilih untuk tinggal walaupun desa di sekitar mengklaim hak atas tanah yang mereka tempati. Desa ketiga ingin pindah ke sebuah desa transmigrasi yang ditinggalkan oleh para migran Indonesia.⁶¹ Baik yang memilih tinggal atau kembali, pemandahan sedemikian banyak orang menyebabkan meluasnya konflik atas tanah dan sumber daya dan ketidakpastian mengenai standar hukum mana yang sebenarnya berlaku.⁶²

68. Bukannya mengambil langkah-langkah untuk memperbolehkan penduduk memiliki hak atas tanah dan menikmati dengan tenteram rumah dan tanah mereka di Timor-Leste; sebaliknya sikap terbaik penguasa Indonesia adalah “tidak menganggap hal ini sebagai prioritas bila dibandingkan dengan keamanan dan pembangunan”, dan yang terburuk adalah mereka justru memperburuk masalah ini.⁶³ Oleh karena itu tanah menjadi salah satu sumber pertikaian utama di Timor-Leste di masa pendudukan dan hingga kini. Selain pemandahan massal yang diuraikan di atas, api pertikaian juga semakin membara dengan tidak diakuiinya klaim adat, baik oleh negara maupun kepentingan swasta yang dilindungi oleh negara, serta dengan penetapan batas-batas wilayah adat atau wilayah administrasi yang baru.⁶⁴

69. Selain gagal mengatasi pertikaian tanah, Indonesia juga menyebabkan langkanya tempat tinggal dan tidak adanya jaminan untuk hak milik dengan tindakannya sewenang-wenang menyita bidang-bidang tanah adat yang luas. Penyitaan tanah oleh negara, atau oleh kepentingan swasta yang dilindungi negara, umum terjadi di Indonesia. Negara memandang tanah apapun yang tanpa kepemilikan resmi sebagai tanah milik negara, yang dikelola oleh negara untuk “kepentingan umum”. Akan tetapi, hanya ada sedikit imbalan atau ganti rugi bagi

^{*} Alex Dirdja SJ, “Timor Timur: Beberapa Pengamatan dan Pemikiran”, Dili, 25 April 1979, halaman 2 (mengutip angka-angka yang diberikan oleh Asisten Teritorial, Departemen Pertahanan dan Keamanan). Deponen-deponen yang memberikan pernyataan kepada Komisi mengenai pemandahan paksa jarang menyebutkan tempat mereka dipindahkan dan akibatnya Komisi tidak bisa memberikan angka sendiri yang sebanding mengenai masalah ini.

mereka yang tanahnya disita untuk kepentingan penanaman modal komersial yang oleh negara dianggap baik untuk “pembangunan”.

70. Walaupun penggunaan kekuasaan negara yang sewenang-wenang untuk mengambil tanah tidak hanya terjadi di Timor-Leste, tingkat militerisasi serta kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pasukan keamanan menjadikan proses perampasan tanah di Timor-Leste jauh lebih menakutkan. Sebuah laporan yang disusun oleh lembaga bantuan hukum Timor-Leste, Yayasan HAK, menyebutkan kasus-kasus dimana penduduk lokal diusir dari tanah mereka oleh negara untuk dijadikan kantor pemerintah, perumahan pegawai negeri sipil, pasar, konsesi penebangan hutan, pabrik gula dan pabrik kayu lapis, yang semuanya dengan ganti rugi dalam jumlah kecil atau tidak sama sekali. Jika penduduk memprotes, militer akan mengintimidasi hingga mereka tunduk.⁶⁵ Dalam suatu kasus seperti ini, sebuah rencana perkebunan tebu seluas 200.000 ha yang melibatkan penanaman modal sebesar US\$ 800 juta oleh perusahaan-perusahaan yang di antaranya melibatkan anak laki-laki Presiden Suharto, Tommy, akan mencaplok seluruh desa Lore I (Lospalos, Lautem).⁶⁶ Seluruhnya 240 keluarga desa menandatangani surat protes yang dilayangkan kepada bupati setempat, namun diabaikan begitu saja. Yayasan HAK diminta untuk bertindak atas nama penduduk desa tersebut di pengadilan, akan tetapi pasukan keamanan kemudian menutup desa tersebut terhadap pengunjung dari luar.⁶⁷ Kasus ini menggambarkan bagaimana orang-orang kehilangan hak atas tanah di Timor-Leste:

Di bawah pendudukan Indonesia, hampir tidak ada ganti-rugi bagi pemilik tanah, sangat sedikit mekanisme independen untuk menentukan harga tanah, tidak ada hak efektif untuk menggugat ke pengadilan yang independen, penganiayaan dan intimidasi terhadap orang-orang yang melapor, tidak ada hukum yang wajar baik dalam penentuan status tanah atau dalam pengajuan keberatan, dan tidak ada definisi yang jelas mengenai pembangunan untuk “kepentingan umum”.⁶⁸

71. Penguasa pendudukan Indonesia beranggapan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang No. 7/1976 yang menetapkan Timor-Leste sebagai bagian dari negara Indonesia, semua hukum nasional berlaku di wilayah ini. Ini termasuk hukum pertanahan dan kehutanan yang menganggap semua tanah yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan pribadi sebagai tanah negara. Tanah-tanah ini kemudian dialihkan ke Pemerintahan Transisi PBB pada tahun 1999 dan kemudian ke negara merdeka Timor-Leste pada tahun 2002. Fitzpatrick mencatat bahwa di Dili saja, 40% dari seluruh luas tanah digolongkan sebagai “tanah negara yang kosong” (tanpa penghuni yang tidak resmi). Tidak mungkin bahwa selama masa pendudukan tanah ini memang tidak ada yang menempati.

72. Catatan Indonesia dari distrik Bobonaro, Covalima, Ambeno, Baucau, Manatuto, Aileu, dan Liquiça menunjukkan bahwa total 189.660 ha, atau 55% dari seluruh luas tanah tujuh distrik ini sebagai “tanah negara yang kosong”. Selanjutnya ada 50.440 ha, 14,6% dari keseluruhan luas tanah, digolongkan sebagai “tanah negara yang ditempati”. Ini menyisakan hanya 7,4% dari tanah di tujuh distrik ini sebagai tanah yang tergolong tanah adat.⁶⁹

Dampak ekonomi dari politik pembumihangusan 1999

Membahas dampak ekonomi dari gelombang kekerasan yang dilancarkan oleh TNI dan milisi menyusul referendum 1999 menghadapi risiko mengecilkan skala teror pada masa itu dan kejamnya pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Timor-Leste. Namun bagaimanapun juga, pembumihangusan yang menyertai penarikan mundur tentara Indonesia memiliki dampak ekonomi yang parah dan berjangka panjang.

Misi Penilaian Bersama untuk Timor-Leste tahun 1999 yang diprakarsai oleh Bank Dunia memperkirakan bahwa kehancuran pasca-referendum:

- Menghancurkan hampir seluruh perlengkapan modern dan infrastruktur fisik
- Secara efektif menghilangkan semua struktur administrasi akibat larinya pegawai, dan kehancuran lebih dari 70% gedung dan semua arsip pemerintah
- Menyingkirkan 75% penduduk dari tempat tinggal mereka
- Mengakibatkan inflasi yang hebat, antara lain naiknya harga minyak goreng tujuh kali lipat, garam lima kali lipat, susu kaleng enam kali lipat, dan sabun cuci sepuluh kali lipat
- Menhancurkan telekomunikasi dengan menghancurkan menara transmisi dan banyak papan sambungan serta kabel
- Mengakibatkan 80-90% rumah di kota-kota utama dan banyak pedesaan tidak bisa dihuni
- Menyebabkan pengangguran besar-besaran di perkotaan
- Mengakibatkan menurunnya PDB riil sebesar 40-50% di tahun 1999 saja.

Selain itu, hasil pertanian berkurang sebesar 30-40% karena:

- Kurangnya tenaga kerja pertanian karena pemindahan;
- Kehilangan alat pengolah lahan akibat pembunuhan ternak dan perusakan serta penjarahan peralatan pertanian; dan
- Tidak tersedianya bibit akibat bibit dikonsumsi sebagai makanan karena tidak ada pilihan.⁷⁰

Kekerasan juga mengakibatkan kerusakan total sistem kesehatan. Rumah sakit-rumah sakit dan klinik-klinik hancur, semua obat-obatan dan peralatan hilang, dan hampir semua tenaga kesehatan senior, termasuk 130 dari 160 dokter, meninggalkan wilayah ini.⁷¹ Keadaan yang sama terjadi pada sistem pendidikan: 95% sekolah dan lembaga pendidikan lain dihancurkan; gedung, perabot, dan peralatan hilang, serta 70-80% dari pegawai administrasi dan tenaga pengajar sekolah menengah lari.⁷²

Mengingat penghancuran yang dilakukan oleh militer Indonesia dan kaki-tangannya ketika mereka meninggalkan Timor-Leste, adalah suatu ironi yang pahit dengan mengingat pernyataan berikut dalam "Dua Puluh Tahun Pembangunan Timor Timur" yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Indonesia:

*Pembangunan di bekas koloni Portugis ini harus dimulai dari bawah lagi. Tidak ada satu hal pun yang berarti yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pembangunan daerah ini akan dijalankan secara bertahap.*⁷³

7.9.3 Hak atas Kesehatan

Pengertian 'Hak atas Kesehatan'

73. Hak atas kesehatan adalah hakiki bagi penikmatan hak-hak asasi manusia yang lain. Hak ini dinyatakan dalam KIHSEB bukan sebagai hak untuk sehat, tetapi:

Hak bagi setiap orang untuk dapat menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang setinggi mungkin (Pasal 12[1]).

74. Langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah-pemerintah untuk merealisasi ini antara lain:

- ketentuan untuk mengurangi tingkat persalinan mati dan kematian bayi serta perkembangan sehat anak-anak
- perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri
- pencegahan, pengobatan, dan pengendalian penyakit-penyakit epidemis, endemis, terkait pekerjaan, dan penyakit-penyakit lain
- Menciptakan kondisi yang akan menjamin pelayanan medis dan perawatan medis ketika seseorang jatuh sakit. (KIHSEB, Pasal 12[2]).

75. Hak atas kesehatan mencakup kebebasan-kebebasan seperti hak seseorang untuk mengatur kesehatan atau badannya sendiri, termasuk kebebasan seksual dan reproduksi, dan untuk terbebas dari campur tangan seperti penyiksaan dan tindakan medis yang tanpa persetujuan.⁷⁴

76. Hal ini juga melibatkan hak-hak seperti hak atas informasi serta pendidikan mengenai kesehatan dan pemeliharaan kesehatan. Bagi kaum perempuan, ini berarti informasi yang cukup mengenai pelayanan reproduksi harus diberikan.⁷⁵ Pemenuhan standar minimum hak-hak yang disebut di atas, seperti akses pada makanan pokok, perumahan, dan sanitasi juga merupakan kewajiban utama dari negara-negara dalam memenuhi hak untuk kesehatan.⁷⁶

77. Komisi yakin bahwa Indonesia telah melanggar hak untuk kesehatan dalam beberapa cara. Alasan utama kegagalan negara Indonesia untuk menghormati dan memenuhi hak untuk kesehatan adalah prioritas yang diberikan kepada keamanan tanpa memperhatikan dampak dari kebijakan keamanannya terhadap kesehatan umum. Banyak langkah-langkah keamanan yang dengan jelas berdampak buruk pada kesehatan umum, seperti:

- Penggunaan “kamp pemukiman kembali” untuk mengisolasi gerakan perlawanan dan menghukum kerabat serta pendukung mereka.
- Penggunaan penyiksaan secara luas untuk mengumpulkan informasi dan mengintimidasi.
- Perekrutan paksa anak-anak sebagai “tenaga bantuan operasi” (TBO) yang membahayakan kesehatan mereka dengan membawa mereka pada pertempuran dan kerja paksa yang sangat berat serta dengan mengabaikan kebutuhan gizi dan medis mereka.

78. Seluruh jumlah dana yang diinvestasikan Indonesia untuk kesehatan di Timor-Leste memang besar baik dalam pengertian absolut atau jika dibandingkan dengan pengeluaran Portugis, namun sebagian besar dari investasi pemerintah di Timor-Leste diarahkan pada pengeluaran yang bertujuan untuk memperkuat kontrol militer. Indonesia juga gagal mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pemenuhan bertahap hak penduduk untuk mencapai standar kesehatan yang setinggi mungkin. Seperti yang ditunjukkan Tabel 8, investasi Indonesia di sektor kesehatan di Timor-Leste tidak efektif dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang kronis dan kematian bayi. Satu sebabnya adalah kegagalan untuk mengatasi kemiskinan sebagai penyebab dasar penyakit dan buruknya kesehatan. Sebab lainnya adalah pelayanan

⁷⁴ Perlu dicatat bahwa UDT, dan terutama Fretilin, juga menggunakan penyiksaan untuk mendapatkan informasi atau untuk mengintimidasi orang sipil. Lihat Bab 7.4: Penahanan, Penyiksaan, dan Penganiayaan.

kesehatan dengan pendekatan dari atas ke bawah dan bersifat paternalistik. Pendekatan seperti ini tidak memberi pasien informasi yang cukup tentang perawatan kesehatan yang diberikan dan hanya memberikan sedikit kesempatan untuk memilih.

79. Di Indonesia sendiri, masyarakat juga diperlakukan dengan paternalisme yang sama. Bedanya adalah di Timor-Leste tingkat militerisasi luar biasa tinggi dan ketakutan serta ketidakpercayaan sebagai akibatnya juga sangat tinggi. Dampak buruk dari faktor-faktor struktural seperti ini sangat terlihat di bidang hak reproduksi, dimana perempuan, baik dewasa maupun muda, dihadapkan pada risiko kesehatan oleh berlebihannya pengejaran target yang mengakibatkan diabaikannya kebutuhan kesehatan mereka sebagai pribadi.

Kesehatan masyarakat di masa kekuasaan Portugis

80. Bahkan tanpa adanya konflik bersenjata sekalipun, kemiskinan yang meluas yang disertai dengan pemerintahan yang non-partisipatoris dan tidak bertanggung jawab kepada rakyat berarti bahwa rakyat Timor-Leste di bawah Portugis dan Indonesia tidak menikmati “realisasi yang semakin maju...pada tingkat maksimum sumber daya [negara] yang tersedia” hak mereka atas kesehatan.⁷⁷ Walaupun hanya ada sedikit data tentang kesehatan masyarakat dari masa Portugis, sangat kecilnya investasi pemerintah kolonial untuk pelayanan umum, iklim yang keras dan malaria yang endemis, semuanya mengindikasikan bahwa keadaan kesehatan penduduk pada umumnya sangat buruk. Ketika itu ada satu rumah sakit yang peralatannya lengkap di Dili,[†] fasilitas kesehatan yang sangat sederhana di setiap distrik dengan empat orang perawat dan satu orang dokter, dan setiap subdistrik (*posto*) memiliki satu pos kesehatan dengan seorang perawat (untuk sekitar 10.000 penduduk). Seorang pakar kebijakan kesehatan mengatakan kepada Komisi bahwa perkiraannya mengenai jumlah total pegawai kesehatan di akhir masa kekuasaan Portugis – sekitar 14 dokter dan 88-120 perawat – adalah “terlalu tinggi”. Ia menambahkan bahwa staf yang sedikit ini tidak memiliki keterampilan yang baik dan sering kali tidak ada di tempat kerja mereka.⁷⁸ Pelayanan kesehatan terpusat di kota-kota utama dan hampir tidak ada di desa-desa.[†] Seorang pengamat melaporkan bahwa “banyak wilayah yang tidak memiliki pelayanan kesehatan apapun, termasuk obat-obatan”.⁷⁹ Oleh karena itu, sistem pelayanan kesehatan Portugis pada umumnya diperuntukkan bagi kebutuhan orang asing dan elit lokal yang tinggal di kota, dan bukannya sebagian penduduk umumnya yang tinggal di pedesaan yang kesehatannya paling berisiko.

Pendudukan Indonesia

81. Oleh sebab itu, ketika menginvasi pada tahun 1975, Indonesia mendapati penduduk yang kondisi kesehatannya sudah buruk. Indonesia kemudian mengalokasikan sekitar 5% dari dana pembangunannya untuk Timor-Leste untuk investasi di bidang kesehatan. Walaupun Indonesia melakukan investasi yang besar, di akhir masa pendudukannya sebagian besar indikator kesehatan masyarakat tetap buruk, bahkan jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi Indonesia yang lain. Usia harapan hidup hanyalah 55 pada tahun 1999,⁸⁰ lebih rendah daripada provinsi Indonesia manapun dan lebih rendah dibandingkan negara Asia dan Pasifik manapun, kecuali Laos.⁸¹

[†] Palang Merah Australia menganggap bahwa rumah sakit tersebut peralatannya cukup dan tidak memerlukan peralatan atau antibiotik tambahan. “Report of Activities of International Committee of the Red Cross Medical Team in East Timor from Aug 30 - Sept 4, 1975” (Laporan Kegiatan Tim Medis Palang Merah Internasional di Timor-Leste, dari 30 Agustus - 4 September 1975), halaman 2.

[†] Komentar ini diperkuat oleh John Whitehall, dari Australian Society for Intercountry Aid – Timor (ASIAT), yang mengatakan bahwa tifus bersifat endemik, malaria menular, dan TBC “sama sekali tidak diketahui.” Mayor Jenderal C.M. Gurner, penasehat kesehatan Gabungan Angkatan, 25 November 1975. John Whitehall, presentasi pada Consultation on East Timor (Konsultasi tentang Timor-Leste), Melbourne, 26 September 1975.

Tingkat kematian ibu dan anak dan perkembangan anak

82. Selama masa pendudukan Indonesia, tingkat kematian ibu dan anak menurun namun tidak sampai pada tingkat yang seharusnya dapat dicapai. Dari angka yang sangat tinggi, tingkat kematian ibu 14% dan kematian anak 24% pada tahun 1980, angka ini menurun masing-masing menjadi 13,5% dan 15,7% pada 1996.⁸² Walau begitu, angka tahun 1996 masih tetap tinggi menurut standar apapun. Lebih tinggi, misalnya, dari provinsi manapun di Indonesia. Tingkat kematian bayi masih tetap tiga kali lebih tinggi dari angka rata-rata Indonesia (lihat Tabel 8).

Table 9 - Indikator Pembangunan Terpilih 1996

	Kematian Bayi (tiap 1000 kelahiran hidup)	Buta Huruf (%)	Usia Harapan Hidup
Timor-Leste (Timor Timur)	135	60	54
Nusa Tenggara Timur	51	21	64
Nusa Tenggara Barat	75	32	59
Maluku	47	7	65
Papua (Irian Jaya)	51	33	65
Indonesia (rata-rata)	44	15	66

Sumber: BPS 1999, UNDP 1997, 2001; www.undp.org/Depts/unsd/social/health.htm

83. Seperti halnya tingkat kematian anak dan bayi, tingkat kematian ibu juga tetap tinggi selama masa pendudukan Indonesia. Bahkan tahun 1990-1994, masa yang disebut sebagai "tahap pembangunan jangka panjang", tingkat kematian ibu di Timor-Leste masih 8,3%, kelima tertinggi dari negara manapun di dunia. Ini sebagian disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi di kalangan ibu-ibu Timor-Leste yang umumnya beragama Katolik. Pada umumnya perempuan di Timor-Leste melahirkan 7,4 kali seumur hidupnya. Bahkan ketika risiko yang terkait dengan persalinan semakin meningkat dengan setiap persalinan berikutnya, menurut data Bank Dunia, pada 1999 75% dari persalinan terjadi tanpa dibantu tenaga profesional kesehatan. Ini semakin membahayakan ibu yang sedang bersalin⁸³ dan juga berarti bahwa angka kematian saat bersalin yang dilaporkan mungkin lebih rendah daripada angka yang sebenarnya.⁸⁴ Besarnya jumlah persalinan yang tidak dibantu tenaga kesehatan mungkin disebabkan oleh ketidakpercayaan kaum perempuan kepada petugas kesehatan Indonesia karena program KB yang sangat termiliterisasi (lihat di bawah).

84. Kondisi kesehatan yang buruk selama konflik politik tidak hanya mengancam nyawa anak-anak tetapi juga menghambat perkembangan anak-anak yang hidup. Kekurangan gizi yang kronis dan kekurangan mikronutrisi memiliki dampak buruk jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan mental.⁸⁵ Hal-hal ini hampir dapat dipastikan merupakan salah satu sebab bagi korelasi erat antara pendidikan yang rendah dan kemiskinan di Timor-Leste (lihat Tabel 10).⁸⁶ Dengan perkembangan yang terhambat, anak-anak yang hidup miskin rentan untuk mengalami masalah dalam pendidikan dan pekerjaan kelak dalam hidupnya. Kendala-kendala ini menyulitkan anak-anak untuk mematahkan persoalan kemiskinan setelah mereka dewasa. Komisi percaya bahwa masalah kemiskinan, penyakit, dan kurangnya pendidikan terkait erat dengan lingkaran ini yang terus berputar di bawah pendudukan Indonesia.

Pengurangan wabah penyakit

85. Penyakit menular yang dapat dicegah tetap menjadi penyebab utama kematian di Timor-Leste.⁸⁷ Berbagai sumber melaporkan antara 1993 dan 1997 bahwa malaria, tuberkulosis, pneumonia, dan gastroenteritis adalah penyakit yang endemis, dan merupakan penyebab utama

⁸² Hanya Guinea Bissau, Eritrea, Republik Afrika Tengah, dan Mozambik yang lebih tinggi. UNICEF, *State of the World's Children*, UNICEF, New York, 1998, dikutip dalam Pedersen dan Arneberg, halaman 64.

kematian di Timor-Leste.^{*} Sumber-sumber yang sama melaporkan bahwa orang yang sakit malaria merupakan sepertiga dari jumlah keseluruhan orang yang berobat pada masa yang sama.⁸⁸ Kolera juga umum dilaporkan dalam pernyataan-pernyataan dan kesaksian-kesaksian yang diberikan kepada Komisi, khususnya dalam periode kelaparan dan pemindahan paksa akhir dasawarsa 1970-an, tetapi juga dalam dasawarsa 1980-an. East Timorese Relief Association melaporkan bahwa pada 1988 wabah kolera merupakan penyebab dari kematian ratusan anak.[†] Tingginya penyebaran penyakit menular merupakan indikator bagi kemiskinan Timor-Leste; penyakit-penyakit ini menunggu kesempatan saja dan mengintai penduduk miskin yang hidup dalam kondisi yang padat dan tanpa sanitasi atau makanan yang cukup. Menurut Pederson dan Arneberg luasnya persebaran TBC adalah pertanda masalah yang lebih mendalam: "Kenyataan bahwa TBC adalah pembunuh utama di Timor-Leste mencerminkan suatu sistem kesehatan yang gagal menyediakan tingkat kesehatan yang paling dasar bagi penduduk."⁸⁹

86. Di sisi lain, cakupan program imunisasi meluas dengan mengesankan selama masa pendudukan Indonesia. Sumber-sumber WHO Indonesia, mengutip data pemerintah, melaporkan bahwa pada tahun 1997, 99,6% dari bayi yang dilahirkan tahun itu mendapatkan vaksinasi DPT pertamanya, 100% mendapatkan vaksinasi BCG, 92% mendapatkan imunisasi campak, dan 94% mendapatkan vaksinasi polio yang keempat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) melaporkan angka yang lebih kecil, namun bukan berarti tidak konsisten: hanya 49% anak usia di bawah lima tahun pada 1995 dan 1996 mendapatkan imunisasi yang lengkap, sedangkan pada tahun 1998 imunisasi lengkap untuk kelompok ini mencapai 59%. Jika angka-angka yang berbeda ini saling mendukung dan konsisten, ini menunjukkan peningkatan dramatis vaksinasi. Apapun kasusnya, tingkat penyebaran campak, tetanus, dipteri, batuk rejan, dan polio yang rendah menunjukkan keberhasilan program imunisasi.

Akses pada pelayanan kesehatan

87. Antara 1975 dan 1999, jumlah dokter umum yang bekerja di wilayah ini meningkat dari 14 menjadi 160 (25 orang di antaranya adalah orang Timor-Leste). Dalam masa yang sama, jumlah perawat meningkat dari 88-120 menjadi sekitar 1.000 orang. Di penghujung pendudukan Indonesia, terdapat delapan rumah sakit kabupaten, 67 pusat kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan, dan 309 pos pelayanan terpadu.⁹⁰

88. Walaupun kehadiran fisik sistem kesehatan meningkat, akses pada perawatan kesehatan masih tetap sangat terbatas. Selama lebih dari 20 tahun pendudukan (angka anggaran yang lengkap hanya tersedia sampai tahun anggaran 1993/94) diperkirakan US\$13,5 juta dialokasikan ke sektor ini.[‡] Fasilitas kesehatan di masa pendudukan Indonesia tetap jauh letaknya, peralatannya tidak lengkap, dan petugas kesehatannya sedikit. Laporan penilaian mengenai kemiskinan negara Bank Dunia yang dikeluarkan bulan Mei 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar orang Timor-Leste tinggal dalam jarak lebih dari satu jam dari fasilitas kesehatan dasar terdekat dan perjalanan ke tempat-tempat ini membutuhkan biaya rata-rata Rp 6.700,⁹¹ yaitu seharga sekitar satu kilogram beras.⁹² Fasilitas kesehatan rata-rata dibuka hanya delapan hari dalam sebulan dan dijalankan oleh petugas kesehatan hanya selama empat hari.⁹³ Selain itu, petugas medis pada umumnya tidak terlatih dengan baik dan tidak berpengalaman, yang kebanyakan adalah lulusan baru yang dikirim pemerintah Indonesia untuk tugas wajib di daerah.⁹⁴

^{*} Pederson dan Arneberg, halaman 70-72. Laporan Sektor Kesehatan Timor-Leste tahun 2000 dari World Health Organization juga memperkirakan bahwa penyakit menular menyebabkan 60% kematian.

[†] Dilaporkan bahwa ini sebagian karena rumah sakit-rumah sakit dan klinik-klinik memberi anak-anak di bawah dua tahun dosis obat yang tinggi untuk menyembuhkan kolera. Ines Almeida, "Peran Wanita Dalam Perjuangan," dalam ETRA, *It's Time to Lead the Way: Timorese People Speak about Resistance, Exile and Identity – Writings from a Conference on East Timor and Its People*, East Timor Relief Association, Collingwood, 1996.

[‡] Perhitungan ini diambil dari dana pembangunan "Proyek Sektor" yang dialokasikan dari tahun anggaran 1976/77 sampai 1993/94. Angka alokasi dan perincian sektoral diambil dari Saldanha, 1994, halaman 160-162, dengan asumsi bahwa sektor kesehatan merupakan angka yang konsisten 5% dari anggaran, seperti pada tahun anggaran 1993/94.

89. Sumber-sumber lain menyebutkan perbedaan budaya antara petugas medis yang kebanyakan orang Indonesia dengan pasiennya yang orang Timor-Leste sebagai penghambat bagi pemberian pelayanan kesehatan yang efektif (menurut statistik pemerintah Indonesia, pada tahun 1999 hanya 26 dari 141 dokter adalah orang Timor-Leste),⁹⁵ dan cara pemberian pelayanan yang meremehkan pasien yang tidak memberikan informasi yang cukup bagi pasien untuk dapat membuat pilihan dengan baik.⁹⁶ Obat-obatan tidak banyak tersedia dan seringkali harganya amat sangat mahal. Jelas bahwa kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, tidak banyak yang dapat menarik pasien untuk melakukan perjalanan yang jauh dan mahal ke pos-pos kesehatan. Ini berakibat pada kurangnya perawatan pencegahan, dan pasien-pasien yang akhirnya datang ke fasilitas pelayanan medis yang tidak memadai sudah dalam keadaan sakit yang parah.

90. Kondisi kesehatan yang buruk ini yang terus berlanjut menimbulkan pertanyaan mengapa investasi yang demikian besar ini masih tetap tidak efektif dalam memperbaiki kesehatan masyarakat. Satu sebab tidak efektifnya sistem kesehatan ini adalah bahwa investasi berupa fasilitas kesehatan fisik, yaitu segala gedung dan peralatan, tidak menangani berbagai penyebab penyakit itu sendiri, yaitu: kemiskinan yang telah lama berlangsung, yang ini sendiri diperkuat oleh kesehatan dan pendidikan yang buruk.

91. Prioritas yang diberikan kepada keamanan juga memainkan peran yang penting. Ada perbedaan tajam tingkat kematian bayi dan anak antara satu distrik dengan distrik lain, dengan yang tertinggi terjadi di Baucau, Manufahi, Ainaro, dan Covalima.[†] Satu laporan menyebutkan bahwa angka kematian anak yang tinggi di distrik Baucau pada periode 1990-1994 mungkin berhubungan dengan konsentrasi yang relatif tinggi “desa binaan” di distrik tersebut.⁹⁷ Pengamatan ini, walaupun tidak bisa menarik kesimpulan tanpa penyelidikan yang lebih mendalam, cukup penting dalam hal bahwa ini memperlihatkan dugaan kuat Komisi mengenai korelasi antara tingkat perlawanan terhadap pendudukan dengan peningkatan kemiskinan dan angka kematian. “Desa binaan” digunakan untuk mengontrol penduduk. Kebanyakan desa ini adalah desa baru yang dibangun di tempat-tempat yang sebelumnya dihindari karena lahannya tidak subur atau tingginya tingkat kejangkitan malaria. Tingkat kematian anak yang tinggi di Baucau menggambarkan sekali lagi dampak sosial dan ekonomi dari kekhawatiran berlebihan mengenai keamanan. Selain itu, di wilayah-wilayah dimana konflik politiknya paling parah dan dimana pembunuhan, penghilangan, dan penahanan paling sering terjadi,[‡] ketidakhadiran kepala keluarga yang diakibatkannya kemungkinan menimbulkan serangkaian dampak sosial dan ekonomi, termasuk menurunnya kemampuan keluarga untuk memberi nafkah anak-anak mereka.

Dampak ekonomi dan sosial Pengungsian ke Timor Barat tahun 1999

Sekitar 250.000 orang Timor-Leste yang dipindah paksa ke Timor Barat, Indonesia setelah pengumuman hasil referendum bulan September 1999 menghadapi kondisi yang amat berat di kamp-kamp dimana mereka ditempatkan. Mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup, dan makanan yang diberikan dikontrol oleh militer dan milisi, yang menyulurkannya dengan

[†] Obat-obatan kiriman bantuan kadang-kadang dialihkan kepada militer dan kemudian dijual di toko-toko setempat di Dili. Pat Walsh, “East Timor in Transition: Briefing Paper,” makalah tidak dipublikasi yang disampaikan atas nama ACFOA pada konferensi Strategic Development Planning for East Timor (Perencanaan Pembangunan Strategis untuk Timor-Leste), Melbourne, 5-9 April 1999.

[‡] Akan tetapi harus dicatat bahwa tingkat angka kematian distrik itu tergantung pada kesalahan penarikan sampel – khususnya untuk Survei Sampel 1985 dan 1988 yang menjadi dasar dari analisis FAFO.

[‡] Salah satu cara mengukur kekuatan perlawanan adalah dengan menghitung jumlah pembunuhan orang sipil dan penahanan sewenang-wenang dalam satu distrik dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain. Penelitian statistik Komisi menemukan bahwa 64,3% (788/1224) dari pembunuhan orang sipil yang dilaporkan antara 1979 dan 1984 terjadi di distrik-distrik bagian timur, yang mencakup Baucau. Penahanan yang dilaporkan antara 1977 dan 1984 terkonsentrasi di distrik-distrik bagian timur dan bagian tengah (yang mencakup Ainaro dan Manufahi) – dengan 43,0% (4220/9815) dari penahanan yang dilaporkan antara 1979 dan 1984 terjadi di distrik-distrik bagian timur dan 47,8% (4695/9815) di distrik-distrik bagian tengah.

semaunya, dengan mendiskriminasi keluarga-keluarga yang diragukan kesetiiaannya pada integrasi.

Satu organisasi non-pemerintah setempat yang memantau kamp-kamp menggambarkan bagaimana kekerasan dan ancaman kekerasan mempengaruhi kehidupan sehari-hari para pengungsi:

Beberapa kasus...memperkuat [dugaan] bahwa laki-laki yang bersenjata [atau mempunyai akses kepada senjata] adalah orang yang sebenarnya memiliki kontrol di dalam kamp. Mereka yang seringkali menempati posisi penting, misalnya sebagai pembagi makanan, ketua kamp, atau penjaga pos keamanan...Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan senjata atau ancaman senjata turut mempengaruhi iklim kekerasan di kamp-kamp tersebut.

Ini memperkuat sinyalemen bahwa mereka yang bersenjata dan mengontrol kamp juga berada dalam posisi untuk mengontrol bantuan yang masuk kamp. Pada umumnya bantuan pangan dibagi menurut sistem jatah, tetapi tidak ada cara untuk menjaga pendistribusian beras sampai ke dalam tangan pengungsi masing-masing...Ketika penimbunan beras dalam jumlah besar terlihat, sebagaimana pernah dicatat oleh salah satu anggota tim, ada kemungkinan "kelebihan" beras tersebut menguntungkan pengungsi yang bersenjata.⁹⁸

Kondisi di kamp-kamp pengungsian terutama berat bagi anak-anak. UNICEF memperkirakan bahwa di kamp, 25% pengungsi anak-anak menderita kekurangan gizi.*

Anak-anak yang dipaksa memungsi ke Timor Barat membanjiri sekolah-sekolah setempat, yang tidak siap untuk memenuhi kebutuhan puluhan ribu siswa baru. Trauma pemindahan, kekurangan gizi, dan penyakit yang merajalela di kamp-kamp serta beban tambahan untuk mencari makan menyebabkan pengungsi anak sekolah tertinggal dibandingkan dengan teman-teman mereka anak-anak Timor Barat.⁹⁹

Pengendalian kelahiran secara paksa

92. Tahun 1980, tidak lama setelah Indonesia menguasai seluruh wilayah, salah satu dari kebijakan pembangunan dan program kesehatan pertama yang dicanangkan adalah program pengendalian kelahiran di seluruh wilayah ini.[†] Dari awalnya program ini sarat dengan berbagai pelanggaran hak reproduksi perempuan. Kenyataan bahwa 80-90% penduduk Timor-Leste beragama Katolik berarti bahwa program ini secara budaya tidak bisa diterima oleh sebagian besar orang.[‡] Bukannya berusaha mendapatkan persetujuan dari para peserta, para administrator program ini justru menjalankannya sebagai sesuatu yang wajib dan tidak berusaha memberi informasi mengenai manfaat dan risikonya. Dalam keinginan besarnya untuk mencapai target "akseptor", para petugas program kuat menekan perempuan untuk menerima pengendalian kelahiran, dengan tidak mengindahkan akibat sampingan atau risiko-risiko kesehatannya. Sifat paksaan dari program ini diperkuat oleh peran penting yang dimainkan militer dalam pelaksanaannya.

93. Sementara aspek-aspek dari program ini juga ditemukan di seluruh Indonesia, dimensi pemaksaan terlihat lebih kuat dari biasanya di Timor-Leste. Ini karena militerisasi Indonesia mencapai wujudnya yang paling tinggi di Timor-Leste, dengan pemantauan dan pengawasan pada tingkat yang ekstrim, dalam suasana ketakutan dan intimidasi. Konsep "dwifungsi", yang

* Siaran pers UNICEF menyatakan bahwa kekurangan gizi di atas 15% dapat dianggap sebagai "keadaan darurat gizi yang berat". UNICEF, siaran pers, CF/DOC/PR/2000/03UNICEF, 18 Januari 2000, tersedia pada <www.unicef.org/newsline/00pr03.htm> per 3 Maret 2005.

[†] Program perencanaan keluarga di Indonesia dikenal sebagai KB (Keluarga Berencana) dan dikelola dari pusat oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

[‡] *Timor Timur dalam Angka*, 1981. Tidak jelas apakah angka-angka pemerintah mengenai agama juga mencakup agama anggota militer.

memberi ABRI/TNI peran pertahanan dan peran sipil, memberikan legitimasi pada peran utamanya dalam program ini, yang disebut “ABRI Manunggal KB”.^{*} Lagi-lagi “ABRI Manunggal KB” tidak hanya ada di Timor-Leste, tetapi yang membedakan operasinya di wilayah ini adalah keadaan keterlibatan militer dan dampak traumatis dari kehadirannya. Perilaku militer sejak invasi, termasuk perlakuan mereka terhadap perempuan, harus selalu diingat ketika kita berusaha memahami dampak dari keterlibatan ABRI dalam mempromosikan KB di Timor-Leste.

94. Komisi telah mencatat bagaimana militer Indonesia terlibat dalam memaksimalkan angka “akseptor”, yang menjadi indikator utama keberhasilan program ini. Lagi-lagi, program nasional juga bersifat mengejar target. Sebuah laporan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tahun 1995 mencatat bahwa “kompetisi antar daerah yang didasarkan atas jumlah ‘akseptor’ memberi prestise dan dapat membantu promosi jabatan pegawai, dan daerah-daerah dinilai dari delapan aspek keberhasilan, yang salah satunya adalah pencapaian kuantitatif keluarga berencana.”[†] Dalam kasus-kasus yang didokumentasi Komisi, perempuan-perempuan berbicara mengenai metode kontrasepsi yang diberikan kepada mereka yang sering berganti.¹⁰⁰ Menurut sebuah dokumen Bank Dunia, Laporan 7760, “akseptor kontrasepsi” didefinisikan sebagai angka perempuan (atau suaminya) yang menjadi pemakai metode kontrasepsi yang belum mereka pakai dalam bulan-bulan menjelang pemakaian, untuk jangka waktu tertentu.”¹⁰¹ Selain karena alasan medis, sangat mungkin bahwa para perempuan diganti dari satu metode ke metode yang lain karena setiap kali ini dilakukan mereka akan dicatat sebagai akseptor yang baru.

95. John Fernandes adalah seorang pegawai BKKBN di Kabupaten Manufahi mulai 1983 sampai 1999. Kritiknya mengenai program KB sama dengan yang dikemukakan banyak orang yang terkena langsung program ini yang dijalankan di Timor-Leste dan di Indonesia:

Pemerintah Indonesia lebih mengejar angka daripada melihat pada kondisi badan seseorang — apakah orang tersebut kurus [dan sebaiknya tidak ikut KB] atau ia gemuk [dan pantas untuk mengikuti KB]. Yang penting adalah mengejar target.

Saya berani mengatakan bahwa program KB dapat dikatakan paksa karena sudah diatur dari atas. KB merupakan program nasional...yang merupakan landasan/kekuatan hukum dari pemerintah, mulai dari provinsi sampai ke tingkat kabupaten. Mau tak mau masyarakat di Timor Timur harus mengikuti program sama seperti yang berada di provinsi lain.

...sangat jelas bahwa ABRI terlibat dalam promosi KB berdasarkan landasan surat keputusan Pangdam Udayana. Aparat Babinsa dan Bimpolda adalah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa [PPKBD] yang menerima honor sebanyak Rp. 3.000 per hari dari BKKBN. Pada saat promosi KB ke desa-desa, mereka berpakaian seragam lengkap sesuai dengan identitas mereka [TNI AD, Polri, dan sebagainya].

^{*} Ini merupakan variasi dari “ABRI Manunggal Rakyat,” yang merupakan nama untuk keterlibatan militer dalam proyek-proyek pembangunan desa.

[†] Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Laporan Pemerintah 2, Oktober 1995. Salah seorang pengamat independen juga berkomentar: “Keluarga Berencana dimasukkan dalam daftar sektor kebijakan terpilih, yang ditetapkan tahun 1982, untuk evaluasi prestasi gubernur. Para gubernur dinilai dari sembilan jenis target keluarga berencana, termasuk angka kelahiran kotor, jumlah pemakai aktif metode Keluarga Berencana, dan jumlah kelompok KB desa yang diciptakan.” Jeremy Shiffman, “Political Management in the Indonesian Family Planning Program”, *International Family Planning Perspectives*, Vol. 30 (1), Maret 2004.

Masyarakat, khususnya istri pegawai negeri sipil dan masyarakat yang tinggal di daerah transmigrasi, diwajibkan mengikuti program KB...Jumlah anak dalam keluarga pegawai negeri sipil tidak boleh lebih dari tiga orang karena jumlah itu yang sudah ditentukan di dalam daftar gaji. Kalau lebih dari tiga anak, maka anak itu akan disebut "anak Hansip" atau "anak swasta"...

Pemerintah dan ABRI juga memaksa masyarakat kecil yang tinggal di daerah terpencil untuk mengikuti program KB dengan alasan harus meningkatkan mutu pendidikan [anak-anak mereka] dan mengurangi angka kematian ibu dan anak. Tetapi dalam kenyataannya, setelah masyarakat mengikuti KB angka kematian ibu dan anak semakin tinggi dibandingkan dengan angka sebelumnya. [Ada kasus-kasus perempuan yang] setelah mengikuti KB ternyata pada waktu hamil timbul gejala-gejala seperti kepala pusing, hamil di luar kandungan/hamil anggur, banyak keputihan, kurang nafsu makan, kurus, bengkak pada tubuh, dan rematik. Ada juga kasus-kasus dimana pada saat mau melahirkan, air ketuban mengalir di luar dugaan. Bayi-bayi mereka menjadi korban dampaknya juga.¹⁰²

96. John Fernandes mengatakan bahwa BKKBN mempromosikan dan menjalankan pengendalian kelahiran dengan bekerja sama dengan ABRI melalui program KB Manunggal/KB Kes ABRI.* Program tingkat kabupaten ini dicanangkan oleh komandan dan biasanya dilaksanakan melalui Komando Militer Distrik (KODIM). Perempuan yang menjadi anggota Persit (Persatuan Isteri Tentara), adalah bagian tak terpisahkan dari program ini, dengan mengunjungi desa-desa mengenankan seragam Persit untuk merekrut para peserta baru. Mereka sendiri juga ikut dalam program:

Bukan hanya perempuan yang tidak ada hubungan dengan militer yang dipaksa ikut dalam program. Militer juga menaikkan angka akseptor dengan membuat perempuan di dalam struktur militer ikut serta. Walaupun anggota Persit, tidak berarti bahwa dia boleh tidak ikut dalam program. Sebaliknya, dia akan menjadi sasaran terdepan, yang ditekan baik langsung atau tidak langsung agar berpartisipasi.¹⁰³

97. Natalia dos Santos adalah istri anggota Batalyon Infanteri (Yonif) 744, Saturnino Maubuti, yang ketika tahun 1979 disuruh untuk ikut program KB. Natalia cukup berani berbantahan dengan dokter militer dari Jawa, bahwa sebagai perempuan yang belum punya anak, ia tidak wajib ikut program ini. Namun ketika dokter tersebut mengatakan bahwa ini adalah peraturan, ia menyadari bahwa jika terus menentang maka ini dapat membahayakan karir suaminya. Selama 20 tahun ia diberi berbagai jenis kontrasepsi, yang semuanya memiliki akibat sampingan yang tidak nyaman. Sekali-kali ia diam-diam berhenti menggunakan kontrasepsi karena ingin hamil atau untuk menghentikan akibat buruk yang dialaminya. Ia sempat hamil dua kali. Kehamilan yang pertama keguguran; yang kedua ia terpaksa aborsi setelah dokter mendiagnosa bahwa ia

* Kemungkinan besar yang dijelaskan John Fernandes adalah Program Safari Manunggal KB Kesehatan. Menurut definisi resmi BKKBN: "istilah 'safari' berarti kerjasama antara berbagai kantor tingkat desa dalam mendorong akseptor baru...Prakteknya, 'safari' adalah distribusi massal atau pemasangan massal alat-alat kontrasepsi, yang secara langsung melibatkan pejabat-pejabat lain dan dilakukan pada hari-hari khusus seperti Hari ABRI, Hari Ibu atau Hari Proklamasi." Lihat, misalnya, Nirwan Dewanto, "Coercion in Family Planning still exists in the Family Planning Movement," makalah disampaikan pada Konferensi INGI ke-8 tentang Masyarakat dalam Liberalisasi Ekonomi, Odawara, Japan, 21-23 Maret 1992; Sita Aripurnami, *Hak Reproduksi antara Kontrol dan Perlawanan: Wacana tentang Kebijakan Kependudukan Indonesia*, Kalyanamitra, Jakarta, 1999, halaman 36.

mengalami “rahim tipis”. Ia baru merasa bebas untuk meninggalkan KB setelah diungsikan ke Atambua, Timor Barat setelah referendum 1999, ketika program ini tidak lagi dijalankan dengan ketat. Dalam wawancaranya dengan Komisi, ia menyampaikan pengalamannya:

*Pada saat saya disuruh ganti-ganti menggunakan beberapa jenis KB oleh dokter, saya sangat tertekan, sebab saya dianggap sebagai hewan percobaan untuk mensukseskan KB. Namun saya tidak dapat berbuat banyak karena mengingat status suami saya; sehingga saya hanya rela untuk diperlakukan sesuai dengan kehendak mereka. Saya sangat kecewa karena sampai sekarang saya belum punya anak. Dampak dari beberapa jenis KB yang saya jalani adalah saya mengalami gatal di bagian vagina...dan badan saya semakin hari semakin kurus.*¹⁰⁴

98. Ketakutan Natalia bahwa jika ia menolak ikut program ini dapat membawa akibat yang serius cukup beralasan. Kaum perempuan didorong untuk bergabung melalui sebuah sistem imbalan dan hukuman. John Fernandes menjelaskan bagaimana jatah beras yang diterima keluarga pegawai negeri dari pemerintah tergantung pada berapa anak yang mereka punya. Insentif yang lain termasuk pemberian bea siswa bagi anak-anak dari keluarga peserta KB.¹⁰⁵

99. Ada juga insentif negatif. Seperti Natalia, Lucia Maria Pereira memahami bahwa suaminya, Carlito das Regras, seorang anggota Hansip dari Same, dapat dihukum jika ia tidak setuju menggunakan kontrasepsi. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa istri-istri Hansip di Same dipaksa untuk ikut program itu, tanpa mengindahkan apakah mereka masih atau tidak lagi dalam usia bisa hamil. Jika seorang istri menolak ikut serta, tentara Indonesia akan memasukkan suaminya ke dalam air.¹⁰⁶ Hukuman lainnya, yaitu tidak dinaikkan pangkat, dialami oleh Florindo da Conceição Mendonça Da Costa. Selama enam tahun, dari 1980 sampai 1986, Florindo dan istrinya, Raimunda Da Conceição, tidak mau ikut dalam program itu. Selama waktu itu ia pangkatnya tetap prajurit satu, sementara rekan-rekannya, yang istrinya ikut keluarga berencana, telah naik pangkat. Pada tahun 1986, suami-istri itu akhirnya memutuskan untuk tunduk. Raimunda mendaftarkan diri dalam program keluarga berencana. Suaminya segera mendapat kenaikan pangkat dan naik terus sampai akhirnya menjadi sersan mayor pada tahun 1999. Tetapi, keputusan ini berakibat menyakitkan bagi Raimunda. Ia diberi susuk, pil, dan spiral tetapi semuanya mempunyai akibat sampingan yang buruk. Pada permulaan tahun 1989, tidak lama setelah ia mulai menggunakan spiral, ia jatuh pingsan:

Untung suami saya pas pulang dari kantor. Begitu melihat saya tergeletak di lantai, ia langsung membawa saya ke Puskesmas Oecusse Kota serta mencari dokter agar bisa memberikan P3K [pertolongan pertama]. Akan tetapi dokter tidak menghiraukan, sehingga sempat terjadi sedikit kekacauan dan keributan di Puskesmas. Suami saya memberikan ancaman ultimatum kepada dokter itu, “Kalau terjadi sesuatu pada istri saya, maka kamu yang bertanggung jawab.” Pada awalnya dokter itu tidak mau mengeluarkan jenis KB itu [spiral] dari tubuh saya, akan tetapi suami saya tetap bersikeras dan menuntut mereka untuk membuat surat rujukan ke Rumah Sakit Umum Oecusse agar secepatnya harus mengeluarkan jenis KB itu dari tubuh saya. Saat itu ada dua orang bidan...yang mengeluarkan KB itu dari tubuh saya.

100. Baru setelah itu Raimunda diberi kontrasepsi suntik, dan ia tidak mengalami akibat sampingan. John Fernandes berpendapat bahwa kelalaian tidak mengobati akibat sampingan

seperti yang diderita Raimunda mungkin merupakan kelalaian yang sistematis. Ia juga berkata bahwa jika ada akibat sampingan perawatan dilakukan secara diskriminatif, perempuan Indonesia lebih diutamakan daripada perempuan Timor-Leste:

...untuk mengobati efek samping dari KB tersebut sebenarnya sudah ada obat khusus dari pusat, tetapi para perawat/bidan yang bekerja di rumah sakit pilih muka, obat itu khusus diberikan kepada para istri orang Indonesia, sedangkan orang Timor-Leste sendiri yang menderita efek samping dibiarkan saja.

101. Sering ada tuduhan bahwa tujuan Indonesia menjalankan program keluarga berencana bukanlah untuk memperbaiki kesehatan perempuan Timor-Leste, tetapi untuk mencapai tujuan yang lebih buruk.¹⁰⁷ Tuduhnya adalah bahwa program itu dimaksudkan sebagai bagian dari strategi genosida yang bertujuan memusnahkan penduduk asli yang sudah sangat berkurang jumlahnya akibat adanya pemindahan penduduk dan kelaparan, dan memindahkan lebih banyak transmigran ke wilayah ini.⁷ Tuduhan lain yang pernah disampaikan adalah bahwa sterilisasi paksa pernah dilakukan tanpa pengetahuan atau persetujuan si perempuan. Komisi telah menyelidiki tuduhan-tuduhan yang serius ini. Komisi tidak menemukan adanya bukti untuk mendukung tuduhan-tuduhan ini. Memang pada dasawarsa 1980-an anak perempuan Timor-Leste diberi tiga kali suntikan dalam waktu satu tahun. Anak laki-laki dan anak perempuan Indonesia yang usianya sama tidak dimasukkan dalam program itu. Baik anak-anak perempuan itu atau pun orang tua mereka tidak diberi penjelasan apa pun mengenai penyuntikan itu kecuali bahwa suntikan itu “baik untuk kesehatan mereka”, dan penyuntikan itu dilakukan secara paksa. Isabel Galhos menceritakan apa yang terjadi padanya ketika ia masih duduk di kelas empat sekolah dasar:

[Adik perempuan, kakak laki-laki, dan saya] bersekolah di SD Tuana Laran, Vila Verde dekat katedral [Dili]...Tidak diumumkan kami ada suntikan seperti itu. Tidak ada...Waku itu siang, kami semua sudah mau pulang, sekitar jam 11.00 kalau tidak salah. Kami sudah mau pulang, tiba-tiba pintu semua tertutup, jendela juga ditutup...[murid] yang laki-laki sudah keluar, perempuan tinggal di dalam...kami teriak di dalam karena tiba-tiba pintu, jendela ditutup. Para guru, yang khususnya laki-laki, masuk bersama ibu kepala sekolah. Kami langsung disuntik...[Kami] kabur, lari sana, lari sini, ditangkap, dipegang baru disuntik...Saya memang orangnya takut sekali pada suntikan. Saya dipegang [oleh dua orang laki-laki]. Mereka bilang, “Kalau kamu tidak mau, paha saja disuntik.” Perempuan, kami semua disuntik.¹⁰⁸

102. Sejumlah orang Timor-Leste mengambil kesimpulan bahwa anak-anak perempuan itu diberi suntikan sterilisasi. Bahkan orang Timor-Leste yang terkemuka pun menaruh kecurigaan. Mantan Gubernur Timor Timur, Mário Carrascalão, mengatakan kepada Komisi bahwa pada permulaan dasawarsa 1980-an (ia tidak ingat tanggalnya) ia menerima kunjungan dari beberapa orang tua murid yang ingin tahu mengapa anak perempuan mereka yang dalam usia anak sekolah diberi suntikan dan apakah suntikan itu untuk sterilisasi. Ia kemudian bertanya kepada kepala dinas kesehatan setempat, seorang Indonesia, mengapa hanya anak-anak perempuan yang disuntik dan mengapa program itu dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Pejabat itu

⁷ Sarah Storey menyatakan: “Kebijakan pengendalian kelahiran yang bersifat memaksa yang diterapkan pada Timor-Leste oleh Indonesia, ketika dipadukan dengan strategi pemindahan pendatang baru Indonesia ke Timor-Leste, secara pelan-pelan akan mencegah segala tuntutan atas hak penentuan nasib sendiri di Timor-Leste dalam jangka panjang.” Storey, “Coercive Birth Control,” halaman 1.

mengatakan bahwa anak-anak itu diberi suntikan anti tetanus, tetapi tidak dapat menerangkan mengapa dilakukan secara rahasia atau meredakan kecurigaan bahwa pemerintah sedang mengadakan program sterilisasi percobaan. Uskup Belo berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang tidak terdaftar dalam program Keluarga Berencana, apapun sebabnya, secara rutin disterilkan ketika mereka masuk rumah sakit untuk menjalani operasi. Menurut Isabela Galhos, Uskup Belo mengeluarkan surat pastoral mengenai hal ini.¹⁰⁹

103. Komisi berkonsultasi dengan Dr. José Guterres, dari Family Health International^{*} untuk meminta penjelasan mengapa para petugas kesehatan mengkhususkan anak-anak perempuan Timor-Leste untuk diberi imunisasi dengan cara yang disampaikan oleh Isabela Galhos. Dr. Guterres mengatakan bahwa panduan WHO (Organisasi Kesehatan Sedunia) menganjurkan bahwa anak-anak perempuan di negara-negara yang sedang berkembang, yang menghadapi risiko besar terkena tetanus pada waktu melahirkan, perlu diimunisasi terhadap tetanus dengan jadwal seperti berikut:

- Imunisasi pertama sedini mungkin pada umur seseorang dapat melahirkan atau secepat mungkin selama kehamilan;
- Imunisasi kedua paling sedikit empat minggu setelah imunisasi pertama;
- Imunisasi ketiga paling sedikit enam bulan setelah imunisasi kedua.

104. Karena itu, menurut Dr. Guterres, jadwal yang dikatakan oleh perempuan-perempuan yang telah disuntik itu sesuai dengan panduan WHO untuk mencegah tetanus. Dr. Guterres juga berpendapat bahwa pada prinsipnya memang masuk akal jika anak-anak perempuan Indonesia tidak disuntik karena mereka kemungkinan telah mendapat suntikan anti tetanus sebagai bagian dari program imunisasi ketika mereka masih kanak-kanak, sedangkan anak-anak Timor-Leste, terutama yang pada waktu mereka berusia di bawah lima tahun ikut melarikan diri ke hutan, mungkin sekali belum pernah diimunisasi.

105. Tuduhan bahwa program KB bertujuan untuk mengurangi penduduk Timor-Leste agar jumlah penduduk transmigran dapat ditambah tidak didukung oleh kesaksian Carlito das Regras, yang mencatat bahwa seperti istri-istri tentara, transmigran juga diharuskan melakukan pembatasan kelahiran. Dalam hal para transmigran, persetujuan mereka untuk ikut dalam program itu merupakan prasyarat sebelum diterima sebagai transmigran.¹¹⁰

106. Akhirnya, suatu bukti yang paling menentukan bahwa tidak ada program sterilisasi paksa adalah bahwa perempuan Timor-Leste, termasuk yang sudah disuntik pada awal dasawarsa 1980-an dalam keadaan yang diuraikan di atas, tidak menjadi mandul sebagai akibatnya.¹¹¹

107. Memang tuduhan-tuduhan mengenai sterilisasi paksa mungkin tidak terbukti, tetapi apa yang tidak dapat disangkal adalah bahwa cara program imunisasi itu dilaksanakan sama sekali tidak mengurangi ketakutan mendalam orang Timor-Leste mengenai kegunaannya. Seperti dikatakan oleh Miranda Sissons:

Apakah desas-desus meluas mengenai penyuntikan paksaan itu beralasan atau tidak, serangkaian kejadian ini menyebabkan kebanyakan perempuan Timor-Leste sangat mencurigai segala jenis penyuntikan, termasuk yang dijalankan dalam program vaksinasi biasa oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, anak-anak perempuan dikeluarkan oleh orang tuanya dari sekolah menengah sebagai akibatnya.¹¹²

^{*} Dr. José Guterres menyelesaikan pendidikan kedokteran di satu universitas di Indonesia dan pernah berpraktek di satu pos kesehatan di Ainaro.

108. Luasnya keyakinan di kalangan orang Timor-Leste bahwa orang Indonesia berusaha mengurangi pertumbuhan penduduk sebagai bagian dari strategi genosida jelaslah sangat menambah rasa tidak senang terhadap pendudukan dan rasa tidak percaya pada maksud-maksud pemerintah Indonesia berkenaan dengan kesejahteraan rakyat Timor-Leste. Selain itu, tuduhan ini, paling sedikit, menggambarkan kurangnya informasi yang diberikan kepada pasien dalam sistem pelayanan kesehatan yang caranya paternalistik. Kurangnya informasi dan pendidikan kesehatan ini menyebabkan tidak mungkin memperoleh persetujuan pasien yang biasanya diberikan setelah menerima informasi, dan semakin memperdalam suasana ketakutan yang menyelimuti mereka. Tidak adanya rasa percaya kepada staf dan pelayanan kesehatan Indonesia juga berakibat pada kesehatan penduduk pada umumnya, karena mereka menjadi enggan mencari perawatan atau nasihat kesehatan untuk mencegah penyakit.

Kesehatan Jiwa dan Trauma

109. Trauma psikologis adalah salah satu dari warisan yang bertahan lama dari setiap konflik. Komisi tidak dapat menaksir banyaknya orang yang menjadi sasaran, atau menyaksikan atau dipaksa melakukan tindakan-tindakan kekerasan ekstrem, termasuk penyiksaan, perkosaan, dan pembunuhan. Pemboman dari udara selama berbulan-bulan dan kematian besar-besaran yang diakibatkannya masih terus menghantui mereka yang dulu mencari perlindungan di gunung-gunung. Sejumlah besar orang yang pernah terpaksa meninggalkan rumah mereka, banyak diantaranya yang berkali-kali demikian. Puluhan ribu orang rumahnya dibakar dan miliknya dijarah atau dimusnahkan, banyak yang mengalaminya lebih dari sekali. Banyak saksi yang mengatakan kepada Komisi bahwa mereka dengan terpaksa meninggalkan anak-anak dan orang-orang tua sehingga mati, karena mereka terpaksa melarikan diri dari serangan militer Indonesia dan kaki tangannya.

110. Penelitian dari negeri-negeri lain yang telah keluar dari konflik menunjukkan bahwa antara 1% dan 2% dari mereka yang menderita trauma yang diakibatkan oleh perang akan menderita gangguan jiwa yang berat. 5-15% lainnya akan menderita gangguan tekanan jiwa pasca trauma (*post-traumatic stress disorder* atau PTSD), yang tampak dari berbagai macam gejala, dari depresi jangka panjang sampai gangguan tidur. PTSD dapat segera menghinggapi penderita, atau baru muncul setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun setelah kejadiannya. Penduduk selebihnya akan pulih dengan bantuan mekanisme-mekanisme pendukung dari masyarakat atau keluarga, pengobatan tradisional, kepercayaan dan ritual agama – atau semata-mata karena kehidupan sehari-hari, dimana pekerjaan berperan menentukan untuk memulihkan jati diri mereka.¹¹³

111. Pada tahun 2000, suatu survei permulaan yang independen mengenai trauma dan penyiksaan dilakukan di komunitas-komunitas di semua distrik di Timor-Leste, dengan mewawancarai kepala-kepala keluarga. Dari 1.033 responden yang disurvei, 97% mengatakan mereka mengalami kejadian traumatis dan 34% digolongkan menderita PTSD.¹¹⁴ Sebagian dari temuan-temuannya adalah:

- 76% mengalami situasi pertempuran
- 64% mengalami kehilangan tempat tinggal
- 60% mengalami keadaan tidak sehat tanpa mendapat perawatan medis
- 57% mengalami sesuatu jenis penyiksaan*
- 31% kehilangan ayah karena kekerasan politik
- 24% kehilangan ibu karena kekerasan
- 22% menyaksikan pembunuhan anggota keluarga atau teman
- 22% mempunyai anak yang terluka atau terpisah dari mereka
- 14% kehilangan suami/istri akibat kekerasan
- 12% kehilangan anak akibat kekerasan
- 20% merasa yakin bahwa diri mereka tidak akan pulih dari pengalaman-pengalaman mereka
- 41% merasa yakin bahwa mereka hanya akan sembuh jika mendapat pertolongan.

112. Sebagian dari peristiwa-peristiwa ini merupakan bagian dari kedukaan perang. Tetapi, lain-lainnya merupakan hasil dari kebijakan keamanan yang semena-mena yang dijalankan oleh pihak militer Indonesia, yang dengan sengaja dirancang untuk merugikan kesehatan kejiwaan orang-orang yang dicurigai melawan pendudukan. Teknik-teknik penyiksaan dalam tahanan, selain untuk menimbulkan rasa sakit yang tidak terbayangkan, pada intinya dirancang untuk membuat si tahanan merasa sama sekali tidak berdaya dan tergantung sepenuhnya pada kemauan si penahan, dan untuk menghancurkan harga diri dan keamanan pribadinya. Akibat jangka panjang dari perlakuan semacam itu tidak dapat dianggap enteng. Di kalangan penduduk pada umumnya, suasana ketakutan diciptakan secara sengaja dan sistematis sebagai bagian dari kebijakan terorisasi. Tidak ada contoh yang lebih jelas lagi dari kebijakan yang akibatnya membawa kemunduran dalam merealisasikan hak akan standar kesehatan jiwa yang dapat dicapai setinggi mungkin. Pemindahan paksa besar-besaran, masa ketidakpastian makanan dan kelaparan yang parah yang berlangsung lama, terpisah dari keluarga, dan pemerintah yang otoriter juga memberikan tekanan kejiwaan dan perasaan yang berat pada anggota-anggota masyarakat.

113. Keparahan dari pelanggaran-pelanggaran hak atas kesehatan dibuat lebih buruk lagi oleh kegagalan pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Di masa pendudukan Indonesia, tidak ada pelayanan kesehatan jiwa, dan menurut sejumlah sumber, gangguan jiwa tidak dianggap sebagai masalah kesehatan.¹¹⁵ Komisi tidak mendengar adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan kesehatan jiwa di Timor-Leste, baik melalui pelayanan resmi di rumah sakit maupun berupa konseling.

Perekrutan Paksa

Perekrutan paksa oleh TNI, sebagai “tenaga bantuan operasi” (TBO) dan sebagai perisai manusia, dalam operasi-operasi untuk menghalau keluar gerilya, yang paling terkenal di antaranya adalah Operasi Keamanan, telah dibahas di bagian lain dalam laporan ini (Lihat 3.11: Operasi Keamanan; 7.5: Pelanggaran Hukum Perang; dan 7.8: Pelanggaran Hak Anak).

Komisi mendokumentasikan 2.157 kasus perekrutan paksa. Seperti diperlihatkan Bagan <g122Mhrvd2100.pdf>, sebagian terbesar kasus ini dilaporkan terjadi pada 1999 dan 1977-1984. Analisis mengenai korban perekrutan paksa mengungkapkan bahwa 92,1% (1987/2157) adalah

* Hanya 5% dari responden yang mengatakan bahwa mereka diperkosa, tapi perkosaan adalah tindak kejahatan yang seringkali tidak dilaporkan (lihat Bab 7.7: Kekerasan Seksual).

laki-laki dan kelompok umur yang paling banyak adalah umur berdinam militer (antara 20 dan 34 tahun). Akan tetapi, dibandingkan dengan jumlah penduduk, laki-laki dalam kelompok umur 50-54 adalah tingkat perekrutan paksa yang paling tinggi yang dilaporkan. Dari perekrutan paksa yang didokumentasikan oleh Komisi, pertanggungjawaban kelembagaan hampir sepenuhnya ada pada militer dan polisi Indonesia, serta orang-orang Timor-Leste kolaborator mereka. Ini diperlihatkan dalam Bagan <gpMpevlN2100.pdf>.

Pernyataan-pernyataan naratif yang diterima oleh Komisi mengungkapkan bahwa orang-orang yang direkrut paksa, seperti sebagai TBO, pada umumnya tidak mendapat bayaran atas pekerjaannya dan kebanyakan diambil dari rumah dan keluarga mereka selama beberapa bulan untuk sekali waktu, dalam sebagian kasus bahkan selama lebih dari satu tahun. Korban-korban perekrutan paksa utamanya adalah yang berada dalam usia produktif dalam kehidupan mereka dan, dalam banyak kasus, adalah penanggungjawab kehidupan keluarga mereka. Oleh karena itu kebijakan resmi pemerintah ini merupakan langkah mundur dalam hal hak untuk memiliki pekerjaan dan menerima upah yang layak, serta hak untuk mendapatkan penghidupan.

Lebih jauh, perekrutan paksa punya dampak memundurkan hak atas kesehatan. TBO dan orang-orang lain yang direkrut paksa dihadapkan pada keadaan yang keras dan sering membahayakan. Mereka berjalan menempuh jarak yang jauh membawa beban yang berat, dan sering kali terperangkap dalam tembak-menembak. Juga ada laporan-laporan bahwa TBO digunakan sebagai perisai hidup, dipaksa berjalan di depan kesatuan mereka ketika berpatroli. Ada sejumlah kecil laporan tentang kematian dalam tembak-menembak, dan orang-orang yang direkrut paksa juga mati karena kelaparan, kelelahan, dan penyakit.

Terakhir, ketika anak-anak direkrut, kebijakan dan prakteknya jelas melanggar hak mereka atas pendidikan. Salah satu tujuan eksplisit hak atas pendidikan adalah melindungi anak-anak dari kerja eksploitatif dan membahayakan. Kebijakan militer merekrut anak-anak, banyak di antaranya dalam usia muda 12 dan sebagian bahkan sepuluh tahun, untuk membantu dalam operasi-operasi tempur, mencapai tujuan sebaliknya, dengan secara sengaja membahayakan anak-anak tersebut. Komisi menemukan bahwa suatu panduan militer, yang menyatakan bahwa TBO harus dikembalikan ke sekolah setelah masa dinas selesai, sering dilanggar: dalam prakteknya, mereka bisa saja dibiarkan terlantar atau diculik dibawa ke Indonesia untuk dipekerjakan sebagai pelayan para prajurit yang sebelumnya mereka bantu.

7.9.4 Hak atas Pendidikan

Hak atas Pendidikan

Pendidikan, seperti juga kesehatan, adalah hak yang mutlak untuk realisasi hak-hak lainnya, dan sangat penting baik bagi perorangan maupun masyarakat. Komentar Umum 13 dari Committee on Economic, Social and Cultural Rights (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) menyatakan bahwa:

*Pendidikan adalah sarana utama yang dengannya orang dewasa maupun anak-anak yang secara ekonomi dan sosial terpinggirkan, dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan mendapatkan jalan untuk ikut serta secara penuh dalam kehidupan komunitasnya.*¹¹⁶

Hak atas pendidikan memiliki 'ciri-ciri mutlak', yaitu ketersediaan (*availability*), bisa didapatkan (*accessibility*), bisa diterima (*acceptability*), dan bisa disesuaikan (*adaptability*).

- "Ketersediaan" oleh Komite diukur dari jumlah dan mutu pengajaran, termasuk bangunan, fasilitas sanitasi dan air minum, selain guru-guru yang terlatih yang mendapat gaji yang baik di dalam negerinya, bahan-bahan pengajaran, dan sebagainya.¹¹⁷
- "Bisa didapatkan" ditafsirkan dalam pengertian fisik maupun ekonomi, dan tanpa diskriminasi atas dasar apapun yang telah dilarang.¹¹⁸
- "Bisa diterima" mengharuskan pendidikan bersifat relevan, sesuai dengan budaya setempat, dan bermutu tinggi.¹¹⁹
- "Bisa disesuaikan" mengharuskan pendidikan untuk tidak kaku sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan siswa-siswa dalam lingkungan sosial dan budaya yang berbeda-beda.¹²⁰

Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya menyatakan prinsip keseluruhan bahwa:

Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan harkatnya, dan harus memperkuat penghormatan kepada hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. [Negara-Negara Penandatangan] selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan di antara semua bangsa dan segala kelompok ras, etnis, dan agama, dan melanjutkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.¹²¹

114. Kecuali pada dasawarsa terakhir pemerintahan kolonial Portugis, pendidikan tidak tersedia bagi kebanyakan penduduk Timor-Leste. Seperti halnya dengan sistem kesehatan, sistem pendidikan di bawah pemerintah Portugis pertama-tama hanyalah untuk memenuhi kebutuhan golongan elit kolonial dan pribumi.¹²² Sekolah menengah dapat dikatakan tidak ada selama sebagian besar periode penjajahan.¹²³

115. Tetapi, pada permulaan dasawarsa 1960-an, kebijakan Portugis berubah dan program pembangunan sekolah dilaksanakan. Dorongan utama dari perubahan ini adalah pemberontakan tahun 1959, yang diyakini oleh negara tidak akan sampai terjadi jika rakyat tidak demikian "terbelakang". Saldanha mencatat bahwa dari permulaan dasawarsa 1960-an sampai akhir masa kolonial, Gereja Katolik maupun pemerintah Portugis menggunakan pendidikan "sebagai strategi psiko-sosial" (*acção psico-social*) untuk mengambil hati rakyat.¹²⁴ Pandangan mengenai pendidikan sebagai cara "mengambil hati dan pikiran rakyat" juga merupakan alasan eksplisit program pembangunan Indonesia.

116. Dari 4.898 pada tahun ajaran 1959/1960, jumlah murid sekolah dasar meningkat menjadi 57.579 pada tahun ajaran 1971/1972, sementara jumlah murid sekolah menengah meningkat dari 175 menjadi 1.275 pada periode yang sama. Tetapi, bahkan setelah adanya investasi ini, karena mulai dari dasar yang sangat rendah, pada waktu invasi Indonesia lebih dari 90% penduduk buta huruf.¹²⁵

117. Konsolidasi penguasaan Indonesia atas wilayah ini pada akhir 1979 segera disusul oleh kenaikan pesat investasi yang dimaksudkan untuk membawa pembangunan di Timor-Leste pada tingkat yang sejajar dengan wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Salah satu prioritas utama dari program pembangunan untuk Timor-Leste adalah sektor pendidikan.[†] Investasi segera diarahkan untuk pembangunan sekolah-sekolah dan mendatangkan guru-guru dari Indonesia untuk

[†] KORPRI, *20 Tahun Timor Timur Membangun, 1996*, secara khusus mencatat perlunya "Pendekatan Keamanan-Kesejahteraan" ABRI diimbangi dengan "Pendekatan Psikologis-Budaya" untuk mencapai stabilitas dan mengatasi perlawanan (halaman 240).

[†] BAPPEDA Tingkat I Timor Timur dan Universitas Kristen Satya Wacana, *Evaluasi Repelita IV Daerah Timor Timur*, UKSW, Salatiga, 1988, dikutip dalam Saldanha, halaman 144.

meningkatkan pendaftaran masuk sekolah. Rp. 3,3 milyar disediakan untuk pendidikan pada tahun anggaran 1982/83-1988/89.^{*} Dari segi jumlah yang masuk sekolah, hasilnya sangat menonjol (lihat Tabel 9). Jumlah murid sekolah dasar naik menjadi 167.181 pada tahun 1998. Ini berarti 70% dari anak usia sekolah telah masuk sekolah. Setiap desa memiliki paling sedikit satu sekolah dasar (walaupun tidak semuanya berfungsi). Ada 6.672 guru sekolah dasar yang mengajar di 788 sekolah dasar.¹²⁶ Terjadi kenaikan yang mencolok sekali jumlah sekolah menengah: pada tahun 1998 ada 114 sekolah menengah pertama, 37 sekolah menengah atas dan 17 sekolah menengah kejuruan. Pada tahun itu pula, ada 32.197 murid di sekolah menengah pertama dan 18.973 di sekolah menengah atas. Didirikan juga sebuah universitas. Lajunya peningkatan ini menimbulkan persoalan kekurangan guru, terutama pada sekolah menengah dan perguruan tinggi, dimana kurangnya guru-guru paling terasa.¹²⁷

Table 10 - Murid dan Guru di Timor-Leste 1998/1999

	Sekolah	Murid	Jumlah Guru	Guru orang Timor-Leste	Perbandingan Murid & Guru
Taman Kanak-kanak	66	2.168	183	30	12
Dasar	788	167.181	6.672	5.172	25
Menengah Pertama	114	32.197	1.963	65	16
Menengah Atas	37	14.626	1.059	87	14
Menengah Atas Kejuruan	17	4.347	478	55	9
Universitas	1	3.498	78	36	45
Politeknik	1	450	160	60	3
Institut Pertanian	1	260	16	2	16
Sekolah Ekonomi	1	473	32	17	15
Pelatihan Guru	1	40	7	1	6
Sekolah Kesehatan	1	400	32	12	13
Total	1.028	225.640	10.680	5.537	16

Sumber: BPS 1997, 1999; Sousa, 1999, dikutip dalam Pedersen dan Arneberg, halaman 91.

118. Walaupun tingginya kenaikan jumlah pendaftaran murid ini, kira-kira 30% anak-anak usia sekolah dasar (7-12 tahun) tidak terdaftar di sekolah pada tahun 1998. Ini sebagian disebabkan oleh terlambatnya pendaftaran dan tingginya angka yang mengulang kelas.¹²⁸ Biaya langsung pendidikan juga tinggi. Pada tahun 1995, untuk 20% penduduk yang termiskin, pengeluaran bulanan untuk pendidikan adalah US\$ 0,82 per orang (dihitung dengan nilai tukar uang tahun 2001).¹²⁹

119. Seperti halnya dengan bidang kesehatan, investasi yang besar untuk pendidikan meningkatkan tersedianya gedung dan sarana, tetapi tidak menghasilkan perbaikan mutu. Pada tahun 1998, persentase penduduk usia kerja yang tidak pernah menerima pendidikan masih 58% di Timor-Leste dibandingkan dengan 18% di Timor Barat.[†] Setelah 20 tahun investasi yang sangat besar, jumlah orang yang bisa baca-tulis banyak bertambah tetapi masih hanya 40%. Dengan demikian tingkat kemampuan baca-tulis di Timor-Leste adalah yang paling rendah dari semua provinsi di Indonesia dan dari semua negara di kawasan Asia Pasifik.¹³⁰

^{*} Karena tingginya tingkat korupsi dana yang dialokasikan dari pusat ini, tidak diketahui berapa yang sebenarnya dikeluarkan untuk sektor pendidikan. Lihat surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Presiden Soeharto yang mengungkapkan secara rinci sebagian dari kesalahan alokasi ini, dikutip dalam Bagian 7:7.3 Pemindahan Paksa dan Kelaparan.

[†] SUSENAS 1998. Gomes mengutip persentase ini bukan untuk golongan "tidak pernah sekolah" seperti aslinya, tetapi sebagai "buta huruf". Namun, angka buta huruf yang sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, karena sekolah belum tentu menjamin kemampuan baca-tulis. Gomes, halaman 205.

120. Mutu pengajaran merupakan bagian dari persoalan pendidikan. Antara 1983 dan 1998, terjadi kenaikan besar jumlah guru, kebanyakan datang dari Indonesia. Tetapi, perbandingan antara murid dan guru masih tinggi di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan terutama perguruan tinggi (lihat Tabel 9). Selain itu, sebagian besar tidak memiliki kualifikasi minimal untuk mengajar. Selain itu, seperti halnya dengan petugas kesehatan, banyak dari guru-guru itu ditugaskan ke Timor-Leste segera setelah lulus dari pendidikan di Indonesia. Banyak dari mereka tidak suka tinggal di desa tempat mereka ditempatkan. Banyak yang mengambil pekerjaan kedua untuk menambah gajinya yang rendah (antara US\$ 28-145 per bulan pada tahun 1999).¹³¹ Akibatnya, guru sering tidak datang mengajar.¹³² Pengajaran dilakukan dalam bahasa Indonesia, yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh murid,¹³³ tidak seperti di Indonesia, bahasa-bahasa daerah dilarang digunakan di sekolah-sekolah, walaupun bahasa Tetun masih boleh digunakan sampai kelas 3 sekolah dasar untuk mempermudah pengajaran yang akan dilakukan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia.¹³⁴ Buku-buku atau alat bantu mengajar tidak banyak, sehingga kemajuan murid hampir seluruhnya tergantung pada guru-guru mereka yang berbeda-beda mutunya.¹³⁵

Table 11 - Kemiskinan dan Tingkat Pendidikan di Timor-Leste

	20% Termiskin	21-40%	41-60%	61-80%	20% Teratas	Rata
Tidak sekolah	75	71	67	49	28	58
Sekolah Dasar tidak tamat	13	13	11	14	8	12
Tamat Sekolah Dasar	7	8	11	12	13	10
Sekolah Menengah Pertama	3	4	5	7	10	6
Sekolah Menengah Atas +	2	4	6	18	41	14
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber: Pedersen dan Arneberg, halaman 108.

121. Seorang peneliti yang mewawancarai orang Timor-Leste yang dibesarkan selama masa pendudukan, mencatat bahwa mereka sering menggambarkan pengalaman mereka di sekolah-sekolah Indonesia sebagai faktor penting yang mempengaruhi perkembangan pandangan pro-kemerdekaan:

Hampir semua orang yang diwawancarai berbicara mengenai buruknya mutu pendidikan yang diberikan oleh Indonesia. Ini terutama terjadi di luar kota Dili. Di wilayah Ponta Leste...Honório de Araújo mengenang kembali ketika ia tamat sekolah waktu berumur 13 tahun, "Tidak ada sama sekali yang berharga dalam otak saya. Pendidikan itu sangat primitif, anak-anak dihukum secara fisik. Selalu saja dilakukan hukuman badan. Seperti pendidikan militer, sangat keras dan kasar."¹³⁶

122. Selain rendahnya mutu sarana dan pengajaran, persoalan mendasar pada sistem pendidikan di bawah Indonesia adalah apa yang diajarkan. Bukannya memfokuskan pada kebutuhan dasar pembelajaran,[†] kurikulum jelas-jelas diarahkan untuk propaganda pro-

[†] Perkiraan berkisar antara 30% (Gomes 1999), sampai 90% bagi guru sekolah dasar yang tidak memiliki kualifikasi mengajar. J. N. D. Carvalho, "Strategic Development Planning for East Timor; Education, Culture, Environment," makalah tidak diterbitkan, konferensi tentang *Strategic Development Planning for East Timor*, Melbourne, 5-9 April 1999.

[†] Deklarasi Dunia Pasal 1 mendefinisikan "kebutuhan pembelajaran dasar" sebagai kemampuan baca-tulis, menghitung, pengungkapan lisan, dan kemampuan memecahkan masalah. Komite untuk HSEB Komentari Umum 13, paragraf 9, lebih

Indonesia. Kurikulum dipandu oleh tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana diuraikan dalam Undang Undang No. 2/1989:

- pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri;
- pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh;
- terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.¹³⁷

123. Masalah-masalah kelembagaan yang diuraikan di atas dan kurikulum yang di dalamnya indoktrinasi memainkan peran yang besar tidak hanya terdapat di Timor-Leste; hal-hal ini pada kenyataannya biasa dalam pendidikan Indonesia. Pembacaan lima sila Pancasila setiap pagi merupakan upacara sehari-hari di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dan mata pelajaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) merupakan keharusan untuk lulus dari sekolah dasar dan menengah. Pelajaran menghafal slogan-slogan dan lagu-lagu nasional, pengajaran sejarah versi yang telah disahkan pemerintah, menurut pada yang berwenang dan hormat tanpa boleh mempertanyakan yang berkuasa ditekankan dengan mengorbankan pengembangan keterampilan dasar, khususnya pemikiran kritis dan pemecahan persoalan. Kerusuhan-kerusuhan komunal di Indonesia sering secara resmi diterangkan sebagai akibat dari kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip yang mendasari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini biasanya diikuti oleh pernyataan-pernyataan resmi aparat pemerintah mengenai perlunya rakyat setempat diberi pendidikan yang lebih baik mengenai Pancasila dan Wawasan Nusantara.

124. Tetapi, seperti halnya dengan program pengendalian kelahiran, konteks invasi dan pendudukan menambah dimensi tambahan pada kebijakan-kebijakan ini. Meski secara eksplisit penggunaan propaganda dalam konteks pendidikan bertentangan dengan jiwa dari hak atas pendidikan dalam konteks apapun,[†] dalam sesuatu wilayah pendudukan, indoktrinasi yang bertujuan memajukan tujuan-tujuan integrasionis dari penguasa pendudukan jadinya lebih banyak bernuansa penindasan.

125. Dokumen-dokumen militer dan laporan-laporan pemerintah menekankan perlunya "memasyarakatkan" pembangunan, yang dilukiskan sebagai salah satu dari dua cara untuk mengatasi perlawanan terhadap integrasi dengan Indonesia (yang lainnya adalah Pendekatan Pertahanan Keamanan).¹³⁸ Militer mempunyai tanggung jawab menjalankan kedua pendekatan ini. Di banyak daerah pedesaan anggota-anggota militer merangkap sebagai guru.¹³⁹

lanjut menyatakan bahwa pendidikan "harus...mempertimbangkan budaya, kebutuhan, dan kesempatan masyarakat." Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Konferensi Seluruh Dunia, Thailand, 5-9 Maret 1990.

^{*} Carol Warren mengkaji pendekatan Orde Baru dalam melembagakan ideal-ideal Pancasila melalui kurikulum sekolah yang mencakup "Pendidikan Moral Pancasila" dan permainan-permainan peran untuk penduduk desa. Dalam permainan peran, penduduk desa didorong untuk berlatih menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui "simulasi" dimana penduduk desa memainkan peran menjadi pejabat setempat dan anggota-anggota masyarakat menghadapi situasi seperti: "Pak Putu tidak mau ikut gotong royong memperbaiki jalan karena menurutnya hanya sebagian kecil penduduk desa yang dapat memetik manfaat dari jalan tersebut. Sebagai kepala desa apa yang akan anda lakukan? Ibu Kartini mendapatkan masalah dengan IUD-nya dan datang kepada anda, sebagai tetangga, meminta nasihat. Apa yang akan anda katakan kepadanya?" Carol Warren, *Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State*, Oxford University Press, New York, London, 1995.

[†] KHA, Pasal 29(1). Komite Hak Anak menyatakan: "Pasal 29(1) mendesak agar pendidikan berpusat pada anak, bersahabat dengan anak, dan memberdayakan...Pendidikan yang merupakan hak setiap anak harus dirancang untuk memberikan keterampilan kepada anak, meningkatkan kemampuan anak untuk bisa menikmati segala jenis hak asasi manusia dan memajukan budaya yang menghormati nilai-nilai hak asasi manusia," dan "menekankan perlunya pendidikan dirancang dan diberikan sedemikian rupa sehingga bisa memajukan dan memperkuat berbagai nilai etis yang terkandung dalam Konvensi, termasuk pendidikan untuk perdamaian, toleransi, dan penghargaan kepada lingkungan, dalam cara yang menyeluruh dan terpadu." Komite tentang Hak Anak-Anak, Komentar Umum 1: Tujuan Pendidikan, Dokumen PBB CRC/GC/2001/1, 17 April 2001, paragraf 2 dan 13.

126. Dokumen-dokumen resmi juga jelas menyatakan bahwa mengajarkan bahasa Indonesia adalah tugas inti dari sistem pendidikan, baik sebagai cara untuk menjelaskan manfaat integrasi maupun sebagai cara melakukan kontrol.¹⁴⁰ Kecenderungan kuat untuk mengajarkan nilai-nilai penguasa pendudukan dicerminkan dalam perincian buku-buku wajib yang dipesan untuk digunakan di sekolah-sekolah: antara 1984 dan 1989 pemerintah membeli 161.560 buku wajib untuk pelajaran bahasa Indonesia, 39.926 buku pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, dan 9.398 buku pelajaran ilmu pengetahuan alam.¹⁴⁰ Tidak dapat disangsikan lagi bahwa kampanye mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah telah berhasil: pada tahun 1998, 99% dari anak-anak yang berumur antara 10-19 tahun dan 85% dari orang-orang yang berumur 20-29 tahun dapat berbicara bahasa Indonesia (dibandingkan dengan 20% di antara yang berumur 60 tahun ke atas).¹⁴¹

127. Propaganda dalam bidang pendidikan tidak terbatas pada anak-anak sekolah. Program-program pendidikan masyarakat untuk orang dewasa mengajarkan membaca, menulis dan berhitung, bahasa Indonesia “yang terdiri dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk keperluan hidup sehari-hari, sikap pembaharuan dan pembangunan.”¹⁴² Propaganda tidak hanya ditujukan untuk mempengaruhi mereka yang sedang menjalani pendidikan formal, tetapi generasi muda pada umumnya. Sebagai contoh, sebuah dokumen yang menguraikan sasaran pendidikan untuk Timor-Leste pada tahun 1996, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Lima Tahun yang Keenam, berisi satu bagian berjudul “Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Khususnya di Lingkungan Generasi Muda” (menyusul satu bagian berjudul “Penanggulangan Masalah Sosial”):

Perkembangan permasalahan di Timor Timur, akhir-akhir ini senantiasa diwarnai dengan gejolak-gejolak sosial yang ditimbulkan oleh kalangan generasi muda. Untuk mengantisipasi gejolak-gejolak seperti itu, maka upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui: pembinaan secara khusus kepada para siswa Sekolah Dasar sampai dengan SLTA di seluruh Timor Timur, antara lain dengan memasyarakatkan Sejarah Integrasi Timor Timur. Upaya lainnya adalah melalui pembinaan secara khusus kepada para mahasiswa, baik yang belajar di Timor Timur, maupun yang belajar di luar Timor Timur.¹⁴³

128. Pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam dokumen-dokumen resmi ini memberikan kita bukan saja pengertian tentang pemikiran resmi mengenai pendidikan, tetapi juga mengenai betapa dalamnya salah pengertian negara mengenai apa sumber ketidakpuasan orang Timor-Leste dan tidak efektifnya “pembangunan” sebagai jalan keluar yang diberikan oleh Indonesia dalam suatu suasana yang sangat militeristis dan menindas. Untuk memberi gambaran mengenai hal ini, dalam pembelaannya atas tuduhan subversi berkenaan dengan demonstrasi yang diadakan di Jakarta pada bulan November 1991 untuk memprotes pembantaian di Santa Cruz, ketua perhimpunan mahasiswa Renetil, Fernando de Araújo, menyatakan bahwa penentuan nasib sendiri tidak dapat ditukar dengan jalan aspal dan simbol-simbol pembangunan lainnya:

Kalau saja rakyat Timor Timur sudah berjiwa materialis kemungkinan mereka dapat menerima pembangunan itu sebagai ganti dari hak asasi mereka...Hak kemerdekaan, hak kebebasan tidak dapat ditukar dengan mobil plat

¹⁴⁰ “...pembangunan pendidikan nasional mengusahakan: pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.” Pemerintah Daerah Tingkat I Timor Timur, *20 Tahun Timor Timur Membangun*, halaman 181.

merah, jalan aspal, dan barang-barang lainnya...Hak kami untuk berhubungan dengan negara-negara lain, hak kami untuk mengolah kekayaan alam kami, hak kami untuk meminta bantuan kepada luar negeri dengan mengatakan rakyat Timor Timur masih serba kekurangan, (seperti yang sering dilakukan oleh pemerintah ini) — semua hak ini telah diambil dari kami. Jangan hanya melihat pada apa yang telah didapat di tangan tapi hendaknya harus mempelajari juga bagaimana proses untuk mendapatkannya.¹⁴⁴

7.9.5 Temuan

Temuan umum

129. Komisi menemukan bahwa:

130. Dengan menggunakan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHSEB) dan instrumen-instrumen internasional lain yang relevan sebagai standar, Indonesia gagal memenuhi tanggung jawab utamanya sebagai suatu Negara dalam hal hak ekonomi dan sosial dan gagal melakukan segala upaya untuk secara bertahap merealisasikan hak-hak tersebut sesuai dengan kemampuannya.

131. Indonesia berkali-kali gagal untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial. Indonesia tidak memenuhi kebutuhan dasar penduduknya atas makanan, tempat tinggal, dan obat-obat dasar. Dengan mengalokasikan dananya secara selektif, baik dengan memberikan dana ini ke kelompok tertentu atau menahan dana yang seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, Indonesia telah bertindak secara diskriminatif. Indonesia berulang-ulang melakukan tindakan yang justru mengakibatkan situasi sosial dan ekonomi penduduk menjadi merosot, atau dengan kata lain melakukan langkah-langkah mundur.

132. Kegagalan Indonesia memenuhi tanggung jawab utamanya kepada penduduk Timor-Leste terjadi secara teratur di seluruh masa pendudukan. Misalnya, perlakuan terhadap orang Timor-Leste yang “dimukimkan kembali” setelah mereka menyerah atau ditangkap pada akhir dasawarsa 1970-an dan dampak dari politik bumi hangus yang dilakukan TNI dan milisi sekutu mereka pada tahun 1999 merupakan contoh nyata kebijakan yang menimbulkan pengingkaran hak-hak ekonomi dan sosial penduduk, yang berakibat sangat negatif pada hak-hak mereka untuk menikmati standar hidup yang layak, mendapatkan penghidupan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang paling tinggi, dan untuk melakukan pekerjaan yang dipilih secara bebas.

133. Walaupun Indonesia mengaku telah melakukan pembangunan di Timor-Leste, pada kenyataannya pemerintah Indonesia tidak memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial penduduk Timor-Leste yang setinggi mungkin.

134. Penguasa Indonesia, baik militer maupun sipil, mengabaikan ketetapan-ketetapan dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Konvensi Den Haag tahun 1907 tentang kewajiban penguasa pendudukan untuk menghormati hak-hak ekonomi dan sosial penduduk di wilayah yang diduduki. Mereka melanggar kewajiban khusus mereka untuk tidak menghancurkan atau merampas harta benda secara sewenang-wenang, tidak mengambil keuntungan dari sumber daya di wilayah pendudukan, dan tidak memaksa penduduk di wilayah pendudukan untuk menjalani wajib militer dalam pasukan penguasa pendudukan. Seperti telah dicatat di atas, Indonesia juga tidak memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan kebutuhan dasar berupa makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal, sehingga tidak hanya melanggar standar-standar yang telah ditetapkan di dalam Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tetapi juga kewajiban mereka menurut hukum kemanusiaan internasional.

135. Banyak tindakan penguasa Indonesia selama masa pendudukan berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial penduduk Timor-Leste yang berjangka panjang dan dalam banyak kasus dirasakan sampai sekarang. Perampasan sumber daya alam, seperti kayu, yang ditebang sampai menyisakan pada tingkat yang rendah, sehingga dalam jangka panjang mempengaruhi kesejahteraan penduduk. Yang tidak kalah parahnyanya adalah dampak sosial dari tindakan-tindakan ini. Penggunaan sumber daya secara diskriminatif menimbulkan perpecahan baru dan melanggengkan perpecahan yang sudah ada. Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang untuk memindahkan penduduk dan untuk mengusir mereka secara paksa berakibat pada ketidakpastian hak kepemilikan tanah dan adanya orang yang tidak memiliki tanah sama

sekali. Berbagai jenis teror terhadap sebagian besar penduduk, yang meliputi penyiksaan, pembunuhan, dan perkosaan, merusak kesehatan mental orang Timor-Leste dalam jumlah yang tidak diketahui. Komisi berpendapat bahwa segala dampak sosial ini menjadi hambatan dalam proses rekonsiliasi dan perlu diselesaikan dalam konteks tersebut.

136. Timor-Leste bukan satu-satunya wilayah di bawah kekuasaan Indonesia yang mengalami pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial selama masa pendudukan. Banyak pelanggaran di atas juga terjadi di Indonesia sendiri dalam periode yang sama. Namun demikian, karena kontrol militer di Timor-Leste yang sangat tinggi dan karena konteks invasi dan pendudukan di Timor-Leste, maka pelanggaran-pelanggaran ini lebih keras dan membatasi kemampuan penduduk untuk memperbaikinya melalui pencarian ganti rugi atau sarana-sarana yang lainnya.

Temuan spesifik

Hak atas standar hidup yang layak

Pembangunan dan pengeluaran pemerintah

137. Meskipun investasi pemerintah Indonesia di Timor-Leste sangat besar dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama jika dibandingkan dengan masa pemerintah kolonial Portugis, yang mengarahkan distribusi investasi ini terutama adalah kepentingan keamanan pemerintah bukan kepentingan masyarakat Timor-Leste. Perbedaan antara investasi dan pertumbuhan di sektor-sektor seperti transportasi, komunikasi dan administrasi pemerintahan dan di sisi lain pertanian, yang menjadi penopang kehidupan sebagian besar penduduk, jelas menunjukkan distorsi prioritas penguasa pendudukan. Indikator pendapatan dan kemiskinan pada akhir pendudukan Indonesia, yang menunjukkan Timor-Leste berada di bawah negara-negara lain dan semua provinsi di Indonesia, memberikan bukti kuat tentang dampak merugikan dari pilihan prioritas penguasa pendudukan pada kondisi kehidupan sebagian besar rakyat Timor-Leste.

Hak atas sumber daya alam

138. Komisi merasa yakin bahwa perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan militer dan pemerintah Indonesia secara sengaja dan sistematis membayar dengan harga yang sangat rendah kepada para petani kopi, sehingga ini sama saja dengan membatasi hak mereka untuk mendapatkan kehidupan yang layak.

139. Aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia di sektor industri kopi merupakan salah satu hal dimana pemerintah Indonesia mengabaikan salah satu unsur penting dari hak rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib sendiri, yaitu hak untuk memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya alam secara bebas. Penguasa Indonesia melakukan pelanggaran yang sama saat mereka mengeksploitasi sumber daya alam seperti kayu cendana dan kayu, tanpa mempertimbangkan keberlangsungannya dan karena tidak membuat aturan tentang eksploitasi sumber daya ini oleh pihak lain. Bentuk-bentuk eksploitasi sumber daya alam ini juga sangat merugikan kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk membiayai operasi militer, dan karena itu melanggar kewajiban penguasa pendudukan.

140. Pelanggaran lebih jauh hak rakyat Timor-Leste untuk memanfaatkan sumber daya alam, Komisi menemukan bahwa Indonesia dan Australia menandatangani Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989 tanpa melakukan konsultasi dengan penduduk Timor-Leste atau menghormati kepentingan mereka.

Hak untuk mendapatkan makanan yang layak

141. Pemerintah Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang justru memperburuk keadaan makanan rakyat Timor-Leste. Cuaca di Timor-Leste dan mutu tanah yang tidak sama membuat situasi makanan rentan bahkan pada waktu-waktu yang terbaik sekalipun, dan kemampuan bertahan hidup tergantung pada kemampuan penduduk untuk bergerak secara bebas. Komisi menemukan bahwa penguasa Indonesia tidak hanya mengabaikan pertanian; mereka juga melakukan tindakan-tindakan keamanan yang justru menurunkan kesempatan penduduk petani untuk bertahan hidup, terutama dengan memaksa mereka pindah ke tempat-tempat yang tanahnya tidak subur dan dalam mana gerak mereka dibatasi.

Perumahan dan tanah

142. Komisi menemukan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik – Fretilin, UDT, dan pasukan keamanan Indonesia dan kaki-tangannya—melakukan kegiatan, termasuk pemindahan paksa, penghancuran rumah dan harta benda lainnya, dan perampasan barang, yang melanggar hak atas perumahan.

143. Komisi menemukan bahwa pemindahan yang dilakukan berulang-ulang, perubahan batas wilayah administrasi, dan tidak diakuinya kepemilikan tanah dan praktek tata guna tanah menurut adat mengakibatkan adanya orang-orang yang tidak mempunyai tanah dan sengketa tanah yang sangat rumit. Meskipun pertimbangan keamanan memainkan peranan penting dalam hal ini, kepentingan ekonomi pejabat militer dan sipil yang tidak terkontrol serta rekan-rekan usaha mereka juga merupakan faktor yang sangat penting. Kekacauan kepemilikan tanah dan pola tata guna tanah sudah dan masih mempunyai dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Timor-Leste.

Hak atas kesehatan dan pendidikan

144. Walaupun investasi Indonesia di bidang pendidikan dan kesehatan sangat besar yang menghasilkan adanya sarana fisik sistem kesehatan dan pendidikan di seluruh Timor-Leste, Komisi menemukan bahwa sistem pendidikan dan kesehatan ini tidak efektif mengatasi persoalan kesehatan masyarakat atau memenuhi kebutuhan dasar pembelajaran.

145. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Yang termasuk akibat sampingan dari pelanggaran yang ekstrem, seperti penyiksaan dan perekrutan paksa, adalah buruknya kesehatan dan pendidikan yang terhambat. Pembangunan ekonomi yang berat sebelah yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia menciptakan lingkaran yang berkelanjutan dimana kemiskinan, pada satu sisi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, di sisi lain, saling memperkuat. Konteks militerisasi yang begitu tinggi dan faktor-faktor struktural lainnya, seperti kurangnya kemampuan dan kemauan petugas kesehatan dan guru Indonesia yang ditugaskan di Timor-Leste, menghasilkan suatu layanan yang berkualitas rendah dan tidak dipercaya oleh penduduk setempat. Kebutuhan kesehatan dasar dan pendidikan sering dikalahkan oleh pertimbangan keamanan, seperti diperlihatkan dalam kasus pemindahan paksa sejumlah besar penduduk ke wilayah yang terjangkiti penyakit yang sebelumnya tidak diperhatikan dan pengutamaan pada progaranda di sekolah-sekolah.

146. Pelaksanaan program Keluarga Berencana di Timor-Leste sama sekali bertentangan dengan prinsip yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak atas kesehatan, yaitu kebebasan untuk mengontrol kesehatan dan badan seseorang dan hak untuk mendapatkan informasi yang memungkinkannya memiliki kontrol tersebut. Komisi menemukan bahwa ada unsur paksaan dalam program Keluarga Berencana, yang diperkuat oleh pendekatan yang mengejar target dan keterlibatan militer secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan

program. Program ini juga dilaksanakan dengan mengabaikan akibat sampingan nyata metode-metode pembatasan kelahiran yang digunakan.

147. Kecurigaan yang muncul karena pendekatan otoriter dalam perawatan pasien tercermin dalam luasnya kepercayaan yang diberikan kepada tuduhan bahwa Indonesia secara rahasia melakukan kampanye sterilisasi paksa yang tujuannya adalah untuk memusnahkan bangsa Timor-Leste. Komisi tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan ini, tetapi tuduhan semacam ini menunjukkan adanya kecurigaan yang muncul akibat pendekatan otoriter dalam pelayanan kesehatan dimana petugas kesehatan merasa tidak wajib untuk memberikan informasi kepada pasien mengenai perawatan mereka.

148. Digunakannya sekolah untuk propaganda dan indoktrinasi sangat menghambat pendidikan satu generasi muda Timor-Leste. Pendidikan digunakan dengan cara ini sebagai bagian dari pendekatan keamanan terpadu yang tujuan terbesarnya adalah untuk menjamin agar dukungan kepada pro-kemerdekaan tidak sampai berakar pada generasi baru. Dalam konteks ini, mengajari anak-anak keterampilan yang akan meningkatkan kesempatan dan kemampuan mereka untuk merealisasikan potensi mereka sebagai manusia tidak diutamakan.

¹ Joint Assessment Mission, *East Timor – Building a Nation, A Framework for Reconstruction and Development*, November 1999, halaman 20.

² *Vienna Declaration and Programme for Action*, UN World Conference on Human Rights, Wina, 25 Juni 1993, Dokumen PBB A/CONF.157/23, Pasal 8.

³ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, *Pernyataan kepada Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia*, Dokumen PBB E/1993/22/Annex III, paragraf 5 dan 7, dikutip dalam Henry J. Steiner dan Philip Alston, *International Human Rights In Context: Law, Politics, Morals*, edisi kedua, Oxford University Press, Oxford, New York, 2000, halaman 238.

⁴ International Committee of the Red Cross (ICRC), *Report on the Activities of the Delegation from 1-5 September 1975*, laporan internal kepada Markas Besar ICRC di Jenewa, Dili, 1975 (ada dalam arsip CAVR); ICRC, *ICRC Relief Programme in Eastern Timor*, Dili, 24 November 1975, halaman 1.

⁵ Jon Pedersen dan Marie Arneberg (penyunting), *Social and Economic Conditions in East Timor*, International Conflict Resolution Programme, Columbia University dan Fafo Institute of Applied Social Science, Oslo, 2001, halaman 154-160.

⁶ João Mariano de Sousa Saldanha, *Ekonomi-Politik Pembangunan TimorTimur*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, halaman 65 dan 261.

⁷ Rui Gomes, *East Timor's Socio-Economic Development under Indonesia (1976-1999)*, London, 2002, halaman 155.

⁸ Ibid, halaman 150.

⁹ Ibid, halaman 156.

¹⁰ *Timor Timur Dalam Angka 1983*, halaman 32; *Timor Timur Dalam Angka 1997*, halaman 57.

¹¹ Gomes, halaman 162.

¹² Pedersen dan Arneberg, halaman 108.

¹³ EASD, *Export of Goods from East Timor by Chapter in 2001/2002*, Ministry of Finance, Economic Affairs and Statistics Division, Timor-Leste.

¹⁴ Oxfam, *Overview of the Coffee Sector in Timor Leste*, Dili, Januari 2003, tersedia di <www.oxfamgb.org/eastasia/documents/coffetimor.doc>

¹⁵ Kevin Sherlock, *East Timor: Liurais and Chefes de Suco; Indigenous Authorities in 1952*, Darwin, 1983, halaman 15; Shepard Forman, "Descent, Alliance, and Exchange Ideology among the Makassae of East

Timor,” dalam James Fox (penyunting), *The Flow of Life: Essays on Eastern Indonesia*, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1980, halaman 152-177; Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, University of Queensland Press, St. Lucia, 1978, halaman 39 dan 41.

¹⁶ William Clarence-Smith, “Planters and Smallholders in Portuguese Timor in the Nineteenth and Twentieth Centuries,” *Indonesia Circle*, No. 57, Maret 1992, halaman 15-30.

¹⁷ David Jenkins, “Sumampouw’s Biggest Bet,” *Sydney Morning Herald* (Sydney, Australia), 30 Maret 1995.

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Michael Richardson, “Timor pays for its invasion – in coffee,” *The Age* (Melbourne, Australia), 15 Maret 1977, dikutip dalam Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, halaman 103.

²² Wawancara CAVR dengan Sam Filliaci, Yogyakarta (melalui telepon), 9 Juli 2004.

²³ Wawancara CAVR dengan Gilman dos Santos, Christiano Caetano, Dionisio Babo Soares, Sam Filliaci, Arcanjo da Silva, Chung Ki Seng, Norberto Gonçalves, Idelfino, Raimundo Matinsi, Jacob Salsinha Madeira, Mei 2004.

²⁴ Wawancara CAVR dengan Mário Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.

²⁵ George Junus Aditjondro, *In the Shadow of Mount Ramelau: The Impact of the Occupation of East Timor*, INDOC, Leiden, 1994.

²⁶ Lihat Richard Robison, *The Rise of Capital*, Allen & Unwin, North Sydney, 1986, halaman 250; Lesley McCulloch, “Tri-fungsi 2000: The Role of the Indonesian Military in Business,” Oktober 2000, Bonn International Centre for Conversion.

²⁷ TAPOL, *East Timor under the Indonesian Jackboot*, Occasional Report No. 26, Oktober 1998. Ini juga dibenarkan oleh Lansell Taudevin, mantan pekerja bantuan kemanusiaan Australia dalam Lansell Taudevin, *East Timor: Too Little Too Late*, Duffy and Snellgrove, Sydney, 1999, halaman 77-78.

²⁸ Teofilo Duarte, *Timor: Ante-Camara do Inferno*, Tip Minerva de Gaspar Pinto de Sousa Irmão, Famação, 1930, dikutip dalam Saldanha, halaman 64.

²⁹ Laporan penjarahan kayu cendana oleh TNI pada tahun 1976: CAVR, Profil Masyarakat Desa Costa, Subdistrik Pante Makassar, Distrik Oecusse, 16 Februari 2004. Pernyataan HRVD 0643, 1620 menyebutkan kayu cendana digunakan sebagai tebusan kepada TNI untuk melepas tahanan.

³⁰ *Timor Timur Dalam Angka 1993*, halaman 209.

³¹ Odd Terje Sandlund et al., *Assessing Environmental Needs and Priorities in East Timor: Final Report*, NINA-NIKU, Foundation for Nature Research and Cultural Heritage Research, Trondheim, 2001, halaman 25.

³² George Bouma dan Halina Kobryn, “Changes in Vegetation Cover in East Timor (1989-1999),” *Natural Resources Forum*, 28 (1), 2004, halaman 1-12.

³³ Riwanto Tirtosudarmo, “Demographic engineering, population mobility and social conflict in Indonesia,” makalah disampaikan pada lokakarya *The Social-Economic Situation During Economic Crisis in Indonesia*, National University, Singapura, 30 Mei-1 Juni 2000. Dikutip dalam Bouma dan Kobryn.

³⁴ Joachim Metzner, *Man and Environment in Eastern Timor*, Australian National University, Canberra, 1977, halaman 248.

³⁵ Gomes, halaman 156.

³⁶ Saldanha, halaman 214.

-
- ³⁷ Saldanha, halaman 215.
- ³⁸ Pedersen dan Arneberg, halaman 69 dan 108.
- ³⁹ Wawancara CAVR dengan Francisco Soares Pinto, Wakil Kepala Desa Cainliu, Iliomar, Lautem, 1 Juni 2003.
- ⁴⁰ Dikutip dalam John G. Taylor, *Indonesia's Forgotten War: the Hidden History of East Timor*, Zed Books, London, 1991, halaman 93.
- ⁴¹ Wawancara CAVR dengan Gilman dos Santos.
- ⁴² Ibid
- ⁴³ CAVR, Profil Komunitas Desa Ossohuna, Subdistrik Baguia, Distrik Baucau, 27 Agustus 2003.
- ⁴⁴ Metzner, halaman 246.
- ⁴⁵ Petunjuk Militer JUKNIS/04-b/IV/1982, "Bagaimana Melindungi Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK," dokumen militer yang disita nomor 5, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, halaman 216.
- ⁴⁶ Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Kepala Desa Fuad, Iliomar, Lautem, 28 Mei 2003; Gaspar Seixas, wakil camat Iliomar 1979-1985, Iliomar, Lautem, 29 Mei 2003; Francisco Soares Pinto, Wakil Kepala Desa Cainliu, Iliomar, Lautem, 1 Juni 2003.
- ⁴⁷ Wawancara CAVR dengan Tome da Costa Magalhães, Same, Manufahi, 29 Februari, 2003.
- ⁴⁸ Wawancara CAVR dengan Fernando Amaral, Kepala Desa Fuad, Iliomar, Lautem, 28 Mei 2003; Gaspar Seixas, wakil camat Iliomar 1979-1985, Iliomar, Lautem, 29 Mei 2003; Fransisco Soares Pinto, Wakil Kepala Desa Cainliu, Iliomar, Lautem, 1 Juni 2003.
- ⁴⁹ Wawancara CAVR dengan José Gomes, Lalerek Mutin, Viqueque, 14 Desember 2002.
- ⁵⁰ Ibid. Lihat juga profil komunitas CAVR untuk Desa Rotuto, Subdistrik Same, Distrik Manufahi; Desa Foholulik, Subdistrik Tilomar, Distrik Covalima, 21 Oktober 2003; Desa Caicase, Subdistrik Fatuberliu, Distrik Manufahi 12 Februari; Desa Bibileo, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 5 Juni 2003; Desa Luca, Subdistrik Viqueque, Distrik Viqueque, 10 Juni 2003; Desa Uma Kik, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque, 11 Juni 2003.
- ⁵¹ Amnesty International, *East Timor Violations of Human Rights: Extrajudicial Executions, Disappearances, Torture and Political Imprisonment*, Amnesty International Publications, London, 1985, halaman 71.
- ⁵² D.J. Richardson, "Visit to East Timor – 23-28 September 1982," laporan disampaikan pada Komite Dengar Pendapat Senat Australia mengenai Timor-Leste, September 1982.
- ⁵³ Wawancara CAVR dengan Joana Pereira, Dili, 10 Juni 2003; Joana Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, Dili, 28-29 Juli 2003.
- ⁵⁴ Profil Komunitas dari Desa Vatuboro, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça, 5 Juni 2003, dimana sekolah dimulai kembali pada tahun 1984; Desa Guguleur, Subdistrik Maubara, Distrik Liquiça, 12 Juni 2003, dimana penduduk diperbolehkan meninggalkan kamp pada tahun 1981 tetapi sekolah tetap belum dimulai sampai 1984; Desa Lukulai, Subdistrik Liquiça, Distrik Liquiça, 19 Februari 2003, dimana sekolah dimulai kembali tahun 1981.
- ⁵⁵ Wawancara CAVR dengan Tome da Costa Magalhães, Same, Manufahi, 29 Februari 2003
- ⁵⁶ Richardson
- ⁵⁷ Pedro de Sousa Xavier, *Studi Tentang Hukum Pertanahan Adat Timor Timur di Kecamatan Uato-Carbau, Kabupaten Viqueque*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, 1998.
- ⁵⁸ "Komisi tidak diperkenankan menangani masalah sengketa tanah, tetapi harus mencatat dan merujuk segala urusan yang berkaitan dengan tanah kepada otoritas UNTAET terkait." Pasal 38.2 Regulasi mandiri Komisi, Regulasi No. 10/2001.

-
- ⁵⁹ Laura Meitzner Yoder, "Custom dan Conflict: The Uses dan Limitations of Traditional Systems in Addressing Rural Land Disputes in East Timor," makalah dipersiapkan untuk lokakarya regional mengenai *Kebijakan Pertanahan dan Administrasi yang Memihak pada Pertumbuhan yang Memihak Rakyat Miskin Pedesaan*, Dili, Desember 2003, halaman 10.
- ⁶⁰ Claudia D'Andrea, "The Customary Use and Management of Natural Resources in Timor-Leste," makalah disiapkan untuk lokarya regional *Land Policy and Administration for Pro-Poor Rural Growth*, Dili, Desember 2003, hal. 17-18; Daniel Fitzpatrick, *Land Claims in East Timor*, Asia-Pacific Press, 2002, halaman 126.
- ⁶¹ Komentar pribadi dari A. Viotti, mantan pejabat hukum UNTAET untuk Manatuto, dikutip oleh Fitzpatrick halaman 135.
- ⁶² Wawancara CAVR dengan Pedro de Sousa Xavier, tanggal tidak tercatat.
- ⁶³ Saldanha, halaman 218.
- ⁶⁴ Yayasan HAK, "The Politics of Agrarian Disputes in East Timor: The Struggle for Land Rights dan the Right to Self-Determination," Dili, laporan tidak diterbitkan, tidak bertanggung, dikutip dalam Fitzpatrick 2002.
- ⁶⁵ Ibid.
- ⁶⁶ George Aditjondro, *Meyongsong Matahari Terbit di Puncak Ramelau*, Yayasan HAK dan Fortilos, Dili, 2000, halaman 192.
- ⁶⁷ Yayasan HAK, halaman 18-19, dikutip dalam Fitzpatrick, halaman 124-125.
- ⁶⁸ Fitzpatrick, halaman 119.
- ⁶⁹ N. Baisaku, "Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Setelah Berlakunya Undang-undang pokok agraria di Propinsi Timor Timur," tesis tidak diterbitkan, Institut Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 1996, dikutip dalam Fitzpatrick, halaman 96.
- ⁷⁰ Joint Assessment Mission, *Report of the Joint Assessment Mission to East Timor*, World Bank, 8 Desember 1999, halaman 1-19.
- ⁷¹ Joint Assessment Mission, *Health and Education Background Paper*, 1999, halaman 1.
- ⁷² Ibid, halaman 7.
- ⁷³ KORPRI, *20 Tahun Timor Timur Membangun*, Dili, 1996, halaman 93.
- ⁷⁴ KIHSEB Komentar Umum 14, (komentar mengenai persoalan substantiv yang timbul dalam KIHSEB) paragraf 8.
- ⁷⁵ Komite untuk Penghapusan Segala Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 10 (h), 16 (1)e.
- ⁷⁶ KIHSEB Komentar Umum 14, paragraf 43.
- ⁷⁷ Pasal 2, Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, buka untuk tandatangan 16 Desember 1966, Mulai Berlaku: 3 Januari 1976
- ⁷⁸ Wawancara CAVR dengan Sue Ingram, Dili, 5 Agustus 2004.
- ⁷⁹ Whitehall
- ⁸⁰ Joint Assessment Mission to East Timor 1999, halaman 11.
- ⁸¹ UNDP 2001, dikutip dalam Gomes, halaman 200.
- ⁸² Pedersen dan Arneberg, halaman 61-62.
- ⁸³ World Bank Poverty Assessment Survey, halaman 5.
- ⁸⁴ UN Country Team, 2000, halaman 52.

-
- ⁸⁵ Meharben Singh, "The Role of Micronutrients for Physical and Mental Development," *Indian Journal of Pediatrics*, Vol. 71 (1), 2004, halaman 59-62; Ernesto Pollitt dan C. Thomson, "Protein-calorie malnutrition and behavior: A view from psychology," dalam Richard Wurtman dan Judith Wurtman (penyunting) *Nutrition and the Brain*, jilid 2, Raven, New York, 1977; Derrick Jelliffe, "Effect of Malnutrition on Behavioral and Social Development," dalam *Proceedings of the Western Hemisphere Nutrition Congress*, American Medical Association, Chicago, 1965.
- ⁸⁶ World Bank, *Poverty in a New Nation: Analysis for Action*, Dili, 2003, jilid 2, halaman 144-145.
- ⁸⁷ Pedersen dan Arneberg, halaman 70.
- ⁸⁸ Ibid, halaman 71.
- ⁸⁹ Ibid.
- ⁹⁰ Donor Joint Assessment Mission, *Health and Education Background Paper*, November 1999.
- ⁹¹ Saldanha, halaman 50.
- ⁹² Ibid, halaman 47.
- ⁹³ Ibid, halaman 43.
- ⁹⁴ Pedersen dan Arneberg, halaman 80.
- ⁹⁵ Ibid, halaman 80.
- ⁹⁶ Lokakarya kesehatan CAVR, 30 Agustus 2004
- ⁹⁷ Pedersen dan Arneberg, halaman 63.
- ⁹⁸ Karen Campbell-Nelson, Yooke Adelina Damapolii, Leonard Simanjuntak, dan Ferderika Tadu Hungu, *Perempuan dibawa/h Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian Di Timor Barat*, JKPIIT dan PIKUL, Kupang, 2001, halaman 54.
- ⁹⁹ Ibid, p.71.
- ¹⁰⁰ Wawancara CAVR dengan Natália Dos Santos, Liquiça, 28 Maret 2003; wawancara CAVR dengan Maria Da Costa Silva, Same, 26 Februari 2003; dan wawancara CAVR dengan Raimunda Da Conceição Mendonça Da Costa, Oecusse, 1 April 2003.
- ¹⁰¹ World Bank, *Indonesia: Family Planning Perspectives in the 1990's*, Laporan No. 7760-IND, Country Department V, Asian Regional Office, 30 January 1990, 'Definitions'.
- ¹⁰² John Fernandes, kesaksian ahli yang diberi ke CAVR, Audensi Nasional mengenai Perempuan dan Konflik, 28-19 April 2003.
- ¹⁰³ Ibid.
- ¹⁰⁴ Wawancara CAVR dengan Natalia dos Santos, Liquiça, 28 Maret 2003.
- ¹⁰⁵ *Rekaman Peristiwa*, Juli 1996, halaman 8.
- ¹⁰⁶ Wawancara CAVR dengan Lucia Maria Pereira, Same, 27 Februari 2003.
- ¹⁰⁷ Aditjondro, 2000, halaman 110; Budiardjo dan Liem, halaman 116; Sarah Storey, "Coercive Birth Control and Settler Infusion: The Indonesian prophylactic against East Timorese self-determination," *East Timor Update - Supplement*, 1996.
- ¹⁰⁸ Wawancara CAVR dengan Isabel Galhos, Dili, 22 April 2003.
- ¹⁰⁹ Ibid.
- ¹¹⁰ Wawancara CAVR dengan Carlito Das Rebras, Same, Manufahi, 27 Februari 2003.
- ¹¹¹ Wawancara CAVR dengan Senorinha Mendonça, Maubisse, Ainaro, 8 September 2004.

-
- ¹¹² Miranda Sissons, *From One Day to Another: Violations of Women's Reproductive and Sexual Rights in East Timor*, East Timor Human Rights Centre Incorporated, Melbourne, 1997, halaman 21.
- ¹¹³ Paola Totaro, "Country on a Couch," *Sydney Morning Herald* (Sydney, Australia) 24 Juni 2000, halaman 30.
- ¹¹⁴ J. Modvig, J. Pagaduan-Lopez, J. Rodenburg, C. M. D. Salud, R. V. Cabigon, C. I. A. Panelo, "Torture and Trauma in Post-Conflict East Timor," *Lancet*, November 2000, halaman 356.
- ¹¹⁵ Derrick Silove, K. Tang, M. Chaussivert, dan M. Soares. "Trauma Recovery and Community Mental Health" dan J.S. Martins dan R. M. de Araújo. "Strategic Health Development Planning for East Timor"; keduanya adalah makalah yang tidak diterbitkan yang disampaikan pada *Strategic Development Planning for East Timor Conference* [Konferensi Perencanaan Pembangunan Strategis untuk Timor-Leste], Melbourne, 5-9 April 1999. Pedersen dan Arneberg, halaman 74.
- ¹¹⁶ Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum 13, paragraf 1.
- ¹¹⁷ Ibid paragraf 6 (a).
- ¹¹⁸ Ibid, paragraf 6 (b).
- ¹¹⁹ Ibid, paragraf 6 (c).
- ¹²⁰ Ibid, paragraf 6 (d).
- ¹²¹ KIHSEB, Pasal 13 (1).
- ¹²² Saldanha, halaman 57, Pedersen dan Arneberg, halaman 84.
- ¹²³ Pedersen dan Arneberg, halaman 85.
- ¹²⁴ Saldanha, halaman 58.
- ¹²⁵ Ibid, halaman 60.
- ¹²⁶ SUSENAS 1998.
- ¹²⁷ Pedersen dan Arneberg, halaman 91.
- ¹²⁸ Pedersen dan Arneberg, halaman 86.
- ¹²⁹ World Bank, Poverty Assessment Survey, jilid 1, halaman 131.
- ¹³⁰ Gomes, halaman 200.
- ¹³¹ Oxfam, *East Timor Human Resource Development Programme Report*, Oxfam, London, 1999, halaman 26, dikutip dalam Pedersen dan Arneberg, halaman 92.
- ¹³² Pedersen dan Arneberg, halaman 92.
- ¹³³ Ibid, halaman 92-93.
- ¹³⁴ TimorAid, *Problems with Indonesian Schooling in East Timor: Why East Timorese students do not succeed*, 1999, ada di: <timoraid.org/v1/timortoday/background/background_0001.htm>.
- ¹³⁵ Pedersen dan Arneberg, *Social dan Economic Conditions*, halaman 90.
- ¹³⁶ Peter Carey, "Third-World Colonialism, the Geração Foun, and the Birth of a New Nation: Indonesia through East Timorese Eyes, 1975-99," *Indonesia*, Vol. 76, Oktober 2003, halaman 23-67.
- ¹³⁷ KORPRI 1996, dikutip dalam Gomes, halaman 206.
- ¹³⁸ Laporan Komando KOMTARRES 15.3 Timor Timur Dalam Rangka Kunjungan KAPOLRI Beserta Rombongan ke Daerah Operasi Timor Timur, Juni 1978, Dili, Daerah Pertahanan Keamanan, Komando Antar Resort Kepolisian 15.3. Lihat juga KORPRI Timor Timur 1996, halaman 145.

¹³⁹ Laporan militer rahasia, Komando Pelaksana Operasi Timor Timur, Dili (8452), Laporan B (Intelijen) Rencana Operasi No. 1/Bayu. 261500/1984, halaman 4. Lihat juga wawancara CAVR dengan Zacarias Mendonça, mantan Kepala Sekolah Dasar Negeri Maubisse, Maubisse, Ainaro, Oktober 2004.

¹⁴⁰ KORPRI Timor Timur 1996, halaman 139.

¹⁴¹ Susenas 1998.

¹⁴² KORPRI Timor Timur, halaman 145.

¹⁴³ Ibid, halaman 243.

¹⁴⁴ Fernando de Araújo, *Pernyataan Pembelaan*, 11 Mei 1992.